

P

Majalah

Parlementaria



| Edisi : 137 TH. XLVI. 2016 |

IRONI KEDAULATAN PANGAN

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

BADAN PANGAN NASIONAL,
SOLUSI KARUT MARUT
PENGELOLAAN PANGAN

12

KEBERADAAN BULOG
MASIH PENTING

50

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si.
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si.
(Deputi Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Suratna, M.Si.
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)
Insan Abdirrahman, SH
(Kasubag Media Sosial)
Ahyar Tibi, SH
(Kasubag Analis Media)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nuradiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350
Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.
www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI



foto cover: liputan6.com

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN
Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

STAF PRODUKSI
Eko Murdiyanto, Barliansyah,

SIRKULASI
Abdul Kahfi, S.Kom,
Siti Rondiyah, Oji
Telp: 021-571 5697,
Fax: 021-571 5421
Email: penerbitandpr@gmail.com

Isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan

PENGANTAR REDAKSI

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, komoditas pangan memiliki peran yang sangat strategis. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Itulah yang mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ditambah lagi Indonesia yang dianugerahi Tuhan sebagai negara agraris, maka kebutuhan pangan mestinya bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri. Sebagai negara tropis para petani bisa menanam padi setahun dua hingga tiga kali panen, jagung beberapa provinsi telah menjadi sentra penghasil jagung

Menurut anggota Dewan Aria Bima, untuk komoditas beras, bawang, daging, dan ayam kita optimis. Namun untuk kedelai kita *megap-megap*, sementara terigu kita tidak produksi. Berdasarkan hitungannya, mestinya kita bisa mencukupi sekitar 60 sampai 70 persen sedangkan 30 persen masih impor.

Parlementaria edisi 137 kali ini mengulas soal pangan tersebut, sebab seringnya terjadi gejolak harga meski jauh menjelang hari-hari besar keagamaan. Kenaikan harga terjadi jauh sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya serta Natal dan Tahun Baru yang biasanya kebutuhan meningkat tajam.

Cita-cita bangsa untuk berdaulat dalam bidang pangan sudah tertuang dalam Undang-Undang Pangan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Ulasan dan laporan tiga fungsi Dewan tetap menjadi bagian dari majalah ini dan kali ini ditampilkan tulisan bertema "Membangun Kepercayaan Publik Kepada Parlemen" oleh Sekjen DPR RI. Bagi lembaga politik, kepercayaan publik begitu urgen dan bisa mendukung proses legislasi di DPR RI. Bahkan, kepercayaan itu juga meningkatkan marwah atau martabat DPR RI. ■

medsos@dpr.go.id | www.dpr.go.id



DAFTAR ISI

ASPIRASI	4
PROLOG	6
LAPORAN UTAMA	
Kedaulatan Pangan Terwujud Jika Semua Kompak	8
Badan Pangan Nasional, Solusi Atasi Karut Marut Pengelolaan Pangan	12
Gangguan Ketahanan Pangan Bisa Picu Kerawanan Sosial	14
Mendandani Jalur Distribusi Pangan	16
Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Mindset	17
SUMBANG SARAN	
Ketahanan Pangan: Persoalan Suply dan Harga	20
PENGAWASAN	
BPIH Turun, Kualitas Pelayanan Ditingkatkan	24
Lion Air Tidak Perlu Panik, Harus Ambil Hikmahnya	26
ANGGARAN	28
LEGISLASI	
RUU Penyelenggaraah Ibadah Haji dan Umroh: Peran Pemerintah Dipangkas	34
FOTO BERITA	36
KIAT SEHAT	44
PROFIL	
Syaifullah Tamliha	
Politisi Berprestasi dari Hulu Sungai Utara	46
KUNKER	50
SOROTAN	
Pelaku Kekerasan Seksual Perlu Dihukum Mati	62
LIPUTAN KHUSUS	64
SELEBRITI	68
PERNIK	
Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Parlemen	70
PARLEMEN DUNIA	74
POJOK PARLE	78



8 LAPORAN UTAMA



38 FOTO BERITA



64 LIPUTAN KHUSUS



70 SELEBRITI

Legalitas Yayasan

Kami dari LBH Buddhis Indonesia, Kuasa Hukum Sdr. Tan Adipranata, dkk, (Pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti di Jln. Kemenangan III No.13 Rt.003 RW.02, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat) yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI perihal permohonan perlindungan hukum terkait status kepemilikan Yayasan Wihara Dharma Bakti di Jln. Kemenangan III No.13 Rt.003 RW.02, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Bahwa ada pihak lain yang mempergunakan Yayasan Wihara Dharma Bakti berdasarkan Surat Dirjen AHU No.AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015 yang menyatakan Wihara Dharma Bakti telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana gugatan Sdr. Hindharto Budiman, dkk dalam perkara No.229/G/2015/PTUN-JKT dimana klien kami menjadi tergugat II Intervensi, sementara tergugat I adalah Menkumham RI.

Surat Dirjen AHU No.AHU-AH.01.06-1281 tgl. 14 September 2015 tersebut terkesan lebih tinggi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, sehingga merugikan klien kami. Kami telah meminta penjelasan terkait hal tersebut kepada pihak Kemenkumham RI sebagaimana surat No.015.0036/LBHBI-KS/012/2015 tanggal 11 Desember 2015, namun belum ada tanggapan.

Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salam Surjadi dkk
Jakarta Barat

Penyidik yang Tidak Profesional

Kepada Ketua Komisi III DPR RI, telah terjadi tindakan penyidik yang tidak profesional dalam menangani laporan Polisi No. LP/88/II/2016/NTB/SPKT tgl. 29 Februari 2016 tentang tindak pidana pembegalan/perampokan yang terjadi di Wilayah Polresta Bima.

Saya adalah keluarga korban pembegalan/perampokan, di Jln. Lintas Wera-Sape, Desa Lamere Kec. Sape, Kabupaten Bima, NTB menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja penyidik di Polresta Bima.

Bahwa pada kejadian tersebut korban mengalami luka tusukan pada bagian perut, kepala bagian belakang, dan sabitan pisau pada tangan dan kaki sehingga korban tidak bisa ditolong dan meninggal dunia.

Bahwa perkara tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bima namun menurut pengadu ada indikasi tidak ada

Kasus-kasus Korupsi di Cilacap

Kami mewakili Himpunan Masyarakat Peduli Cilacap (HMPC) bertindak untuk dan atas nama elemen masyarakat Cilacap yang aktif dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cilacap.

Melaporkan banyaknya kasus korupsi yang belum ditangani dan memohon agar Penegak Hukum di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bekerja secara profesional dan proporsional tanpa tebang pilih agar tidak ada yang dikorbankan, adapun beberapa kasus yang perlu segera ditangani oleh Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap adalah sebagai berikut :

Penyalahgunaan Dana Alokasi Pendidikan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) sampai sekarang tidak jelas.

Kasus Askeskin Tahun Anggaran 2007, dengan penanggung jawab anggaran adalah Kepala DKK Cilacap, yang proses hukumnya tidak jelas.

Pengadaan buku pelajaran untuk SD s.d. SLTA, perpustakaan sekolah dan buku pegangan guru se-Kabupaten Cilacap sebesar Rp 9,9 Milyar Tahun Anggaran 2006, proses hukumnya tidak berjalan.

Program Simpedes atau Pengadaan Komputer Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 13 Milyar, kasus ini awalnya ditangani Polwil Banyumas kemudian ditangani Polda Jawa Tengah dan belum menyeret aktor intelektualnya.

Dana abadi pada tahun 2005 total Rp 53 Milyar. Mark Up jaringan RSUD Rp. 500 juta, dan kasus Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7 Milyar.

Kami berharap Aparat Penegak Hukum di semua tingkatan segera menangani kasus-kasus tersebut dengan serius dan memohon Ketua DPR RI segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muhadjim Hadi
Cilacap, Jawa Tengah

perkembangan sama sekali selama proses penyelidikan berlangsung, yaitu:

Proses penyelidikan berlangsung lambat dalam waktu kurang lebih 50 hari dan hanya membekuk satu orang pelaku. Diduga ada kerja sama antara oknum penyidik dengan salah satu pihak keluarga pelaku pembegalan.

Tidak ada keterbukaan dari pihak berwenang terhadap pihak keluarga korban. Saya dan keluarga memohon agar Komisi III menindaklanjuti dan memberikan pengawasan atas penyelesaian masalah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih

Moch. Sauqi Futaki
Bima, Nusa Tenggara Barat



Penyelesaian Ganti Rugi Tanah oleh PT.Weda Bay Nickel

Kuasa hukum Kelompok Masyarakat Desa Lelilef Sawai dan Masyarakat Desa Gemaf, menyampaikan kepada Ketua DPR RI up Komisi III DPR RI, perihal penyelesaian ganti rugi tanah milik 66 Kelompok Masyarakat Desa Lelief Sawai oleh PT. Weda Bay Nickle.

Bahwa tanah masyarakat desa Lelilef Sawai seluas 46 ha telah dimasukkan sebagai tanah kas desa dan telah dibebaskan oleh PT Weda Bay Nickle untuk dijadikan sebagai area penambangan nikel tanpa pemberian ganti rugi.

Bahwa pihak manajemen PT. Weda Bay Nickle menyatakan telah memberikan ganti rugi, namun masyarakat belum pernah menerima sehingga mengadukan ke Komnas HAM hingga adanya rekomendasi Komnas Ham No. 2.082/K/KMT/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

Bahwa kendala terkait belum dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM RI adalah karena tidak adanya kemauan dari Komisaris PT. Weda Bay Nickle (PT.WBN), Bupati Halmahera, dan mantan Kader Lelief Sawai.

Kami berharap dapat beraudensi dengan Komisi III untuk menyelesaikan masalah tersebut atas hal-hal sbb:
Pihak manajemen PT. Weda Bay Nickel menyelesaikan

ganti rugi lahan.

Pemimpin PT. Weda Bay Nickel menjelaskan duduk soal dari 13 orang pemilik tanah fiktif termasuk pengalokasian lahan seluas 46 hektar.

PT. Weda Bay Nickel tidak mengoperasikan perusahaannya sebelum menyelesaikan ganti rugi lahan kepada kelompok 66 Warga Desa Gemaf dan Lelief Sawai.

PT. Weda Bay Nickle membayar pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp. 50.000,-/meter persegi.

PT. Weda Bay Nickel segera menarik Polisi yang ditugaskan di lapangan pada proyek tersebut.

PT. Weda Bay Nickel dapat membayar ganti rugi pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp 150.000 bukan Rp. 50.000,- per meter persegi.

Pembebasan lahan hendaklah dilakukan secara langsung kepada masyarakat, baik saat bernegosiasi harga sampai dengan penyerahan dana pembebasan lahan.

Kami memohon agar Ketua Komisi III segera memanggil pihak-pihak terkait dan membantu menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Puspa Sari

Jakarta Timur, DKI Jakarta

Permasalahan Desa Patai dengan Pihak Perusahaan PT. Task III

Saya adalah Ketua Tim desa Patai menyampaikan bahwa PT. Task III telah melakukan pengrusakan jalur transportasi sungai desa Patai dan sungai lainnya, yang dalam kesehariannya digunakan masyarakat desa Patai menuju Desa Sambun untuk beraktifitas, baik berladang dan bercocok tanam serta mencari ikan.

Setelah terjadi pengrusakan tersebut masyarakat tidak dapat lagi menggunakan sungai tersebut, kurang lebih 300 kepala keluarga desa Sambun tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.

Adapun kronologis pelanggaran PT Task III, adalah sebagai berikut :

PT. TASK III telah mendapatkn HGU untuk usaha perkebunan kelapa sawit di Wilayah desa Pamalian, desa Camba dan desa Kandan, Kec. Kota Besi, desa Patai, desa Rubung Buyung, Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur berdasarkan SK Bupati No. 525,26/186/EKSDA/IV/2013 .

Bahwa PT Task III diduga melakukan penanaman pohon kelapa sawit sampai bibir sungai Patai Besar.

Bahwa PT TASK III diduga melakukan pelanggaran terhadap perambahan kawasan hutan dan penanaman di tepi sungai, sebagaimana surat Gubernur Kalteng Nomor 525/1069/FK tanggal 9 September 2010.

Bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah memerintahkan

untuk memindahkan tanaman kelapa sawit yang berada di luar HGU dan ditepi sungai ke lokasi perijinan PT. Task III.

Selain itu, PT. Task III diminta untuk menjaga areal hutan rawa bekas tebang seluas 1512 hektar dan tidak melakukan pembukaan lahan/penebangan dan penanaman pohon kelapa sawit dengan HGU sebagaimana SK 33/MENHUT-II/2007 tanggal 17 September 2007.

PT Task III telah melakukan pembukaan lahan diluar perjanjian dari tahun 2010 seluas 3.400 hektar dimana luasan lahan tersebut baru mendapat ijin prinsip dari Bupati Kotawaringin Timur, bahkan sekarang lahan tersebut sudah ditanami bibit sawit dan sudah berbuah.

PT.Task III tidak melakukan kewajiban 20% pembangunan kebun plasma kepada masyarakat disekitar kebun.

PT. Task III tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat ditutupnya sungai sehingga masyarakat mengalami kerugian material dan non material.

Saya memohon agar Ketua Komisi III membantu menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Suparman

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah



Ironi Kedaulatan Pangan

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Kuasa tanah yang subur. Negara yang berbasis pertanian dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan, dengan mudah bisa memenuhi kebutuhannya. Para petani bisa bercocok tanam padi setahun dua kali, bahkan ada yang bisa tiga kali. Komoditas lain seperti jagung, ketela dan aneka sayuran serta buah-buahan dengan mudah dapat dijumpai di santero Nusantara.



foto: theindonesianinstitute.com

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya negara kita dengan sumber daya alam hayati, flora, fauna dan potensi hidrografis. Perkebunan, persawahan, sungai, laut dan pelabuhan semua ada dalam negara dengan bentang luas alam 2, 02 juta km2 ini.

Dengan kondisi itu maka cita-cita menuju kedaulatan pangan bukanlah khayalan. Kekayaan alam Indonesia seharusnya bisa mencukupi segala macam kebutuhan pokok penduduk negeri. “Kedaulatan pangan harus menjadi *mindset*. Kedaulatan pangan harus menjadi cara berpikir,” tegas politisi senior PDI Perjuangan Aria Bima.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan bahwa negara kita tercinta ini sangat memungkinkan untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, mayoritas penduduk Indonesia mata pencariannya di sektor pertanian. Selain itu, iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan untuk bisa ditanami sepanjang tahun.

“**Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Namun dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di negara kita tidak pernah berubah. Masalah klise tentang kelangkaan bahan pangan menjelang hari-hari besar terus saja terjadi hampir setiap tahunnya.**”

Di sisi lain, 60 persen cadangan pangan di khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat

yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Namun dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di negara kita tidak pernah berubah. Masalah klise tentang kelangkaan bahan pangan menjelang hari-hari besar terus saja terjadi hampir setiap tahunnya.

Cita-cita bangsa untuk berdaulat dalam bidang pangan sudah tertuang dalam Undang-Undang Pangan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Meneruskan amanat itu maka pemerintah perlu membuat langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kenaikan berbagai komoditas pangan akhir-akhir ini. Semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian-kementerian yang terkait segera ambil langkah menekan harga kebutuhan bahan-bahan pokok. ■

(mp)

Kedaulatan Pangan Akan Terwujud Jika Semua Kompak

Masalah pangan menjadi hal yang tidak pernah akan selesai. Sejak manusia lahir hingga tutup usia, dari kalangan bawah sampai atas pasti membutuhkan makan. Terlebih lagi menjelang hari-hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan tahun baru, permasalahan pangan khususnya kelangkaan bahan pangan yang akhirnya membuat harga bahan pangan di pasaran melambung tinggi, seolah menjadi momok yang terus terjadi hampir setiap tahun.

Padahal dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 jelas tertera bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Lantas dimanakah peran negara di saat rakyat sangat membutuhkan “campur tangannya”? Mampukah Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan?, atukah hanya puas dalam kondisi ketahanan pangan yang sejatinya oleh beberapa kalangan juga masih dipertanyakan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan bahwa negara kita, Indonesia tercinta ini sangat memungkinkan untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Pertama, karena mayoritas penduduk Indonesia mata pencahariannya di sektor pertanian. Kedua, iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering,

foto: rizka/iw

Ketua Komisi IV DPR RI, **Edhy Prabowo**



foto: iwan armanias

Hamparan tanaman padi tumbuh subur

hal ini memungkinkan untuk bisa ditanami sepanjang tahun. Ketiga enam puluh persen cadangan pangan di khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang besar bagi negara kita.

Sayangnya, lanjut Edhy, dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di negara kita tidak pernah berubah. Masalah *klise* tentang kelangkaan bahan pangan menjelang hari-hari besar terus saja terjadi hampir setiap tahunnya. Pasti ada sesuatu yang salah dari sistem yang ada. Namun untuk mengetahui letak kesalahannya menurut Edhy harus dilihat sistem tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kalau saya lihat dari hulu sampai ke hilir, letak permasalahannya ada pada tata kelola yang kurang baik. Produksi saya lihat tidak ada masalah. Karena cadangan beras kita di Bulog saja ada lebih dari dua juta ton. Artinya kita memiliki kemampuan dalam produksi, ada peningkatan tanam, sekitar 400 ribu hektar pertambahan lahan tanam baru, dan ini bisa ditingkatkan lagi.

Sehingga jika bicara tentang produksi pangan, bisa dikatakan Indonesia sangat bagus,” ujar Edhy.

Tata kelola yang kurang baik itu menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini terkait pendistribusian pangan yang merupakan wewenang Kementerian Perdagangan. Kementerian perdagangan harus mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertanian yang membawahi permasalahan produksi. Artinya, Kementerian Perdagangan sejatinya tidak melulu memikirkan permasalahan impor dan impor saja. Namun juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian pertanian, bagaimana mendistribusikan pangan secara merata.

Terkadang kelangkaan sebuah bahan pangan di suatu daerah, belum tentu terjadi hal yang sama di daerah lain. Sehingga Kementerian Perdagangan pun tidak harus terburu-buru mengambil langkah impor.

“Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu cabai di Bandung harganya mencapai 45 ribu rupiah per kilogramnya. Para importir buru-buru ingin mengimpor cabai dari negara lain. Untungnya, Walikota Bandung saat itu mengetahui bahwa harga cabai di Cianjur malah sebaliknya, berkisar

15-20 ribu per kilo, dan tengah surplus cabai. Sehingga rencana impor cabai pun berhasil digagalkan,” paparnya.

Melihat hal tersebut Edhy berharap pemerintah jangan melakukan impor jika tidak terpaksa sekali. Artinya kalau tidak ada pangan sama sekali di dalam negeri, barulah pemerintah boleh mengimpor bahan pangan. Hal itu pun sejatinya telah tercantum dalam Undang-undang pangan. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan yang matang. Pemerintah harus menghitung berapa produksi beras tahun ini dengan gejala-gejala alam yang sudah diprediksi sebelumnya, jangan *ujug-ujug* impor.

Ia mencontohkan, tahun 2015 lalu di beberapa wilayah Indonesia terjadi musim kering yang berkepanjangan. Namun Indonesia masih tetap surplus beras. Kondisi yang sama pun bisa terjadi pada komoditi atau bahan pangan lainnya. Hal ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan impor.

Edhy meyakini permasalahan tata kelola yang kurang baik itu dapat diatasi dengan koordinasi yang baik antara menteri pertanian sebagai pihak yang berwenang dalam proses produksi pangan dalam negeri,

serta menteri perdagangan dan perindustrian yang ikut berwenang dalam proses pendistribusian pangan, tentunya di bawah menteri kordinator perekonomian.

“Dalam permasalahan tata kelola, saya tidak akan menunjuk salah satu pihak saja. Namun lebih kepada peran beberapa elemen negara. Sebut saja dalam produksi pangan dalam negeri, negara ini diwakili oleh menteri pertanian. Dalam distribusinya diwakili menteri perdagangan. Kalau diantara distribusi dan produksi bahan pangan ini diolah menjadi industri, ada menteri perindustriannya, dan sudah itu ada menteri kordinator perekonomian juga. Jika kementerian-kementerian terkait itu bersatu dan berkomunikasi dengan baik mencari titik temu, saya yakin petani terurus dengan baik, pedagangnya juga ikut berusaha sama-sama menggerakkan roda ekonomi, begitupun dengan pengusaha dan distributornya. Masyarakat pun akan merasa nyaman dengan harga bahan pangan yang cukup terjangkau,” paparnya.

Walau demikian ia mengaku tidak anti terhadap importir ataupun pedagang-pedagang besar. Sejauh ini tidak ada pelarangan ekspor impor seratus persen. Ada beberapa komoditi yang masih dibebaskan impor, bawang putih misalnya. Ini terjadi karena produksi dalam negeri sangat terbatas, sehingga diberi keleluasaan, (namun tetap diusahakan dalam negeri untuk memproduksi sendiri bawang putih). Hal itu semata untuk mengantisipasi ketergantungan dalam negeri terhadap produk negara lain. Ketergantungan terhadap produk asing itu diyakininya akan beresiko terhadap keamanan nasional.

“Karena begitu distop, mereka tidak akan kirim, maka akan terjadi masalah di dalam negeri. Contoh kasus tahun 2011, dimana Australia melarang mengekspor sapi ke Indonesia dengan alasan higienis, kesehatan dan sebagainya. Bisa dibayangkan ada negara yang tiba-tiba mengambil sikap tidak akan mengekspor bahan pangannya ke Indonesia, sementara kita tergantung, maka apa yang terjadi? Pasti akan berpengaruh terhadap pasar dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus mempersiapkan itu



Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengunjungi gudang beras Bulog

foto: ayu/iw

semua. Indonesia harus mandiri, mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Itulah yang dinamakan kedaulatan pangan. Karena bukan tidak mungkin kasus seperti itu akan kembali terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin juga suatu hari Australia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sapi Indonesia.

Ditambahkannya, terkadang kebijakan impor pangan muncul karena harga yang ditawarkan negara lain jauh lebih murah dibanding dalam negeri. Sebut saja harga beras dalam negeri enam ribu rupiah, sementara harga beras yang ditawarkan negara lain tiga ribu rupiah. Namun politisi dari fraksi Partai Gerinda ini menduga bahwa harga yang ditawarkan importir itu pun sejatinya bukan harga real. Bukan tidak mungkin importir juga mendapat subsidi dari negara yang bersangkutan. Jika demikian maka Indonesia akan terpukul dua kali. Sudah terpukul dari susahnya pengadaan bahan-bahan untuk memproduksi, juga terpukul dari menjualnya.

Lebih lanjut Edhy menilai petani dalam negeri belum bisa dihadapkan pada persaingan terbuka dengan petani-petani diluar, yang notabene sistemnya sudah lebih matang dan rapi. Itu pun tidak melanggar WTO (world

trade organization), tidak melanggar perdagangan bebas. Selama itu untuk kepentingan masyarakat kita, negara berhak meminta perpanjangan untuk tidak menerapkan program tersebut.

Regulasi Pangan

Menghadapi lebaran tahun ini Edhy berharap pemerintah belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itupun sejatinya sudah diingatkan Komisi IV DPR RI kepada mitra kerjanya, Menteri Pertanian sejak setahun sebelumnya. DPR RI meminta menteri pertanian untuk segera mengecek lapangan, mulai dari sisi produksi terutama bahan-bahan pokok, kemudian bahan-bahan tambahan atau pelengkapannya. Dari sana akan terlihat apakah masih cukup atau tidak. Jika belum cukup, saat itu masih ada waktu untuk meningkatkan produksinya.

Terkait adanya praktek kartelisasi dan penimbunan yang terjadi di setiap menjelang puasa, lebaran, tahun baru, natal dan beberapa hari besar lainnya Edhy mengatakan bahwa ada Undang-undang persaingan usaha. Perusahaan penimbun dan kartel bisa dikenakan pasal dalam Undang-undang tersebut yang salah satu sanksi berupa pemberhentian dan penutupan usaha. Edhy percaya KPPU (Komisi pengawas persaingan usaha) tidak akan terbang pilih dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selama kepentingan masyarakat terganggu maka mereka akan turun tangan terus. Dan kalau ada pejabat-pejabat berwenang yang terlibat, maka Ombudsman lah yang akan turun tangan. Disinilah diperlukan keterlibatan semua pihak, tidak hanya KPPU, namun juga kepolisian, kejaksaan, DPR, bahkan KPK pun harus ikut mengawal kasus tersebut.

Ditambahkannya, sebenarnya pihaknya tidak anti pedagang besar. Silahkan saja para pedagang itu berdagang, namun dengan untung sewajarnya. Karena para petani yang benar-benar menanam dari nol itu saja mengambil untung tidak banyak (normal). Dan jikapun harga pangan di pasar naik, petani juga tidak pernah menikmatinya, karena harga yang didapatnya tetap merupakan harga normal. Disini konsumenlah yang malah dirugikan.

“Kami tidak ingin mematikan pengusaha, namun kami tidak setuju



Gedung Bulog

foto: kresno/iw

dengan kelompok spekulasi yang tiba-tiba mengambil keuntungan terbesar sendirian dengan harga semena-mena. Pada akhirnya harga pasar ditentukan oleh kelompoknya, jika demikian pasar tidak akan sempurna. Memang sih tidak ada pasar yang sempurna kecuali mungkin pasar ditingkat RT atau RW saja, karena di pasar kelurahan pun sudah ada campur tangan pihak-pihak lain,” katanya.

Negara juga telah mengatur tentang perekonomian lewat Pasal 33 UUD 1945, ayat 1 misalnya jelas mencantumkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara di ayat 4 kembali ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sayangnya, sejak UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan disahkan

hingga saat ini pemerintah belum membentuk badan pangan. Padahal dalam UU tersebut terutama pasal 126 jelas disebutkan bahwa “dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Di pasal berikutnya disebutkan lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan.

Badan Pangan ini memiliki otoritas kuat untuk mengordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/ sektoral dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan. Dengan kata lain badan pangan merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk mengecek dan mengontrol berapa kebutuhan pangan kita. Melihat sangat pentingnya badan pangan itulah yang membuat badan ini belum juga terbentuk. Ada tarik ulur beberapa kepentingan.

“Saya pikir hal ini karena adanya tarik ulur kepentingan. Namun jika pemerintah tetap pada komitmennya menjaga pangan dalam negeri dan berusaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tentu hal itu tidak akan sulit dan tidak perlu ada Tarik ulur dalam membentuk Badan Pangan yang sebenarnya cukup *urgent* keberadaannya,” jelas Edhy.

Meski demikian, Edhy juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, diantaranya lewat program Toko Tani. Program ini, sebagai upaya untuk mendekatkan pasar kepada produsennya, mendekatkan konsumen ke pasar dengan memangkas mata rantai suplai dari Sembilan titik menjadi empat titik. Panjangnya mata rantai suplai yang melibatkan pedagang besar hingga makelar dan distributor itu lah yang selama ini juga membuat harga bahan pangan di pasaran tinggi.

Toko Tani ini menjual tiga komoditi yakni beras, cabai dan bawang merah langsung ke masyarakat. Tujuannya selain untuk memberikan harga murah kepada masyarakat, juga untuk menunjukkan bahwa *stock* dan suplai bahan pangan yang dimiliki cukup. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang ketersediaan bahan pangan tersebut.

Selain toko tani, program pemerintah yang cukup mendapat apresiasi adalah dengan pencanangan pasar murah -pasar murah oleh seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat. Pasar murah ini langsung melibatkan Bulog, dengan penjualan beras-beras murah.

“Saya pikir itu langkah antisipasi yang cukup baik dari pemerintah, terutama menjelang ramadhan dan menjelang lebaran seperti saat ini,”pungkasnya.

Pada akhirnya, menurut Edhy tantangan dari terbentuknya kedaulatan pangan yang paling penting adalah mengatasi ketidakompakan antara semua pengambil keputusan di negara ini. Jika semua elemen pengambil keputusan memiliki visi yang sama, satu wacana, satu arah dan satu pandangan, maka tidak akan ada masalah, dan kedaulatan pangan akan segera terwujud. ■

(Ayu)



Badan Pangan Nasional, Solusi Atasi Karut Marut Pengelolaan Pangan

foto: iwan armanias

DPR RI mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan sesuai dengan amanah UU tentang Pangan. Hal ini terkait dengan masih karut marutnya pengelolaan manajemen pangan di Indonesia baik di level distribusi dan kontrol terhadap harga pasar.

“Kelembagaan pangan sudah seharusnya segera dibentuk sesuai dengan mandat UU Pangan. Hal ini sangat penting karena sampai saat ini ketiga lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog sendiri belum berkoordinasi dengan baik dalam mengambil keputusan impor pangan, meski UU Pangan secara tegas memperketat kebijakan impor pangan,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada Parlemen.

Menurutnya, keberadaan Badan Pangan sangat dibutuhkan tidak saja sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, tetapi lebih dari itu Badan Pangan dituntut harus mampu memiliki akurasi data dan menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stok, distribusi dan stabilitas harga.

“Pemerintah belum mempunyai tata kelola kelembagaan pangan yang mampu menjadi lembaga yang memiliki akses penuh terhadap stok, distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan. Pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan solusi tepat untuk mengatasi persoalan itu. Selain itu pemerintah juga harus memiliki data akurat yang dapat menjadi dasar penunjang dalam pengambilan sikap dan keputusan terkait masalah pangan nasional,” jelas politisi F-PKB dapil Kalimantan Barat tersebut.

Daniel juga mengatakan bahwa Kedaulatan pangan nasional juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dan infrastruktur pertanian yang rusak. Perkembangan kuantitas penduduk Indonesia membawa dampak pada perubahan kebutuhan dan produksi pangan nasional. Kebutuhan pangan akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

“Kebutuhan lahan untuk aktivitas non-pertanian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Akibatnya, terjadi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kondisi ini tentu bisa mengancam kemampuan produksi pangan nasional,

tetapi masalahnya bukan terletak pada ketiadaan perangkat hukum yang melindungi lahan sawah, melainkan lebih pada komitmen, keseriusan, dan kemampuan aparat negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada,” tandasnya.

Solusi lain yang sering muncul adalah pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa, tetapi perlu dipahami bahwa pengusahaan lahan pertanian yang optimal membutuhkan dukungan infrastruktur khusus sehingga tidak mudah dalam jangka pendek mengganti lahan-lahan pertanian yang telah terkonversi dengan lahan lainnya. Distribusi penduduk antar pulau yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.

“Permasalahan logistik muncul saat konsentrasi penduduk dan sentra pangan tidak sama, tingginya biaya logistik menyebabkan harga pangan menjadi mahal dan memperburuk kedaulatan pangan nasional serta ketimpangan kesejahteraan antar daerah,” tuturnya.

Memang dalam suatu proses transformasi ekonomi, konversi sawah produktif menjadi kegunaan lain lumrah terjadi dan tidak dapat

dihindarkan, terutama apabila perangkat kelembagaan yang ada tidak mampu mencegah atau mengendalikannya secara baik. Sistem insentif dan kebijakan pertanahan di Indonesia nampaknya tidak terlalu mendukung untuk terciptanya pengawasan yang berlapis yang mampu mengendalikan laju konversi sawah produktif tersebut.

Perumusan dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seolah-olah tidak mendukung upaya pengendalian alih fungsi sawah produktif menjadi kegunaan lain. Kejadian ini masih belum dapat menjadi jawaban ampuh untuk mengendalikan laju konversi lahan.

Meski secara legal formal, Indonesia telah memiliki perangkat hukum berupa UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang seharusnya mampu menanggulangi persoalan

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Laju Konversi Ditekan

Aturan lebih teknis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga telah diundangkan. Setelah sekian Peraturan Pemerintah dikeluarkan, tetapi laju konversi lahan sawah subur masih juga berlangsung.

“Maka diperlukan adanya Pendekatan lain berupa insentif dari Pemerintah Pusat dan provinsi seperti pengembangan infrastruktur pertanian serta pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul. Dalam hal ini, Pemda perlu menambah insentif dengan

wajib lebih sigap dalam melaksanakan kebijakan teknis tersebut.

Dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian serta kedaulatan pangan diperlukan perangkat kebijakan yang mengarah pada perbaikan implementasi sistem agribisnis dan impor bahan pangan. Laju pertumbuhan produksi nasional juga harus dipacu terutama pada komoditas bahan pangan yaitu padi atau beras, jagung dan kedelai. Swasembada pangan sebagai salah satu pilar untuk mencapai kedaulatan pangan. Namun ketersediaan bahan pangan belum mampu mencukupi kebutuhan. Kedaulatan pangan dikatakan kuat jika suatu negara telah mampu memproduksi bahan pangan sendiri dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya atau disebut swasembada pangan serta mempunyai persediaan bahan pangan minimal sebesar 20 % kebutuhan pangan masyarakatnya.

“Pemasaran hasil-hasil pertanian memerlukan taktik dan strategi khusus agar menarik bagi konsumen. Dibutuhkan manajemen pemasaran yang canggih agar hasil-hasil pertanian sampai ke konsumen secepat mungkin dengan harga yang kompetitif,” terangnya.

Berbeda dengan produk impor yang sudah dikemas dengan baik dan rapi. Kualitas impor juga lebih baik dan lebih menarik. Selain itu, pengiriman barang impor cenderung lebih murah dibanding pengiriman barang lokal. Jauhnya jarak dan sarana transportasi yang buruk masih belum mampu mendukung dunia industri pertanian. Biaya transportasi yang tinggi mengakibatkan harga barang otomatis juga tinggi untuk menutup biaya produksi. Oleh karena itu, transportasi perlu penataan serius oleh pihak pemerintah.

“Jadi pada hakekatnya, Gerakan Kedaulatan Pangan merupakan gerakan sosial yang mampu menyatukan seluruh elemen, seperti petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, kaum miskin, dan lain sebagainya, namun dengan melibatkan juga peran penting pemerintah dalam gerakan kedaulatan pangan tersebut,” pungkask Daniel. ■

(dep. mp)



Permasalahan logistik muncul saat konsentrasi penduduk dan sentra pangan tidak sama, tingginya biaya logistik menyebabkan harga pangan menjadi mahal dan memperburuk kedaulatan pangan nasional serta ketimpangan kesejahteraan antar daerah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan

foto: iwan armanias

kepastian hukum di bidang alih fungsi lahan sawah.

Karena laju konversi lahan sawah dan alih fungsi dan kepemilikan lahan pertanian terus terjadi, banyak yang berpendapat bahwa UU No. 41/2009 tersebut mandul akibat belum adanya peraturan pelaksanaan UU itu. Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, dan PP No. 25/2012 tentang Sistem

keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan kepastian hukum berupa perlindungan lahan pertanian, terutama lahan pangan subur dan beririgasi teknis, jelas tidak memadai jika hanya dilakukan melalui pendekatan formal belaka,” kata Daniel.

Ia juga mengatakan bahwa, pelaksanaan kebijakan teknis pertanian, penyaluran benih unggul, bimbingan penyuluhan dan pendampingan petani, penjaminan harga jual, dan lain-lain akan memiliki manfaat yang lebih. Aparat negara di pusat dan daerah

Gangguan Ketahanan Pangan Bisa Picu Kerawanan Sosial

Anggota Komisi IV DPR RI (Bidang Pertanian dan Pangan) Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menjelaskan pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

“UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*),” ungkap dia.

Sedangkan, Kedaulatan Pangan

adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Selanjutnya, Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

S e m e n t a r a

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas



Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono

foto: kresno/iw

ekonomi dan stabilitas nasional.

“Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional,” kata Ono.

Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah.

“ Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi

jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Rantai Pasokan Panjang

Lebih jauh politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli,

pek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang,” katanya.

Menurut Ono Surono, hal yang prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan yaitu terkait dengan produksi untuk bisa lebih meningkat, pasca produksi agar penyerapan gabah petani yang memproduksi beras mempunyai kepastian usaha dibidang pertanian layak bagi kehidupannya.

Distribusipun, sekarang ini cenderung diserahkan kepada pasar, karena peran Bulog belum maksimal, sehingga peran pasar sangat dominan dalam menentukan harga.

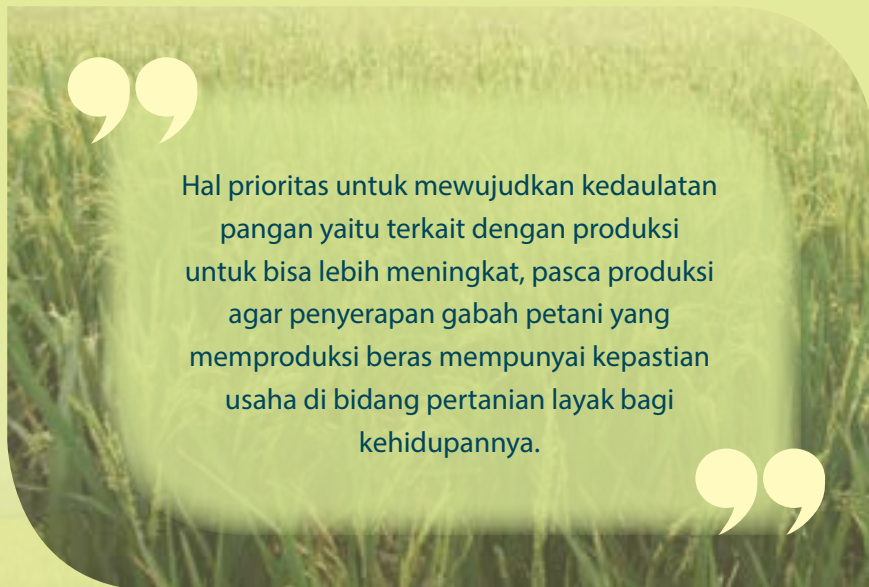
“Harus ada lembaga, dalam hal ini Bulog yang memang berperan sebagai sebuah badan sesuai dengan UU yang membuat regulasi di bawah langsung presiden, yang bisa memformulasikan regulasi sekaligus sebagai operator pelaksanaan kebijakan-kebijakan badan itu sendiri,” jelasnya.

Itulah yang paling penting kalau kita ingin menuju tujuan akhir yaitu kedaulatan pangan, jadi Negara harus mempunyai sistem dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi.

Pembentukan Badan Pangan, yang telah dicanangkan sejak tahun 2012 lalu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.18/2012 tentang Ketahanan Pangan, masih menemui kendala, Padahal, UU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya 3 tahun setelah diundangkan pada 17 November 2012 lalu.

Meski demikian, hal itu tergantung kepada siapa yang menjalankan, “Kalau pemerintah benar-benar komitmen dalam rangka menjaga pangan dalam negeri, guna menjaga kedaulatan pangan nasional, sebenarnya tidak akan menjadi masalah yang sulit. Maka tidak perlu ada tarik ulur dalam menentukan Badan Pangan itu,” pungkasnya. ■

(as)



Hal prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan yaitu terkait dengan produksi untuk bisa lebih meningkat, pasca produksi agar penyerapan gabah petani yang memproduksi beras mempunyai kepastian usaha di bidang pertanian layak bagi kehidupannya.

petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan,” papar Ono Surono.

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak

kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

“Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara as-

Mendandani Jalur Distribusi Pangan

Distribusi pangan yang efektif, efisien dan merata dinilai masih belum terselenggara di Indonesia. Ada daerah yang surplus bahan pokok pangan, namun di sisi lain masih ada daerah yang defisit. Problem ini menjadi bukti tidak meratanya pemenuhan kebutuhan pangan karena ada ketersediaan pada jalur distribusi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, menilai pemerintah belum memiliki langkah strategis untuk mengatasi masalah distribusi pangan. Padahal dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 3 poin D mengatakan, bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

"Ini kan masalah distribusi yang tidak tertangani oleh pemerintah. Undang-Undang Perdagangan sudah mengatakan, kemudian Kementerian Perdagangan yang mengatur mengintervensi kalau ada kenaikan harga di satu wilayah. Bagaimana dia mengintervensinya. Itu yang harus dibuat mekanismenya," jelas Azam, saat diwawancarai di Gedung Nusantara I.

Jika pemerintah tidak segera membetulkan mekanisme distribusi yang efektif dan efisien, maka swasembada pangan hanya akan menjadi wacana semata. Swasembada pangan terancam tidak tercapai jika masalah distribusi tak segera dikendalikan.

Ungkapan tersebut cukup beralasan, pasalnya Indonesia akan selalu merasa defisit bahan pangan terus menerus, meskipun data mengatakan ada peningkatan suplai bahan pangan. Rantai distribusi pangan yang tidak baik akan berakibat impor, padahal produksi komoditas mencukupi. Kalau distribusi tidak merata maka akan ada yang selalu merasa defisit.

Terungkap informasi rantai perdagangan beras saja bisa mencapai tujuh hingga delapan kali dari petani



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,
Azam Azman Natawijana

foto: iwan armanias

ke pembeli. Ini membuktikan bahwa distribusi pangan masih boros. pemerintah perlu mempersingkat rantai perdagangan pangan agar tak membuat krisis ketahanan pangan, mengingat impor bahan pangan antara 2004 hingga 2014 mencapai 346 persen.

Senada dengan Wakil Ketua Komisi VI, Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima juga mengatakan jalur distribusi pangan harus dibesarkan. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah dan BUMN untuk mengamankan jalur distribusi pangan. Dalam mewujudkan misi Nawa Cita pemerintah, kehadirannya dalam kondisi ketidaksediaan pangan, harga kebutuhan pokok yang melambung tak terkendali, merupakan tindakan yang tak bisa dielakkan. Menurutnya permasalahan tersebut tidak bisa dilepas begitu saja, dan dibiarkan pada mekanisme pasar.

Maka infrastruktur hulu, sistem distribusi ini penting didandani. Terutama sistem perdagangan, sistem transportasi antar pulau antar provinsi, itu yang tidak beres, sehingga terjadi akumulasi harga yang berlebih. Perdagangan antar provinsi,

konektifitas antar kepala daerah itu penting, karena yang terjadi sekarang mata rantai masih belum terintegrasi. Sporadis gak karukaruan. Datanya gak jelas," tandas Aria.

Dia menjelaskan wilayah NKRI dengan bentang yang luas, antara satu daerah dengan daerah lain harus ada koordinasi yang sistematis. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk membereskan transportasi kebutuhan bahan pokok. "Kerjasama dengan PT Pos untuk pos angkut logistik, kerjasama dengan ASDP untuk distribusi pangan. Gak sulit," ujar Aria menyarankan.

Selain jalur distribusi yang belum tertata dengan rapi, Aria juga mengkritisi soal koordinasi antara para pemangku kepentingan, antara lembaga pemerintah yang terkait dan juga para pimpinan BUMN. Dia menilai dalam tubuh birokrasi pemerintahan masih ada ego sektoral. Dia menyarankan agar para pemangku kepentingan duduk bersama meninggalkan ego sektoral dan berpikir mencari solusi yang tepat.

"Itu pentingnya Menteri Pertanian, itu pentingnya koordinasi dengan Menteri Perdagangan. Jadi yang namanya *steakholder* pangan ini, harus meninggalkan ego sektoralnya. Duduk mengatasi tidak hanya persoalan produksinya tapi juga mata rantai distribusinya dan ini adalah persoalan sejak dulu yang tidak pernah selesai karena *private* mengambil alih posisi distribusi," papar Aria.

Aria juga mengatakan, para menteri dan jajarannya belum bisa menerjemahkan kemauan presiden. Menurutnya, seharusnya menteri punya kemampuan untuk mengarahkan birokrasi, bahkan kalau perlu memberikan tekanan. "Kementeriannya mau, tapi persoalan eselon 1 dan 2 ini, belum terbiasa melakukan koneksi koordinasi. Jadi belum mengerti mimpinya presiden mau apa. Belum bisa menafsirkan keinginan presiden seperti apa," ungkapnya. ■

(eko)

Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Mindset

Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemberi Rizki, sebagai negara agraris. “*Gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo*” suatu kalimat yang merupakan ungkapan untuk menggambarkan keadaan bumi pertiwi Indonesia. *Gemah ripah loh jinawi* berarti kekayaan alam yang berlimpah, sedangkan *toto titi tentrem karto raharjo* adalah keadaan penduduk negeri yang tenteram.

“Orang bilang tanah kita tanah surga,” seperti yang tersirat dalam lagu Koes Ploes yang berjudul Kolam Susu. “Kail dan jala cukup menghidupimu, ikan dan udang datang menghampiri dirimu.” Dua petikan bijak bestari di atas bukanlah suatu yang utopis bagi Indonesia.

Cita-cita menuju kedaulatan pangan bukanlah khayalan. Kekayaan alam Indonesia seharusnya bisa mencukupi segala macam kebutuhan pokok penduduk negeri. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Nusantara dengan sumber daya alam hayati, flora, fauna dan potensi hidrografis. Perkebunan, persawahan, sungai, laut dan pelabuhan semua ada dalam negara dengan bentang luas alam 2.027.087 km² ini.

“Kedaulatan pangan harus menjadi *mindset*. Kedaulatan pangan harus menjadi cara berpikir,” tegas Anggota Komisi VI Aria Bima. Dia menjelaskan setiap komoditas dalam pangan ada komponen-komponennya. Masing-masing sektor dan komponen dalam pangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri.

“Beras kita lebih optimis, kedelai kita *megap-megap*, bawang kita optimis, kemudia daging kita optimis, ada ayam, sapi. Kalau terigu ya tidak ada, terigu kita tidak produksi. Tetapi total keseluruhannya itu berapa persen kalau diambil komulatifnya. Kita bisa



foto: iwan armanias

Anggota Komisi VI DPR RI,
Aria Bima

mencukupi sekitar 60 sampai 70. 30 masih impor,” papar dewan dari dapil Jawa Tengah V.

Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Cita-cita bangsa untuk berdaulat dalam bidang pangan sudah tertuang dalam Undang-Undang Pangan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian

pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menurut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, tidak ada pangan yang diimpor Indonesia yang tidak bisa kita tanam di tanah nusantara. Kalau hanya untuk mencukupi ketersediaan pangan nasional alam Indonesia mendukung semua.

“Sebesar 99 persen ada semua di Indonesia kecuali terigu. Mau alasan apa kamu tidak punya konsep kedaulatan. Gak ada yang tidak bisa kita tanam di Indonesia kecuali terigu, lainnya bisa semua. Tinggal kemauan niat kita ada enggak. Jadi soal kita menjadi logistik pangan dunia, itu tidak aneh-aneh. Ya memang di Indonesia itu semua bisa ditanam,” tegas Aria. ■

(eko)

Dr. Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, IPB

“Paham Neo Liberal (Negara Barat) Tidak Rela Indonesia Swasembada Pangan”

Kedaulatan pangan adalah kemampuan negara kita untuk menentukan sendiri *policy* (kebijakan) apa yang akan dilakukan. Walaupun saat ini memang sudah dikembangkan ke arah itu. Namun yang harus dibuktikan disini adalah konteks kedaulatan pangan yang dibangun itu adalah varietas-varietas tanaman pangan yang memang asli lokal

Dengan kata lain masalah utama dalam konsep kedaulatan pangan saat ini adalah bagaimana mendorong dan melindungi petani-petani yang punya kemampuan untuk menghasilkan benih-benih unggul lokal. Sehingga benar-benar merupakan produk kita, kita yang memproduksi dan kita juga yang mengkonsumsi.

Masalah yang kedua menurut Arif adalah persoalan lahan. Disini dapat dibandingkan laju konversi (perubahan fungsi lahan) lebih tinggi dari laju ekstensifikasi (usaha peningkatan hasil produksi dengan menambah faktor produksi). Sehingga jumlah lahan semakin lama semakin berkurang, hal ini langsung bersinggungan dengan produktifitas.

“Bagi saya konteks lahan inilah yang justru penting, mekanisme perlindungan. Pulau Jawa sudah jelas tingkat kesuburannya empat kali lipat daerah diluar pulau Jawa, jadi kalau kita fokusnya diluar Jawa maka yang terjadi *cost nya* menjadi terlalu tinggi. Memang Jawa seolah-olah dianggap tidak realistis untuk pertanian, tapi tanah di pulau Jawa justru yang paling subur. Kenapa tanah-tanah yang paling subur tidak dioptimalkan untuk pertanian, namun malah ditekankan ke luar pulau Jawa,” ujar Arif.

Kalau industrialisasi yang dipindah ke luar Jawa, lanjut Arief maka akan terjadi pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Dan daerah di luar Jawa akan mengalami percepatan pembangunan yang lebih bagus dan Jawa tetap bisa

menjadi penghasil pangan yang besar. Indonesia memang sudah punya Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan, tapi tidak ada kerangka eksekusinya.

Masalah lainnya adalah terkait data. Disini Arif melihat Kementan (Kementerian pertanian) *over estimate*, bukan sekadar optimis. Banyak data-data yang ketika di cek di lapangan ternyata tidak sama. Kenyataan di lapangan selalu cenderung lebih rendah. Petani harus menikmati harga, jangan sampai harga tinggi tetapi petani tidak dapat menikmati.

Ketika data itu transparan dan akurat maka mudah untuk di analisa, jadi antara pemerintah pusat dan daerah harus satu informasi.

Arif menilai, secara infrastruktur Bulog sudah bagus. Walaupun kapasitas gudang Bulog ada masalah karena hanya mampu menampung 4 juta ton, namun Bulog sudah punya pengalaman puluhan tahun. Kalau semua beras di beli Bulog jelas hal itu tidak mungkin, karena kapasitas gudangnya tidak mencukupi. Yang perlu dipikirkan juga adalah soal mutu, supaya Bulog membeli dan disimpan di gudang tidak busuk.

Paham neo liberal (negara barat) memang tidak rela kalau Indonesia menjalani swasembada pangan. Hal itu karena mereka tidak menginginkan Indonesia mandiri. Jelas hal ini berbahaya, tapi kita tidak pernah sadar, karena yang diciptakan oleh mereka adalah ketergantungan supaya kita membeli varietas bahan pangan dari mereka, ini merupakan skenario yang dibuat agar kita tidak mandiri.

Oleh karena itu kita harus berani menolak, sebab persoalan pangan itu bagi kita merupakan masalah hidup atau mati. Pangan itu sudah menjadi senjata, oleh karena itu harus kita kuasai dan

sudah menjadi harga mati bagi kita.

Pada kesempatan ini Arif juga menyarankan jangan terlalu mengandalkan perdagangan internasional, karena perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang tidak *fair* (*free trade is not fair*). Sebab kalau kita mengacu pada perdagangan internasional, kita tidak bisa mengontrol secara mutu.

Pada saat bulan Ramadhan tingkat konsumsi meningkat karena banyaknya seremoni, oleh karena itu diperlukan kemampuan kita (pemerintah-red) untuk mendeteksi stok pangan. Sekarang ini kita hanya mampu mendeteksi stok pangan di Bulog, tetapi kita tidak mampu mendeteksi stok beras dan pangan yang ada di masyarakat dan di Distributor Center (DC).

Pemerintah harus mampu mendeteksi stok, karena sistem informasi itulah yang kemudian bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Terkadang keputusan kita untuk impor atau tidak terkadang karena spekulasi saja, karena kita tidak tahu sebenarnya berapa yang kita punya. Itulah juga diperlukan keberadaan Badan Pangan Nasional yang sudah diamanah

Undang-undang Pangan. Ini sangat penting sekali, karena tidak hanya mengurus masalah produksi tetapi juga masalah konsumsi. ■

(Ayu)



foto: jaka/iw

Prof Ahmad Sulaeman, Guru Besar FEMA IPB

Produk Pangan Impor Sebabkan Anak Kuntet

Bicara tentang kedaulatan pangan sangat tergantung pada kedaulatan mulut bangsa Indonesia. Maksudnya disini, silahkan saja pemerintah menerapkan kebijakan impor berbagai produk pangan, seperti beras, terigu dan sebagainya, namun jika masyarakat Indonesia memiliki kedaulatan terhadap mulutnya, maka akan disadari bahwa itu merupakan produk impor yang akan memperkaya petani luar negeri.

Dalam hal harga produk produk dalam negeri, walaupun sedikit mahal, namun lebih sehat. Sementara produk impor walaupun murah namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Beras maupun sayuran impor selalu disemprot pestisida yang didalamnya bersifat *hypothyroidism* dan *antiandrogenic*. *Hypothyroidism* ini mengurangi penyerapan yodium dan zat-zat lain pada tubuh manusia. Akibatnya anak-anak tumbuh *stunting* (kuntet) dan mengalami gangguan intelegensia dan intelektualitas.

Data riset kesehatan dasar (ris-kesdas) tahun 2007, 2012 dan 2013 menunjukkan tingginya angka *stunting* di kalangan anak Indonesia mencapai 36-37 persen. Patut diduga salah satu faktor penyebabnya adalah cemaran pestisida pada makanan dan minuman kita. Sedangkan sifat *antiandrogenic* pada pestisida seperti DDT dan dieltrin terutama sejak bayi sampai dewasa walaupun dalam jumlah di bawah batas aman dapat menyebabkan hilangnya sifat maskulin pada anak laki-laki (*demasculization*). Tidak heran saat ini banyak LGBT.

Murahnya harga buah dan sayuran impor itu lebih dikarenakan subsidi



foto: jaka/iv

yang besar sekali. Hal ini pernah saya saksikan sendiri di California. Ketika kekeringan, petani tetap dibayar oleh pemerintah. Sementara di Indonesia malah sebaliknya. Subsidi untuk petani terus dikurangi.

Tidak hanya itu, produk buah impor lebih murah karena bisa awet.

Di Rotterdam saya lihat produk mereka paling cepat disimpan selama 6 bulan hingga dua tahun. Karena buah-buahan untuk ekspor disana disimpan pada suhu yang dingin, yakni antara 2-6 derajat celcius, kelembabannya juga diatur, bahkan buah tersebut juga dilapisi oleh lilin untuk mencegah penguapan dan mencegah jamur. Hal itupun berlangsung di California. Dengan sistem pengawetan tersebut maka tidak heran kalau produsen bisa menjual dengan harga yang murah, karena buah-buahan itu sudah termasuk stok yang lama.

Kembali menumbuhkan jiwa nasionalisme lewat penggunaan

produk-produk dalam negeri, termasuk bahan pangan sejatinya telah dilakukan oleh negara-negara lain, Korea misalnya. Pemerintah Korea sangat melindungi makanan tradisional bangsa sendiri, sehingga di negara itu jarang sekali ditemukan makanan cepat saji ala Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Begitupun dengan di Inggris, bagaimana Pangeran Charles bersemangat mengampanyekan *back to British product*.

Jika pemerintah serius lima tahun bisa mewujudkan kedaulatan pangan yang didalamnya juga mengandung unsur keamanan pangan. Sambil meningkatkan produksi dalam negeri, kebijakan pembatasan impor, dan *blue print* target dari swasembada, pemerintah juga harus mengampanyekan nasionalisme lewat kedaulatan mulut tadi, dengan pilihan produk-produk lokal (produk dalam negeri). ■

(Ayu)

Ketahanan Pangan: Persoalan Supply dan Harga

Oleh:

Juli Panglima Saragih & Mandala Harefa

Peneliti Ekonomi Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat/ setiap hari. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUD Tahun 1945 maupun Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No.7/1996 tentang Pangan sebagaimana telah diganti dengan UU No.18/2012. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu HAM, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dapat menciptakan bencana kelaparan, kerawanan pangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan ketidakstabilan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena merupakan makanan pokok. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada *supply* dan kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik Nasional. Nilai strategis beras juga dapat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan (tata niaga) perberasan, serta penataan industri pangan yang memiliki pengaruh yang besar dalam ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja, dinamika ekonomi-pertanian



Juli Panglima Saragih



Mandala Harefa

perdesaan, masalah lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) serta kondisi sosial-politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah harus selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri, terutama beras. Operasional ketahanan pangan tidak bertentangan dengan kebijakan impor, ketika kebutuhan pangan seperti beras lebih besar dari *supply* di pasar domestik.

Dalam UU No.18/2012 tentang Pangan, definisi Ketahanan Pangan adalah “*kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik*

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

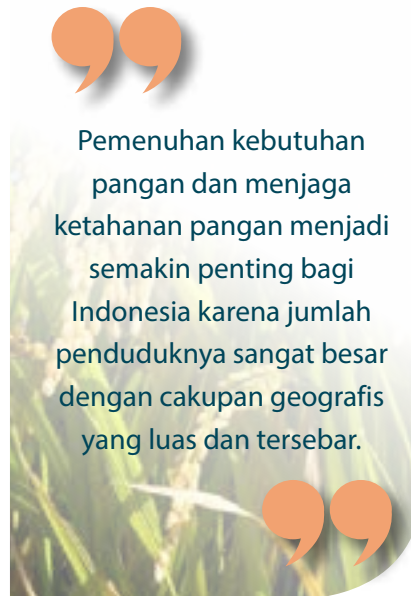
Sedangkan “**Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya

lokal”. Kedaulatan dan kemandirian pangan adalah bagian dari ketahanan pangan. “**Kemandirian Pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. “**Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

UU No.18/2012 sejalan dengan definisi ketahanan pangan FAO yang menyatakan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, fisik, maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Untuk itulah, tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, terdapat 3 (tiga) pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi ketahanan pangan di atas, yakni: 1) ketersediaan (*availability*), 2) keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan 3) stabilitas (*stability*) harga yang terjangkau setiap saat dan di setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi,

maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing. Dari ketiga pilar tersebut, persoalan *supply* dan harga sangat-sangat penting untuk diperhatikan, disikapi dan dikelola. Kelompok masyarakat yang hampir miskin bisa cepat miskin bila harga pangan melonjak tajam, apalagi masyarakat miskin.



Permasalahan Pangan

Ketahanan pangan di Indonesia tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik produsen maupun konsumen, khususnya produsen (petani) kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Di sini campur tangan

pemerintah sangat penting.

Permasalahan lainnya di dalam distribusi yakni fluktuasi, ketidakstabilan *supply*, dan ketidakmerataan stok pangan yang tersedia di sebagian besar di daerah produksi sehingga harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri. Kasus pengiriman sapi dari NTB & NTT ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta.

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum adalah panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor. Persoalan tataniaga ini harus dipecahkan secara komprehensif karena mempengaruhi harga pangan, seperti harga beras. Oleh karena itu persoalan ketahanan pangan juga persoalan distribusi dan harga.

Dengan pertimbangan permasalahan di atas maka kebijakan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi (*supply*) dan permintaan (*demand*), karena akan berdampak pada harga. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya termasuk kebijakan tata niaga harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.

Gambaran/Peta Pangan

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252,2 juta jiwa pada tahun 2014 dan diprediksi meningkat menjadi 258,7 juta jiwa tahun 2016 merupakan tantangan dalam peningkatan

SUMBANG SARAN

ketahanan pangan ke depan. Produksi pangan pokok mengalami fluktuasi pada 2014 yaitu produksi padi turun sekitar 0,63 persen dari 71,28 juta ton pada tahun 2013 menjadi sekitar 70,83 juta ton. Sementara itu produksi jagung mengalami kenaikan sekitar 2,81 persen yaitu dari sekitar 18,51 juta ton menjadi 19,03 juta ton. Produksi kedelai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 780 ribu ton pada tahun 2013 menjadi sekitar 954 ribu ton atau naik sekitar 22,30 persen. Produksi daging sapi dan kerbau mengalami penurunan dari 436,7 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 434,1 ribu ton atau turun sekitar 0,6 persen. Produksi gula mencapai sekitar 2,6 juta ton atau naik sekitar

beras dan daging sapi masih saja tinggi.

Pemerintah tidak mampu mengatasi “psikologi pasar” beberapa komoditas pangan dengan gejolak harga. Sedangkan dari sisi inflasi, bahan makanan rata-rata menyumbang sebesar 24,6 persen terhadap inflasi umum yang mencapai 8,36 persen tahun 2014. Secara umum, tahun 2014, kinerja ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan hasil yang relatif cukup baik tetapi masih mudah terjadi gejolak harga beberapa komoditas. Realisasi PDB sektor pertanian di tahun 2014 mampu melebihi target sebesar 3,5 - 3,8 persen. Pada tahun 2015, PDB sektor pertanian ditargetkan tumbuh sebesar 4,2 persen (tahun dasar 2010).

persen, dari 780 ribu ton pada 2013 menjadi 953,96 ribu ton tahun 2014. Namun demikian, produksi kedelai sebesar 953,96 ribu ton tersebut masih belum mencukupi kebutuhan nasional tahun 2014 yang mencapai 2.04 juta ton, atau terjadi defisit sebesar 1,08 juta ton. Pada tahun 2016 produksi kedelai di targetkan menjadi 1,3-1,5 juta ton. Komoditas pangan utama lain yang mengalami kenaikan adalah gula pasir. Produksi gula pasir pada tahun 2014 tercatat 2,63 juta ton, naik 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 2,54 juta ton. Produksi gula tersebut belum mencukupi kebutuhan gula nasional sebesar 5,67 juta ton. Pada tahun 2016, produksi gula ditargetkan mencapai 3-3,5 juta ton.

Pencapaian Kedaulatan Pangan

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	REALISASI			
		(2010)	2011	2012	2013	2014*
Pertumbuhan Pertanian	PDB Pertanian (persen)	3,01	3,37	4,20	3,44	3,29
Produksi Pangan Utama	Padi (juta ton)	64,40	65,76	69,06	71,28	70,83
	Jagung (juta ton)	17,63	17,64	19,39	18,51	19,03
	Kedelai (rb ton)	907,03	851,29	843,15	780,00	953,96
	Gula (juta ton)	2,29	2,23	2,59	2,54	2,63
	Daging Sapi dan kerbau (rb ton)	291,23	377,9	416,5	436,7	434,1
	Ikan (di luar rumput laut; juta ton)	7,75	8,47	8,99	10,12	10,52
Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Konsumsi Kalori (Kkal/hari)	1.968	2.005	1.912	1.937	1.967
	Skor Pola Pangan Harapan	82,3	84,6	83,9	88,9	81,8
	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	30,48	32,25	33,89	35,21	37,89
Jaringan irigasi, air tanah, rawa, dan tambak yang telah dibangun/ ditingkatkan dan direhabilitasi (ha)		510.446	573.525	973.898	500.773	543.580

Sumber: RKP Tahun 2016

2,36 persen dibanding tahun 2013. Produksi mengalami kenaikan sekitar 3,95 persen dari 9,88 juta ton menjadi 10,12 juta ton. Dilihat dari capaian kinerja makro, PDB sektor pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan PDB tahun 2013 yang mencapai 3,54 persen. Namun kendati terjadi peningkatan produksi beras, dan daging sapi, tetapi harga

Produksi pangan utama lainnya yaitu jagung, kedelai, dan gula tahun 2014 mengalami kenaikan. Produksi jagung naik sebesar 2,81 persen, sedangkan kebutuhan jagung nasional tahun 2014 hanya sebesar 15,97 juta ton sehingga produksi masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2016, produksi jagung ditargetkan menjadi sebesar 20-21 juta ton. Produksi kedelai naik sebesar 22,3

Tantangan Tahun 2016

Pembangunan ketahanan pangan telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik selama tahun 2014. Namun demikian, tantangan kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan semakin berat. Tantangan ke depan yang dihadapi terutama: (i) sulitnya merealisasikan perluasan lahan sawah dan lahan kering sebagaimana digariskan dalam nawacita; (ii) sulitnya

menjamin stabilitas harga pangan terutama pada masa paceklik dan hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan dsitribusi, dan kekuatan stok beras pemerintah.; (iii) dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai terutama input pertanian berupa benih dan pupuk belum mencapai sasaran yang tepat sementara untuk dukungan infrastruktur terutama irigasi perlu jaminan bahwa rehabilitasi dan pembangunan irigasi yang dilakukan tepat sasaran dan mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; (iv) peningkatan peranan penyuluhan dan diklat pertanian/perikanan serta mendorong generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian/perikanan; (v) belum terbentuknya Bank Pertanian atau Unit Pelayanan Khusus Sektor Keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan perikanan; (vi) kerawanan pangan pada masa-masa tertentu dan masih banyaknya masyarakat yang menderita kekurangan gizi/nutrisi terutama pada anak-anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat *stunting* (pendek); (vii) belum berkembangnya instrument mitigasi bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam antara lain dalam bentuk asuransi pertanian dari gangguan produksi pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam dan gangguan iklim ekstrim; dan (viii) diperlukan perbaikan system pendataan produksi dan produktivitas pertanian terutama komoditas padi/beras serta identifikasi petani berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*).

Secara khusus, tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan diantaranya adalah: (i) belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu; (ii) belum berkembangnya kelembagaan kelompok nelayan penerima kapal perikanan berukuran besar (di atas 30 Gross Ton); (iii) isu lingkungan terkait pengembangan perikanan budidaya; (iv) masih tergantungnya pembudidaya terhadap pakan impor; (v) masih terbatasnya akses nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam terhadap input produksi dan modal usaha; dan (vi)

belum menyeluruhnya pendataan terhadap produksi dan pelaku usaha perikanan.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dan Agenda prioritas pada Nawacita yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian adalah Agenda Ke-7, yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan. Peningkatan koordinasi kebijakan pertanian juga menjadi salah satu kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Perekonomian sebagaimana tertuang pada Renstra Kemenko. Adapun Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2019 yang tertuang pada RPJMN, sebagai berikut:

- (a) Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan pangan dan pertanian; seperti:
 - 1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas pangan;
 - 3) Penyediaan lahan pangan dan pertanian;
 - 4) Peningkatan Indeks Pertanaman;
 - 5) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
 - 6) Penguatan cadangan pangan
 - 7) Pengurangan kemiskinan petani;
 - 8) Penguatan pembiayaan dan kelembagaan;
 - 9) Revitalisasi penyuluh.
- (b) Mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi

Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2019

Indikator	2014 (Baseline)	2019	Keterangan
1. Produksi			
o Padi (Juta Ton)	70,6	82,0	Untuk 3 (tiga) tahun pertama, fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; gula, dan daging sapi fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
o Jagung (Juta Ton)	19,1	24,1	
o Kedelai (Juta Ton)	0,9	2,6	
o Gula (Juta Ton)	2,6	3,8	
o Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1	
o Ikan (di luar rumput laut) (Juta Ton)	12,4	18,8	
o Garam (Juta Ton)	2,5	4,5	
2. Konsumsi			
o Konsumsi kalori (Kkal)	1.967	2.150	
o Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	38,0	54,5	
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPI)	81,8	92,5	

Sumber: RPJMN 2015-2019.

Sedangkan Program Lintas Kerja koordinasi Pangan dan Pertanian, yaitu:

- a) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan;
- b) Pengembangan komoditi berorientasi ekspor;
- c) Koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian;
- d) Penanggulangan kemiskinan petani.

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang pangan dan pertanian, adalah sebagai berikut:

dan sinkronisasi, antara lain:

- 1) Stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) Distribusi dan logistik pangan;
- 3) Kualitas dan keamanan pangan;
- 4) Ekspor dan impor pangan;
- 5) Pangan lokal non-beras;
- 6) Mitigasi dan adaptasi gangguan terhadap produksi pangan dan pertanian;
- 7) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- 8) Ketersediaan benih, pupuk, dan alsintan yang cukup. ■

BPIH Turun, Kualitas Pelayanan Ditingkatkan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga jumlah jemaah haji dalam setiap tahun selalu meningkat. Untuk menghadapi itu dibutuhkan kerja serius dari pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik bagi para jemaah.



foto: kresno/iw

Penandatanganan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI

Hal itu pula yang disadari Komisi VIII DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji yang terjangkau. Hal ini pula yang dituturkan oleh Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay pada Sabtu, (30/04).

“Salah satu fokus Komisi VIII adalah untuk sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelayanan haji. Komitmen itu yang menyebabkan kami bersungguh-sungguh untuk selalu memperbaiki laporan keuangan haji hingga manajemen pelayanan haji,” ujar Saleh.

Selain itu Komisi VIII juga telah menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016 sebesar Rp34.641.304. Biaya tersebut cenderung lebih murah ketimbang tahun lalu jika berdasarkan mata uang dollar. “Komisi VIII DPR RI

telah sepakat dan setuju mengenai besaran ongkos haji tahun 2016 dengan rata-rata sebesar Rp34.641.304 setara dengan 2.585 dolar Amerika Serikat dengan kurs satu dolar AS sama dengan Rp13.400,” ujarnya Saleh.

Jika dibanding biaya haji tahun 2015 yang sebesar US\$2.717, maka pada tahun 2016 ini menjadi US\$2.585. Terlihat bahwa ada penurunan sekitar 100 dolar. Oleh karena itu calon jemaah haji dari Indonesia nampaknya semakin bisa bernafas lega.

“Tahun 2014 ke 2015 sudah berhasil diturunkan 502 dolar dan sekarang 132 dolar sehingga dalam dua tahun ini sudah diturunkan 684 dolar Amerika Serikat,” terang Saleh.

Keberhasilan penurunan BPIH ini didasari oleh Komisi VIII yang kembali melakukan penyisiran ulang terhadap berbagai komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dari

hasil penyisiran tersebut ditemukan beberapa sektor yang dinilai masih bisa untuk dipangkas.

Akan tetapi, DPR RI kembali memastikan kepada calon jemaah haji bahwa penurunan ongkos haji tersebut tidak serta merta akan menurunkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Hal itu pula yang diyakinkan oleh Saleh dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 ini.

“Peluang penurunan tahun ini rasional, tahun ini harga minyak di bawah 40 dolar AS per barel, penerbangan 70 persen untuk avtur, jadi kita minta penurunan karena hal itu, penurunan tidak membuat kualitas turun,” tutur Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Selain itu, Komisi VIII juga menginginkan agar mata uang Dolar tidak digunakan sebagai mata uang transaksi dalam pelaksanaan haji. Akan tetapi Komisi VIII mengusulkan agar



foto: kresno/iw

Ketua Komisi VIII DPR RI berbicara saat rapat dengan Kementerian Agama

semua transaksi pelaksanaan ibadah haji hanya menggunakan mata uang Rupiah dan Real.

“Hal ini agar ongkos haji lebih efisien. Semua transaksi yang dilakukan di Indonesia menggunakan Rupiah,” ujar Saleh.

Ia melanjutkan, mata uang Real akan sepenuhnya digunakan selama bertransaksi di Arab Saudi. Karena, kata Saleh, transaksi di sana hanya dapat menggunakan Real, bukan Dolar ataupun Rupiah.

Sebagaimana diketahui, pada tahun lalu transaksi ibadah haji masih menggunakan Dolar ketika penetapan biaya haji dengan nilai tukar per Dolar Rp12.500. Lalu, ketika para jemaah mau melunasi pembayaran, saat itu nilai kurs Dolar naik menjadi Rp13.500.

Sehingga Saleh menginginkan agar penetapan biaya haji lebih mengutamakan keuntungan bagi jemaah haji, bukan justru memperumit. “Penetapan ini sangat menguntungkan jemaah haji. Dengan tidak mengacu pada kurs Dolar maka biaya yang harus disiapkan jemaah tidak akan berubah-ubah. Maka ini memberikan insentif yang cukup,” kata dia.

Dalam perkembangannya kini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres Nomor 21 tahun 2016 tentang BPIH. Sehingga ini

menjadi angin segar bagi pelaksanaan haji 2016 yang lebih baik. Terkait hal itu, Komisi VIII DPR RI apresiasi langkah Presiden dalam mengeluarkan tersebut. Sehingga, Kementerian Agama akan lebih cepat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2016.

“Selain itu, para jemaah haji diharapkan dapat segera melunasi sisa pembayaran BPIH, kalau Keppresnya

Berikut rincian biaya haji di 12 Embarkasi di Indonesia:

No	Embarkasi	Biaya
1	Aceh	Rp31.117.461
2	Medan	Rp31.672.827
3	Batam	Rp32.113.606
4	Padang	Rp32.519.099
5	Palembang	Rp32.537.702
6	Jakarta	Rp34.127.046
7	Solo	Rp34.841.414
8	Surabaya	Rp34.941.414
9	Banjarmasin	Rp37.583.508
10	Balikpapan	Rp37.583.508
10	Makassar	Rp38.905.808
11	Lombok	Rp37.728.961

Sumber: Keppres Nomor 21 tahun 2016

cepat, segala persiapan pun pasti cepat. Jemaah pun mendapatkan kepastian untuk pelunasan. Yang perlu dilunasi tinggal sedikit lagi,” ujar Saleh pada Rabu (18/5).

Politisi PAN ini menjelaskan, jika biaya haji sebesar Rp 34 juta berarti sisa pembayarannya hanya Rp 9 juta karena setoran awalnya sudah

dibayarkan jauh hari sebanyak Rp 25 juta. Setelah melunasi, para jemaah haji dan masyarakat diminta untuk ikut mengawasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

“Sebab, sesuai dengan janji pemerintah kepada DPR, kualitas pelayanan haji tahun ini akan ditingkatkan dari tahun lalu. Itu yang harus dikawal sehingga semua janji pemerintah itu bisa direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Disisi lain, kualitas pelayanan yang akan diawasi adalah biaya pembuatan paspor bagi jemaah yang belum memiliki akan dibayar kembali (reimburse) kepada jemaah, manasik haji 10 kali bagi jemaah yang berada di luar DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan 8 kali bagi yang berasal dari tiga provinsi itu.

Selain itu, pemberian makanan di Mekkah yang semula 15 kali menjadi 25 kali, peningkatan kualitas bis antar kota di Saudi sehingga tidak ada yang mogok, peningkatan jangkauan bis shalawat sampai 91 persen selama di Mekkah dan peningkatan fasilitas di Armina termasuk tenda, karpet, sera pendingin udara.

“Kalau yang sudah baik tahun lalu tetap dipertahankan. Misalnya, pemondokan di Madinah semuanya harus di markaziyah dan pemberian living cost sebesar 1500 riyal. Ini penting sehingga ada tolok ukur yang dapat memastikan bahwa penurunan ongkos haji sekaligus ada peningkatan kualitas pelayanan,” kata Saleh.

Menurut Saleh, pelayanan yang disebutkan tadi dapat diukur bahwa peningkatan pelayanan itu tidak hanya retorika. Ia juga mempersilahkan jika ada masyarakat yang menerima pelayanan yang kurang baik untuk menyampaikannya ke DPR.

Nanti keluhan yang diterima DPR akan disampaikan langsung kepada pemerintah.

Berdasarkan perjuangan yang dilakukan oleh Komisi VIII dan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan haji dengan harga yang lebih terjangkau diharapkan akan menambah kepuasan jemaah haji dalam setiap tahunnya. ■

(hs)

Lion Air Tidak Perlu Panik, Harus Ambil Hikmahnya

Insiden kesalahan prosedur sopir bus Lion Air mengantar penumpang internasional yang baru tiba ke terminal domestik di Bandara Soekarno-Hatta, mengundang sejumlah komentar dari sebagian besar anggota Komisi V DPR RI yang meminta PT Lion Mentari Airlines untuk segera melakukan pembenahan manajemen guna memperbaiki pelayanan ke depannya.

Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kadi menilai, permasalahan yang mewarnai pelayanan Lion Air selama ini bersumber dari internal perusahaan. Menurutnya, perbaikan total harus segera dilakukan.

“Kalau kita bicara *delay*, ada satu proses. Bukan masalah maskapai. Internal harus diperbaiki. Karyawan belum siap dan tidak mau belajar,” kata Hamka saat Komisi V melakukan RDP dengan manajemen, karyawan, pilot dan pramugari Lion Air, di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5).

Sebaliknya, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Miryam S Hariyani menilai rakyat membutuhkan Lion Air karena pemerintah belum menjawab kebutuhan soal penerbangan.

Kendati demikian, kesejahteraan karyawan, khususnya pramugari dan pilot sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diperhatikan.

“Ya mbok pilot sama pramugarinya harus diperhatikan. Bapak (manajemen Lion Group-red) besar karena mereka loh. Itu harus jadi prioritas manajemen Lion, perbaiki semua sisi,” tutur dia.

Ia pun mengimbau agar Lion Group tidak usah panik dengan teguran yang disampaikan pemerintah. Apalagi mengambil langkah melaporkan Dirjen Kementerian Perhubungan ke Bareskrim Mabes Polri. “Semua demi

perbaikan,” imbuhnya.

Anggota Fraksi Gerindra Novita Wijayanti berharap agar Lion Air bisa memperbaiki apa yang jadi kesalahannya hingga akhirnya mendapat sanksi tegas dari Kemenhub.

“Betul masyarakat sangat membutuhkan Lion Air. Harapan saya ke depan Lion Air jadi harapan masyarakat, dengan tiket murah jangan sampai servicenya rendah,” pungkasnya.

Yosef Umar Hadi, anggota Komisi V dari Fraksi PDIP menyatakan ia dan semua anggota Komisi V menyesalkan atas kejadian beberapa waktu lalu, dan jangan membuat pihak Lion Air patah semangat namun bisa mengambil hikmahnya.

“Kita semua harus sama-sama saling introspeksi dan mencari mana-mana yang masih lemah, kita semua tentunya tidak sempurna, apakah itu pilot, pramugari, direksi, karyawan termasuk regulator pasti mempunyai kelemahan, jangan terus saling menyalahkan, harus dengan kepala dingin, dan ambil hikmahnya,” harap Yosef.

“Kami juga berharap penerbangan di Indonesia ini menjadi tamu dinegeri sendiri, itu yang penting, baik regulator maupun operator kita harus menguasai dan memiliki, kita tidak boleh menjadi tamu dinegeri sendiri, jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan pihak lain untuk mengadu domba,” tambahnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya



foto: iwan rmanias



foto: andri/iw

Suasana RDP Komisi V DPR RI dengan Direksi maskapai penbrngaan Lion Air beserta jajarannya

di hadapan Komisi V DPR RI Dirut Lion Air Edward Sirait menjelaskan hasil kronologi terkait kesalahan penurunan penumpang international JT 161 di terminal domestik, dan berakibat dikeluarkannya surat dari Kemenhub No. AU.109/1/8/DRJU. DBU-2016 perihal pembekuan ijin kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara PT. Lion Air Group di Bandar Udara International Soetta.

“Pesawat JT 161 dengan rute Singapura menuju Jakarta mendarat di Bandara International Soetta pada Selasa, 10 Mei 2016 pukul 19.20 WIB membawa 182 penumpang. Air Traffic Control mengarahkan untuk parkir di remote area 56. Proses *handling* berjalan normal, bagasi dibawa ke terminal 2, penumpang dengan menggunakan bus pertama, ketiga, dan keempat dibawa ke terminal 2 international, namun pengemudi bus kedua melakukan

kesalahan membawa penumpang ke terminal 1 domestik,” papar Edward.

Pengemudi bus kedua, lanjut Edward, yang seharusnya membawa penumpang yang akan mendarat dari Padang, dimana rencananya pesawat akan parkir berdekatan dengan pesawat JT 161 dari Singapura, berinisiatif mengambil penumpang dari Singapura tanpa melakukan *cross check* sesuai prosedur kerja. Kejadian tersebut bersamaan dengan pergantian *shiff* kerja. Proses pergantian pengemudi dilakukan diatas bus saat penumpang masih didalam kendaraan. Lalu pengemudi pertama menyampaikan informasi salah ke pengemudi kedua bahwa penumpang berasal dari Padang. Setelah penumpang turun, pengemudi kedua, menyadari adanya kesalahan lalu meminta rekan-rekan kerjanya untuk memanggil dan mengarahkan para penumpang untuk kembali menuju bus untuk diantarkan ke terminal international.

“Pada saat kejadian tanggal 10 Mei 2016 staf bandara international telah berkoordinasi dengan instansi terkait, dan diperoleh informasi ada beberapa penumpang yang belum melakukan *clearance* di imigrasi. Pada tanggal 19 Mei 2016 seluruh penumpang sudah melakukan *immigration clearance*,” papar Edward.

Atas kejadian tersebut, tambahya,

pihak maskapai Lion Air telah menyerahkan masalah ini ke kepolisian untuk memeriksa apakah ada unsur kesengajaan, menghentikan kerjasama dengan penyedia jasa bus dan akan memperbaiki SOP kerja agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Surprasetyo dalam RDP Komisi V DPR RI pada Kamis malam (26/5/2016) menerangkan hasil investigasi atas insiden salah terminal yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Mei lalu. “Ada 15 orang penumpang yang lolos tanpa pemeriksaan bea cukai,” jelas Surprasetyo.

Kemenhub lalu membekukan layanan *ground handling* Lion Air sambil melakukan investigasi. Hasilnya, Lion Air Group sudah memiliki SOP namun tidak dipahami oleh petugas.

“Lion Air Group tidak melakukan program pelatihan ke petugas penanganan jasa pelayanan pesawat udara di darat terkait *awareness safety security program*,” ungkapya.

Kini, Kemenhub sudah menerbitkan surat baru yang berupa rekomendasi ke maskapai. Bila rekomendasi itu tidak dijalankan, maka izin *ground handling* Lion Air akan dicabut permanen.

“Sehingga muncul surat kedua yaitu diberikan waktu 30 hari sesuai rekomendasi. Kalau tidak bisa memenuhi waktu 30 hari akan dicabut sertifikat,” pungkas Surprasetyo. ■

(nt)

Optimis Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima laporan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu. Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 persen.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, dengan kondisi perekonomian nasional yang relatif mengalami kemajuan, minimal laju pertumbuhan ekonomi 5,1 persen bisa tercapai. Namun tentunya, ia berharap agar laju pertumbuhan ekonomi dapat melebihi angka itu, bahkan melampaui apa yang ditargetkan pemerintah.

“Dari hitung-hitungan, analisis dan kajian, angka minimal 5,1 persen sudah di tangan. Harapannya tentu lebih dari angka tersebut,” harap Taufik.

Menurut politisi F-PAN itu, angka 5,1 persen akan lebih mudah tercapai dengan adanya sejumlah dukungan, diantaranya dengan adanya RUU *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan beberapa hal yang terkait dengan faktor fundamental ekonomi lainnya.

“Berapapun angka riil dari pertumbuhan ekonomi ini, akan kita berikan kesempatan pada Komisi XI DPR RI untuk menentukan asumsi makronya. Angka tersebut tentunya menjadi tantangan bersama antara DPR dengan pemerintah,” katanya.

Namun di satu sisi, Taufik mengingatkan, laju pertumbuhan harus diikuti dengan keseimbangan gini rasio. Sehingga, kesenjangan tidak terlalu lebar. Menurutnya, akan semakin bagus jika kesenjangan ekonomi atau gini rasio semakin kecil.



Wakil Ketua DPR RI, **Taufik Kurniawan**

“Hal itu jelas membutuhkan kerja keras bersama antara Pemerintah dan DPR. Hal itu agar laju pertumbuhan ekonomi bisa seimbang dan disparitas kesenjangan antara yang mampu dengan yang tidak mampu tidak terlalu jauh,” tandasnya.

Berselang satu minggu setelah pemerintah menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR, sepuluh fraksi DPR menyampaikan pandangannya. Sebagian besar fraksi di DPR bisa menerima usulan dan pandangan pemerintah. Meski demikian, ada sejumlah penekanan dari pandangan fraksi yang agak tajam.

“Penekanan yang tajam itu merupakan respon dari fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi anggaran yang

tepat sasaran,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Taufik berharap, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan bisa mendukung Program Nawa Cita yang digagas oleh pemerintah. Dirinya juga mengatakan, seluruh pandangan fraksi yang ada, sama-sama ingin mengefektifkan penggunaan keuangan negara.

“Bila penggunaan anggaran efektif, tentu akan sinkron dengan program pemerintah. Jangan sampai justru tidak efektif. Karena, sentralisasi penggunaan anggaran harus bisa menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Program pro rakyat harus menjadi prioritas. Tantangan globalisasi hanya bisa diatasi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Taufik. ■

foto: arief/iw

(sf)

Pertumbuhan Ekonomi Akan Lebih Baik

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan kinerja yang melambat, sebagai akibat dari proses pemulihan negara-negara maju yang belum optimal, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara berkembang.

“Perlambatan ekonomi global dan volume perdagangan dunia, terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia, berdampak terhadap perlambatan kinerja perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain,” jelas Menkeu.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai kisaran 5,3-5,9 persen. Sementara inflasi diperkirakan bergerak pada kisaran $4,0 \pm 1,0$ persen dan nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp 13.650-13.900 per dolar AS.

Sementara harga minyak dunia diperkirakan pada kisaran US\$35-45 per barel, dan lifting minyak dan gas bumi mencapai 1.790-1.910 ribu barel per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 740-760 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi sekitar 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Menkeu menambahkan, pada tahun 2017, Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan. Yaitu, mengendalikan rasio hutang terhadap PDB dalam batas *manageable*.

“Pemerintah juga akan memanfaatkan utang untuk kegia-



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Fadli Zon menerima laporan KEM-PPK dari Menteri Keuangan

tan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi. Kemudian, mengembangkan dan mengoptimalkan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan,” paparnya.

Hal lainnya adalah menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah dan mendukung perbaikan mekanisme pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi lembaga keuangan internasional. Pemerintah, kata dia, mendukung upaya peningkatan ekspor.

“Selanjutnya adalah membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas. Pemerintah juga mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Di bidang perpajakan, seperti disampaikan Menkeu, pemerintah berusaha meningkatkan kinerja perpajakan. Untuk mendukung target pendapatan negara, pemerintah terus melakukan

optimalisasi perpajakan. Di sisi lain, pemerintah berusaha agar pajak tidak menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

“Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak tahun 2017 sebagai sumber dana pembangunan, meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat berat,” kata Menkeu.

Menurut Bambang, kebijakan belanja negara tahun 2017 diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja produktif, dan melakukan efisiensi belanja yang bersifat konsumtif. Arah kebijakan belanja negara tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional.

Target-target pembangunan nasional itu yakni mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,9 persen, menurunkan tingkat pengangguran sebesar 5,3-5,6%, menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,5-10,5% dan pengurangan kesenjangan ekonomi (rasio gini 0,38). ■

foto: iwan armanias

(sf)



foto: dok/ugm.ac.id

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa mewujudkan peningkatan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita berdiri dan terbentuknya Negara Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan amanat UUD tersebut, Pemerintah memiliki peranan yang penting sebagai “*development agent*” dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang diukur

upah pekerja dan penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan pendapatan masyarakat tersebut akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, yang pada akhirnya akan mendorong tingkat kesejahteraaannya ke tingkat yang lebih baik. Runtutan sebab-akibat inilah yang dapat menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraaan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Kurang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Semenjak tahun 2013 hingga tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami pelambatan. Pelambatan

Februari 2016 dibandingkan pada bulan Agustus 2015.

Tren kecenderungan penurunan angka kemiskinan tersebut, juga diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu yang sama. Untuk tahun 2015, jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya tingkat kemiskinan ini dikarenakan adanya pelambatan pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bisa terjadi karena industri lebih memilih menggunakan mesin.

Tren data pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tren penurunan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut merupakan indikasi pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggaran Kemiskinan (per bulan September di setiap tahunnya).

Tahun	Kemiskinan (dalam juta jiwa)	Anggaran (dalam triliun rupiah)	Anggaran kemiskinan per jiwa per bulan (dalam rupiah)
2011	29,89	74,3	207.184
2012	28,59	93,5	272.531
2013	28,07	119	353.283
2014	27,73	134,1	402.993
2015	28,51	178,1	520.578

Sumber : Kementerian Keuangan, BPS, diolah

dari Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat sebuah negara atau wilayah.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berdampak pada peningkatan laju kesempatan kerja sebuah negara. Seorang ekonom mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja akibat pertumbuhan ekonomi, akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara ekonom lainnya menyatakan bahwa, dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 dikarenakan pelambatan ekonomi global dan rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga.

Jika membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut dengan capaian tingkat pengangguran terbuka, terlihat bahwa tren pertumbuhan berdampak pada penurunan angka pengangguran di Indonesia. Sejak tahun 2005, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan. Pada awal tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai titik terendah, yaitu pada tingkat 5,5 persen. Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan sebesar 430 ribu di bulan

Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan tidak boleh hanya pencapaian angka yang tinggi.

Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pertumbuhannya. Kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya dapat diukur dari seberapa besar dampak setiap satu persen pertumbuhan mampu menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2015, rata-rata 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 80 ribu tenaga kerja. Masih jauh dari angka ideal sebesar 300-400 ribu tenaga kerja

per satu persen pertumbuhan. Demikian juga dengan penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu yang sama tidak begitu signifikan. Rata-rata penurunan jumlah masyarakat miskin hanya dua persen setiap tahunnya. Kondisi kedua indikator ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia kurang berkualitas, karena tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia secara signifikan.

Kurang berkualitasnya pertumbuhan selama ini, juga dapat terlihat dari ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang semakin melebar. Hal ini terlihat dari koefisien gini Indonesia yang mengalami tren peningkatannya. Indikasi lainnya adalah sebaran konsumsi rumah tangga yang menjadi variabel dominan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Konsumsi rumah tangga di Indonesia hanya ditopang oleh

sekitar 20 persen kelompok masyarakat terkaya.

Indikasi lainnya adalah capaian atau sebaran investasi yang merupakan penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga. Selama ini, investasi yang ada banyak masuk ke sektor-sektor yang padat modal bukan padat kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB ataupun pertumbuhan ekonomi, yang identik dengan sektor padat karya, merupakan indikasi kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

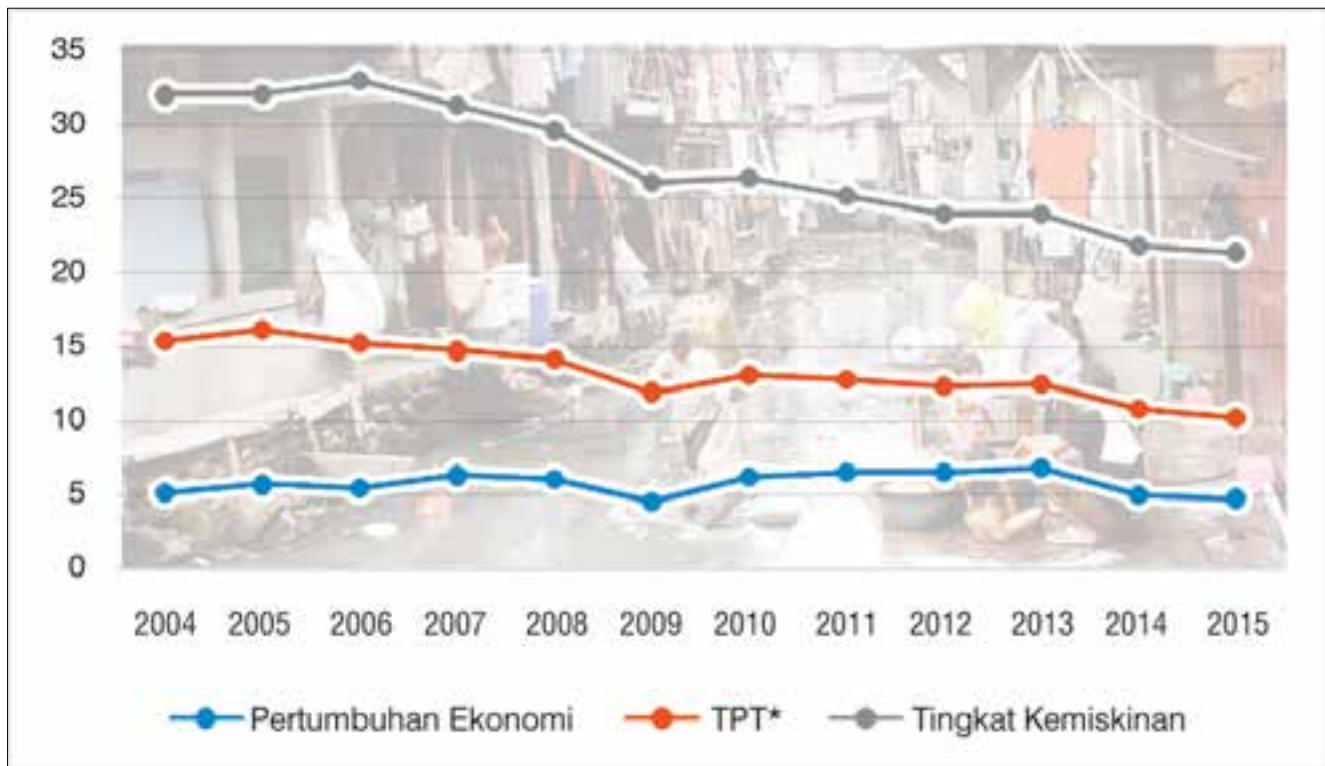
Indikasi terakhir yang menunjukkan kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi selama ini adalah capaian angka pekerja tak penuh. Dalam kurun waktu 2007-2015, angka pekerja tak penuh mengalami tren peningkatan dan jumlahnya lebih besar dari jumlah masyarakat miskin.

Dalam definisi Badan Pusat Statistika

(BPS), pekerja tak penuh merupakan pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Para pekerja tak penuh biasanya bekerja pada sektor informal. Ketika pekerja ini bekerja dibawah 35 jam seminggu dan mayoritas bekerja di sektor informal, maka dapat dipastikan besaran pendapatannya relatif kecil. Jumlah pekerja tak penuh didominasi oleh pekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Dalam kurun waktu 2007 hingga 2015, terjadi peningkatan jumlah pekerja dengan tingkat pendapatan rendah. Tren tersebut juga dapat menjadi sebuah indikasi adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan membuktikan tidak begitu signifikannya pertumbuhan ekonomi selama ini meurunkan angka kemiskinan. Dengan kondisi seperti ini, peran anggaran kemiskinan oleh Pemerintah dalam APBN menjadi sangat penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (dalam persen).



Sumber: BPS, Bapenas, LKPP diolah

Tingkat Kemiskinan dan Setengah Pengangguran (dalam juta orang)



Sumber : BPS, diolah

Anggaran Kemiskinan dan Efektifitasnya

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah telah memberikan anggaran yang cukup besar di APBN. Semenjak tahun 2011, jumlah anggaran kemiskinan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Anggaran kemiskinan di tahun 2015 mencapai Rp 178,1 triliun.

Apabila jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, maka akan diperoleh jumlah rata-rata yang diterima oleh setiap jiwa dalam setiap tahunnya. Jumlah yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, anggaran kemiskinan per kapita mencapai Rp 520.578. Jumlah ini jauh di atas batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS per September 2015, yaitu sebesar Rp 344.809. Apabila anggaran kemiskinan tersebut direalisasikan secara tepat

sasaran, maka jumlah kemiskinan di Indonesia akan menurun secara signifikan, bahkan mendekati tidak ada lagi kemiskinan.

Namun pada kenyataannya, jumlah masyarakat miskin masih sangat besar dan justru mengalami peningkatan di tahun 2015. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya ketidakefektifan anggaran kemiskinan selama ini dan juga indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran anggaran kemiskinan. Selain tidak tepat sasaran, ketidakefektifan ini dapat juga dikarenakan jumlah biaya tidak langsung anggaran kemiskinan jauh lebih besar dari belanja langsungnya.

Perlu Perbaikan

Dalam jangka panjang, Pemerintah harus segera melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berdampak besar dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan keefektifan anggaran kemiskinan. Agar jauh lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan, anggaran kemiskinan harus tepat sasaran. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan subsidi kepada orang secara langsung.

Subsidi atau bantuan ini dapat berupa kartu yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bantuan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah tidak harus berbentuk beras. Hal ini juga dapat mengurangi beban belanja tidak langsung dari anggaran kemiskinan yang jumlahnya lebih besar dari nilai belanja langsung. Selain itu perlu adanya perbaikan dan pengoptimalan penggunaan basis data. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Ditulis oleh:

Ratna Christianingrum

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kajian Anggaran DPR RI



foto: jaka/iw

Diskusi Forum Legislasi menyoroti RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Gedung DPR RI

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh: Peran Pemerintah Dipangkas

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Masalah utama yang sampai saat ini masih menyertai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain kelemahan dalam aspek regulasi yaitu tidak adanya ketentuan mengenai kriteria alokasi sisa porsi skala nasional, tidak adanya kepastian regulasi mengenai sisa kuota, tidak adanya standar komponen *indirect cost* dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji, tidak adanya dasar pemberian honor petugas haji non kloter, serta belum adanya pasal penerapan sanksi bagi Kementerian Agama sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji atas berbagai penyimpangan pelaksanaan pengelolaan ibadah haji.

Sementara, kelemahan dalam kelembagaan seperti penanganan kepanitiaan masih bersifat *ad hoc*, tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh teknis urusan haji. Dan kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan catering bagi jamaah haji di Arab Saudi.

Menyempurnakan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan aman, tertib, lancar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji dan umrah.

Mencermati masih lemahnya diplomasi penyelenggaraan ibadah haji selama ini dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, khususnya terkait operator, regulator, dan pengawasan yang masih menjadi satu di Kementerian Agama (Kemenag RI), Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. RUU ini sebagai revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Haji.

RUU ini diajukan untuk menyempurnakan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan aman, tertib, lancar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji dan umrah.

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ini akan diputuskan di Paripurna DPR RI pada Masa Sidang ke V Tahun Sidang 2015-2016 mendatang. “Kalau disetujui dan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI, diharapkan antara regulator, operator dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan profesional. Hanya saja pemerintah seperti tidak siap dengan pelaksanaan RUU ini,” tegas anggota Komisi VIII DPR RI H. Anda dalam diskusi forum legislasi ‘RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh’ bersama Sekjen Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI) H. Samidin Nashir, dan Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, H. Ade Marfuddin di Gedung DPR RI Jakarta, Mei lalu.

Ketidaksiapan pemerintah diduga karena pengelolaan keuangan haji itu mencapai triliunan rupiah. Dalam laporan haji tahun 2015 lalu sebesar Rp 9 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 10.150 triliun. Sehingga ada kelebihan Rp 1.150 triliun. “Laporannya belum selesai, tapi tetap membahas RUU ini secara paralel. Untuk itu, kalau RUU ini tidak direspon berarti pemerintah tidak memiliki keberpihakan kepada umat Islam untuk menyelenggarakan haji yang baik dan profesional,” ujar politisi Gerindra dari Dapil Banten itu.

Dengan RUU ini kata Anda, maka Kemenag RI akan menjadi regulator (pembuat kebijakan), operator dilakukan oleh BPHI (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) dan sebagai pengawas adalah Majelis Amanah Haji (MAH). “Anggota MAH ini terdiri dari unsur 3 orang dari kementerian yang

memahami hukum syariah, 2 orang menejer, 1 orang keuangan, dan 1 orang lagi ahli hukum,” tambah Anda.

Biaya Penyelenggaraan ibadah haji secara resmi Rp 34.641 juta, tapi seluruh biaya yang ditanggung mencapai Rp 64 juta. Kekurangan tersebut berasal dari dana optimalisasi haji yang mencapai Rp 3,9 triliun, yang berasal dari bunga dana jamaah haji. “Memang biaya haji itu ada yang bersifat langsung dan tidak langsung, sebelum, sedang dan setelah pemberangkatan haji,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, H. Ade Marfuddin mengakui jika pemerintah selama ini kurang berpihak kepada jamaah haji, maka wajar jika sebelumnya ada UU Nomor 17 tahun 1999, disusul UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Haji, dan kini ada usulan RUU yang akan memisahkan antara

ada keberanian pemerintah dan DPR RI untuk memisahkan antara operator, regulator dan pengawas haji. Apalagi ada keterlibatan dana APBN dan APBD dalam pelaksanaan haji itu. Mestinya ada laporan keuangan haji setiap tahunnya kepada jamaah haji. Baik yang belum maupun sesudah berangkat haji. Bayangkan kalau dalam setahun jamaah daftar tunggu (*waiting list*) haji itu sampai 3 juta orang, berapa uang yang tersimpan?” kata Ade mempertanyakan.

Sedangkan menurut Samidin Nashir, ibadah haji itu merupakan tugas nasional, yang melibatkan berbagai bidang, aspek, dan melibatkan ratusan ribu jamaah haji, maka harus dengan manajemen yang profesional. Sebab, ibadah haji ini ibarat pemindahan logistik, sehingga harus benar-benar cermat, kompetensi tinggi, standar



Kalau RUU ini tidak direspon berarti pemerintah tidak memiliki keberpihakan kepada umat Islam untuk menyelenggarakan haji yang baik dan profesional.

Anggota Komisi VIII DPR RI H. Anda

foto: jaka/iw

regulator, operator, pengawas haji dan umroh. Persoalannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang ada saja belum dijalankan, berarti Kemenag RI memang tidak siap.

Bahkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia (BPKHI) kata Ade, malah terlambat sampai sekarang belum dibentuk, sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang BPKHI. Padahal, menurut Anggito Abimanyu (mantan Dirjen Haji dan Umroh) Kemenag RI, keterlambatan pembentukan BPKHI itu berarti dzolim. “Jadi, tak ada keadilan dalam mengelola dana optimalisasi haji yang jumlahnya mencapai Rp 80 triliun itu,” tegas Ade.

Untuk itu pengajar UIN Syahid Ciputat Jakarta itu, meminta harus

operasional (SOP) yang jelas, dan semua harus dilakukan dengan persiapan yang matang.

Selaku Ketua Badan Pengawas Haji Indonesia (BPHI) menggantikan alm. Slamet Effendy Yusuf, Samidin Nashir, menjelaskan bahwa BPKHI tersebut juga belum jalan. Namun demikian dia pesimis jika penyelenggara haji, keuangannya harus menunggu pencairannya dari BPKHI. Mengapa? Karena dalam prakteknya, koordinasi keuangan itu sulit, maka birokrasi dan prosedur keuangan itu jangan sampai membuat pelaksanaan haji terlambat. “Jadi, jangan sampai akibat prosedur dan birokrasi keuangan, maka pelaksanaan haji itu terlambat,” pungkasnya. ■

(sc)



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiarta Adia meninjau Standar Kesehatan dan Keamanan Perakitan BRT di PT Laksana Karoseri Ungaran, Semarang./foto. Naefurodji





Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Sodik Mudjahid mengunjungi warga binaan Kemensos yang mendapatkan dana bantuan PKH di Kaltara. /foto: Jaka





Pimpinan dan sejumlah anggota DPR RI meninjau ketersediaan dan pengecekan harga pangan di Pasar Induk Cibitung dan Bulog Kelapa Gading. /foto: Jaka-Runi



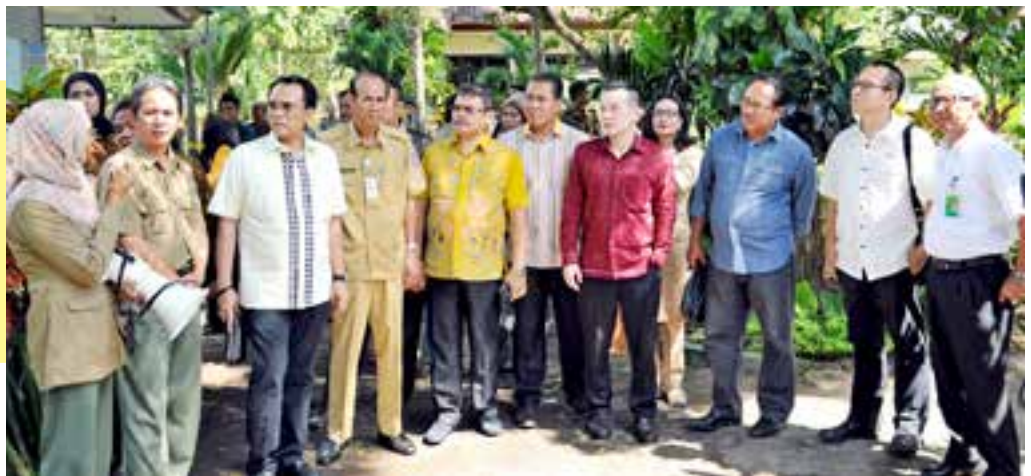


Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Deding Ishak meninjau korban longsor di relokasi Perumahan Lateri Indah, Provinsi Maluku. /foto: Iwan Armanias





Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Daniel Johan, tinjau Balai Taman Nasional, Bali Barat. /foto: Iwan Armanias





Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi Achmad Hafisz Tohir meninjau UKM/IKM di Kampung Arborek, Papua Barat. /foto: Iwan Armanias



Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lapas Jambi mendapati menara pengawas digunakan sebagai ruang sel warga binaan. /Foto: Rizka



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau kesiapan armada mudik di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. /Foto: Husen





Foto: dok

dr. Dito Anurogo

Indonesia (Takkan) Lepas dari Lupus

Oleh: dr. Dito Anurogo

Problematika lupus bagai simalakama. Dokter pun sering salah mendiagnosis. Padahal salah diagnosis fatal akibatnya. Penderita lupus semakin kritis. Akankah Indonesia bebas lupus?

Lupus, lengkapnya *systemic lupus erythematosus* (SLE), adalah penyakit otoimun multisistemik menahun, terutama menyerang kulit-persendian.

Lebih dari lima juta jiwa di seluruh dunia menderita SLE. Insiden kasus baru 5,5 per 100 ribu orang per tahun. Insiden SLE berdasarkan survei dari tahun 1965-2007 mendapatkan angka 2,0-7,6 per 100 ribu penduduk per tahun, termasuk pria dan wanita. Di Eropa Utara, insiden tahunan dilaporkan 4 dari 100 ribu penduduk. Prevalensi di USA 73 per 100 ribu penduduk per tahun. Prevalensi penduduk Asian lebih tinggi daripada penduduk kulit putih. Prevalensi SLE berdasarkan survei dari tahun 1965-2007 mendapatkan angka 14,6-50,8 per 100 ribu penduduk, termasuk pria dan wanita. Di Indonesia, jumlah orang dengan lupus (odapus) diperkirakan 400 ribu orang.

SLE lebih sering diderita wanita berusia 20-45 tahun daripada pria. Rasio wanita:pria = 8-10:1 pada dewasa. Pada anak-anak dan wanita berusia lebih dari 55 tahun, rasio mendekati 2:1. Sebagian besar kasus terdiagnosis di usia 15-44 tahun. Meskipun demikian, semua usia, termasuk anak-anak berpotensi menderita SLE.

Penyebab lupus multifaktor. Menurut lebih dari 10 GWAS (*Genome-wide association studies*), ada lebih dari 50 gen teridentifikasi pada SLE. Misalnya: misalnya: BANK1, BLK, komponen komplemen (C1QA,B,C;C2;C4A;C4B), CRP, DRB11501, DRB10301, FCGR2A, FCGR3A, IRF5, ITGAM, IRAK1, LYN, PTPN22, STAT4, TNFAIP3, TNFSF4, TREX1, dsb. Gen-gen ini secara umum dikelompokkan menjadi sinyal intra-

renal, sinyal imun *innate*, dan sinyal limfosit. Beberapa gen yang berimplikasi pada SLE dapat berkontribusi terhadap proses perjalanan penyakit dengan menerobos toleransi imun dan memicu produksi autoantibodi.

Gen-gen tersebut termasuk salah satu dari kategori gen fungsional berikut: gen-gen yang memengaruhi aktivasi limfosit (terutama sel-sel B), gen-gen yang memengaruhi sinyal imun *innate* (khususnya aktivasi NF-B dan sinyal IFN-I); gen-gen yang berfungsi di dalam ginjal, berpotensi memicu kerusakan jaringan ginjal; dan gen-gen yang mempengaruhi penanganan debris apoptosis, kromatin, dan kompleks imun yang menguasai pelbagai antigen ini. Faktor lain penyebab SLE seperti: pemicu lingkungan (virus), infeksi mikroorganisme, terpapar sinar matahari, obat-obat tertentu, perubahan fungsi sistem imun.

Riset imunologi dan biologi molekuler mengungkapkan beberapa fakta menarik terkait SLE ini. Beberapa gen terkait erat dengan ekspresi gen SLE, ketidaknormalan molekuler sel imun memicu patologi autoimun, hormon dan kromosom seks berperan di dalam perkembangan SLE, faktor-faktor lingkungan, defek molekuler, dan epigenetik berkontribusi besar terhadap ekspresi SLE. Hidroksimetilasi DNA berkontribusi terhadap penyimpangan pengaturan transkripsi gen di dalam proses perjalanan penyakit SLE.

Potret Klinis

Lesi lupus diskoid pertama kali diperkenalkan Cazenave tahun 1833 dengan istilah *erythema centrifugum*, sedangkan ruam kupu-kupu di wajah

dikenali von Hebra tahun 1846.

SLE menyerang semua komponen sistem kekebalan tubuh manusia. Gejala umumnya sama dengan infeksi mikroba, seperti: lelah, sakit kepala, penurunan berat badan, demam, nyeri sendi-otot, *mlanjer* (limfadenopati). Sedangkan potret klinisnya beragam, sehingga SLE disebut juga “penyakit 1001 wajah”. Misalnya: ruam kupu-kupu (*butterfly rash*) di pipi. Sering dipicu paparan sinar surya. Kulit tubuh juga menjadi lebih sensitif terhadap cahaya.

Ulserasi mukosa (borok), terutama di pipi dan di langit-langit mulut juga merupakan ciri khas SLE. Radang dan nyeri di persendian. Gangguan persarafan-jiwa, berupa: gangguan fungsi kognitif, gangguan *mood*, psikosis. Penyakit serebrovaskuler, kejang, sakit kepala, dsb. Radang selaput paru-paru (*pleuritis*), ditandai nyeri saat bernapas. Radang selaput pembungkus jantung (perikarditis, miokarditis), anemia, fenomena Raynaud, vaskulitis, aterosklerosis, nefritis, trombositopenia, neuropati sensorimotor, penyakit katub jantung, perdarahan alveoli paru-paru, radang pankreas, radang otot. Bila mengenai ginjal, disebut lupus nefritis (LN). Klasifikasi LN telah dirumuskan WHO sejak 1975. Hipertensi merupakan konsekuensi gangguan ginjal.

Untuk menegakkan diagnosis SLE, dokter menggunakan kriteria dari *American College of Rheumatology* tahun 1997. Riwayat konsumsi obat perlu digali, mengingat *procainamide* dan *hydralazine* berpotensi meningkatkan risiko terkena SLE.

Awalnya diagnosis SLE sulit ditegakkan, mengingat beragam

manifestasi sistemik SLE dapat menyerupai kondisi lainnya, terutama infeksi virus/keganasan. Beberapa diagnosis banding juga perlu dipertimbangkan, seperti: sindrom Sjögren, fibromialgia, reaksi obat, artritis rematoid dan vaskulitis, infeksi sistemik (dapat berupa: parvovirus B19, mononukleosis, artritis gonokokal), sindrom usus rensa, purpura trombositopenik trombotik, keganasan (berupa kanker kelenjar getah bening).

Uji laboratorium membantu penegakan diagnosis SLE. Misalnya: hitung darah lengkap, laju endap darah, *activated partial thromboplastin time* (aPTT), dan tes-tes lainnya termasuk C3/C4, *antiphospholipid*, anti-RO/SSA, *C-reactive protein*, anti-C1q. Tes ANA umumnya positif. Titer anti-dsDNA bermanfaat untuk menilai progresifitas LN. Evaluasi penyakit ginjal pada SLE meliputi: urinalisis dengan analisis mikroskopis sedimen urin, serum BUN (nitrogen urea darah), albumin, dan kreatinin, pengumpulan air seni 24 jam, perkiraan rerata filtrasi glomerulus, rasio protein:kreatinin urin.

Untuk mengukur aktivitas SLE dewasa-remaja, digunakan indikator *The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index*. Sedangkan untuk menilai kerusakan organ tahunan dipakai *The Systemic Lupus International Collaborating Clinics/ACR Damage Index*, spesifik untuk populasi dewasa dan anak-anak.

Menurut pedoman EULAR (*European League Against Rheumatism*) 2010, semua penderita SLE wajib dinilai tentang: asupan kalsium dan vitamin D, keteraturan berolahraga, status merokok, faktor-faktor risiko kardiovaskuler, kadar kolesterol dan glukosa darah, indeks massa tubuh, tekanan darah. Rekomendasi ini untuk pengawasan komorbiditas, yaitu penyakit/gangguan yang berpotensi menyertai SLE.

Solusi

Terapi diberikan dokter sesuai indikasi. Obat antiinflamasi nonsteroid digunakan untuk meredakan gejala pada kasus ringan. SLE efektif diatasi dengan agen topikal, kortikosteroid (siklofosfamid), hidrokortikoid, glukokortikoid, azathioprine, mikofenolat, atau *methotrexate*. Untuk lupus nefritis, dokter merekomendasikan siklofosfamid

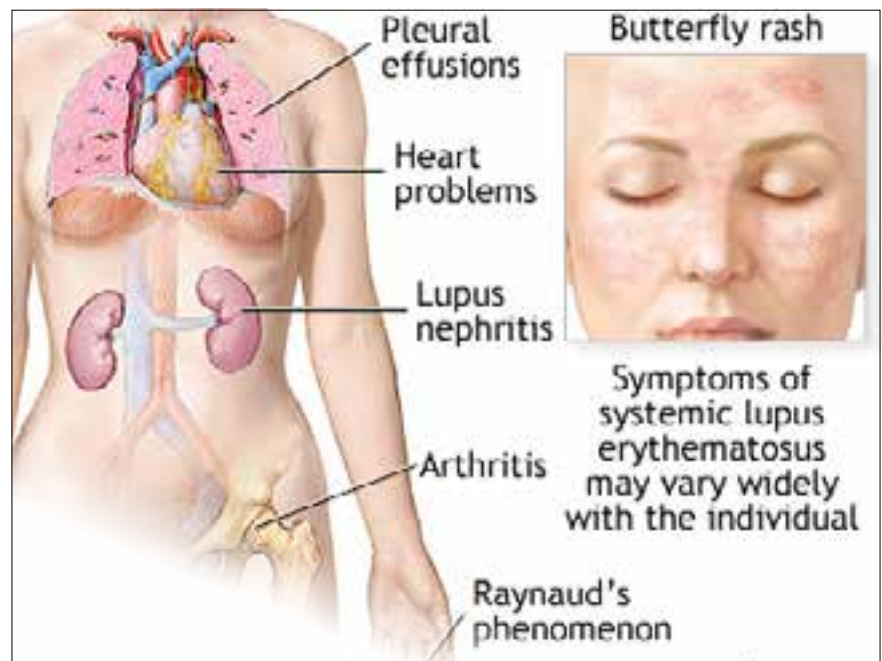
atau azathioprine. Terapi tambahan lain, seperti: gamma globulin intravena, plasmaferesis, suplementasi vitamin D, sel punca sedang dikembangkan untuk mengatasi SLE.

Bagi ibu hamil penderita lupus, maka tidak boleh mengonsumsi obat siklofosfamid, mikofenolat mofetil, metotreksat, leflunomide. Adapun multivitamin prenatal, aspirin dosis rendah (81 mg), hidrokortikoid, prednison (dosis sedang), azathioprine boleh dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil.

Beberapa kandidat obat baru untuk menaklukkan SLE telah dikembangkan melalui serangkaian

IL-17, IL-21, IL-2 dan reseptor-reseptor mereka berperan penting di dalam patogenesis (proses perjalanan) SLE dan berpotensi menjadi target dari obat-obat inovatif ini.

Ada beberapa perubahan gaya hidup pada penderita lupus, misalnya: menghindari terpapar langsung sinar matahari, bila harus terkena sinar matahari maka wajah perlu memakai krim tabir surya atau pakaian lengan panjang, memakai topi dan payung juga dapat mencegah terpapar langsung sinar matahari, menghindari terkena asap rokok, hindari kerja lembur dan stres, berolahraga secara rutin dan teratur minimal 30 menit setiap pagi, menjaga



riset. Beberapa obat bekerja dengan mendelesi sel B, seperti: Rituximab, Ocrelizumab, Epratuzumab. Beberapa obat menghambat aktivasi sitokin sel B, seperti: Belimumab, Atacicept, Blisibimod, Tabalumab. Beberapa obat bekerja dengan menghambat ko-stimulasi sel T, seperti: Abatacept, CDP7657, AMG 557, MEDI-570, JAK116439. Beberapa obat bekerja sebagai terapi *cytokine-directed*, seperti: Tocilizumab, Sirukumab, Rontalizumab, Sifalimumab, Anifrolumab. Ada juga yang bekerja dengan memodulasi reseptor Fcy, seperti: SM101. Berbagai sitokin proinflamasi, termasuk: IFN, TNF-alfa, IL-6, IL-18, *T-cell-derived cytokines*

berat badan tetap ideal untuk mencegah osteoporosis (keropos tulang).

Kematian penderita lupus biasanya akibat penyakit jantung koroner, gagal ginjal stadium akhir, dan infeksi berat tanpa disertai lupus aktif.

Dengan penatalaksanaan paripurna dan komprehensif, disertai dukungan lintas-sektoral, multidisipliner, doa, dan hati penuh cintakasih, maka harapan takkan pupus meskipun menderita lupus. Mengatasi lupus, ya harus serius.

Dito Anurogo, dokter online/digital, penulis 18 buku (salah satunya *the Art of Medicine*), S2 IKD Biomedis FK UGM, Ketua UKM Jurnal Paradigma HMP UGM, Ketua Forum Kewirausahaan Sosial Yogyakarta dan Jawa Tengah, CEO/Pendiri Sahabat Literasi Indonesia, email: ditoanurogo@gmail.com

Syaifullah Tamliha

Politisi Berprestasi dari Hulu Sungai Utara

Di ruang kerjanya, ia menerima Parlementaria dengan sangat ramah. Berbincang tentang kenangan masa kecil dan masa muda di kampung halaman begitu menarik untuk didengar. Sebelum menjadi politisi, ia sudah melanglang buana sebagai aktivis kampus dan pengusaha di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Inilah Syaifullah Tamliha pria berdarah dayak muslim. Dia duduk sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dan sekaligus Anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, dan politik luar negeri. Sebelum berkiprah sebagai anggota DPR RI, dia sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Kalsel.

Siswa Berprestasi

Lahir di kampung Tanah Abang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel. Dahulu, kampungnya tak memiliki infrastruktur yang baik. Akses jalan rusak, irigasi terbengkalai, dan sungainya agak kotor. Di zaman Orde Baru, hutan-hutan pun rusak. Aksi penebangan liar selalu terjadi yang mengakibatkan erosi. Namun, kampung tak terlalu bising dengan lalu lalang kendaraan. Relatif sunyi. Jarak kampung ini ke ibu kota kabupaten sekitar 10 km.

Syaifullah kecil lahir dengan kondisi kampung seperti itu. Dia anak sulung dari tiga bersaudara. Tamliha ayahnya, seorang guru PNS dan Jamilah ibunya adalah sosok yang rajin berkebur. Syaifullah lahir pada 18 Mei 1969 di tengah keluarga religius. Ayahnya seorang aktivis NU yang berafiliasi



foto: runi/iw

Syaifullah Tamliha



Foto: Iwan Armanias

Syaifullah Tamliha sebagai Wakil Ketua BSKAP DPR RI mewakili parlemen Indonesia pada pertemuan sidang parlemen dunia.

ke PPP, walau ia seorang PNS yang mestinya monoloyalitas. Karenanya, sang ayah sering berpindah-pindah tugas mengajar dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Sementara ibundanya rajin sekali berkebun dengan menanam pohon buah-buahan. Hasilnya ia jual ke kota untuk sekadar membantu ekonomi keluarga. Buah-buahan yang dijualnya bergantung musim buah saat itu. Tapi yang tak pernah ketinggalan, sang ibu selalu menjual pisang manurun, pisang khas Kalsel yang mengandung karbohidrat rendah. Cocok dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Bahkan, hingga kini ibunda Syaifullah masih berdagang pisang itu. Pisang yang juga sangat disukai Syaifullah.

Di kampungnya ada Sungai Balangan, sungai yang ketika airnya jernih selalu menjadi tempat favorit bagi Syaifullah kecil untuk berenang bersama sahabat-sahabat kecilnya. Di sungai itu banyak ikan dan juga buaya. Bahkan, ikan buntal yang sangat beracun hidup pula di Balangan. Karena tak hati-hati saat berenang, Syaifullah pernah digigit ikan buntal di kaki kanannya. Hingga kini, masih menyisakan bercak hitam yang tak hilang.

Dahulu, bila warga mendapati ikan buntal, langsung dimatikan. Caranya, dengan menginjak perlahan-lahan

hingga ikan menggelembungkan perutnya seperti bantal. Saat perutnya sudah menggelembung maksimal, barulah diinjak dengan keras, hingga meledak seperti suara balon yang pecah. Begitulah sedikit kenangan yang tersisa di masa kecil.

Mengawali pendidikan formalnya, Syaifullah kecil bersekolah di SDN Rajawali Amuntai. Karena tinggal di dekat lingkungan sekolah, ia biasa berjalan kaki yang jaraknya tak jauh. Ruang kelas masih sederhana dengan dinding dari papan dan berlantaikan tanah. Karena lingkungan yang sunyi, para siswa bisa belajar dengan baik.

Ada kenangan yang tak terlupakan Syaifullah. Bila ada mantri datang ke sekolah untuk memberi suntikan imunisasi kepada para siswa, ia dan kawan-kawannya kerap menjebol dinding kelas yang terbuat dari papan itu untuk kabur. Mantri dahulu, hanya memiliki satu jarum suntik yang digunakan berkali-kali. Sehabis menyuntik, jarum biasanya dicuci dengan air hangat sebelum menyuntik kembali ke pasien berikutnya.

“Imunisasi sangat ditakuti. Jarum suntiknya hanya satu. Walau belum pernah diimunisasi, alhamdulillah saya belum pernah kena penyakit,” kenang Syaifullah, tersenyum. Saat sekolah, Syaifullah sangat menyukai pelajaran sejarah. Tapi, nilai matematikanya

jauh lebih tinggi daripada nilai sejarah. Sedari kecil sebenarnya, ia sangat menyukai ilmu-ilmu sosial. Bila ditanya apa cita-citanya sewaktu kecil? Dengan lugas ia menjawab, ingin menjadi anggota dewan.

Dia terinspirasi dari tokoh Kalsel dan pernah menjadi anggota MPR/DPR. Keinginan menjadi politisi sudah tertanam sejak usia belia. Setamat SD tahun 1979 Syaifullah melanjutkan ke SMPN 4 Amuntai, sekolah favorit di kota yang dihuni anak-anak cerdas dan berprestasi. Syaifullah adalah satu-satunya anak desa yang bisa masuk SMP itu. Banyak anak pejabat daerah bersekolah di situ.

Setiap hari ia mengayuh sepeda untuk sampai ke sekolah yang jaraknya 10 km. Aktivitas berorganisasi mulai dilakoni Syaifullah kecil. Bahkan, ia pernah terpilih menjadi Ketua Majelis Perwakilan Siswa (MPS). Majelis inilah yang memilih ketua OSIS waktu itu. Di sinilah bakat menjadi anggota dewan terus dirintis. Setamat dari SMPN 4, ia melanjutkan ke SMAN Amuntai.

Ketika di SMA, ia sempat ingin memilih jurusan A3 (bidang sosial). Tapi, kemudian sang guru memarahinya dan meminta Syaifullah mengganti jurusan A1 (bidang fisika), karena nilai mata pelajaran eksaktanya sangat baik. Ia pun tunduk saja, walau tak menyukainya. Kegemarannya berorganisasi terus berlanjut. Syaifullah terpilih menjadi Ketua OSIS untuk periode 1987-1988.

Segudang prestasi juga mulai ditorehkan Syaifullah. Tercatat, ia pernah masuk kelompok ilmiah remaja se-Kalimantan Selatan. Berbagai temuan ilmiah ia publikasikan. Misalnya, ia menulis temuan pengawet tupai dan membuat cuka dari air kelapa. Syaifullah pun menjuarai karya tulis ilmiah. Dia juga menjadi Ketua Perkumpulan Filatelis Indonesia se-Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur.

“Saya pernah dapat hadiah uang sebesar Rp25 ribu. Jumlah yang sangat besar waktu itu dibanding uang saku harian yang biasa saya terima sebesar Rp150 per hari,” ungkap Syaifullah. Ia juga rajin menulis opini di koran lokal, Banjarmasin Post. Honorinya Rp25 ribu per tulisan. Jumlah itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sejak SMA, remaja



Foto: iwan armanias

Syaifullah Tamliha bersama anggota BKSAP DPR RI menghadiri sidang parlemen dunia

Syaifullah sudah hidup mandiri, tak lagi bergantung pada orangtua.

Bahkan, sejak SMA, dia juga sudah menulis tentang pentingnya KB mandiri. Tulisan ini berangkat dari kenyataan sulitnya pasangan hidup mendapatkan akses KB. Untuk itu, perlu tersedia secara mudah berbagai pendukung perlengkapan KB, agar para pasangan hidup bisa merancang kehidupan keluarganya dengan baik. Tiga kali berturut-turut menjadi juara I untuk isu ini. Akhirnya, Syaifullah mendapat penghargaan dari Ketua BKKBN pusat waktu itu Haryono Suyono.

Aktivis Kampus

Setamat SMA tahun 1988, Syaifullah mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Ada dua jurusan yang diambilnya, jurusan Hukum Internasional di UGM, Yogyakarta dan jurusan Sumber Daya Perairan di Universitas Lambung Mangkurat, Kalsel. Jurusan hukum internasional merupakan pilihan pertamanya. Tapi, jurusan yang terakhir merupakan pilihan para guru SMA-nya. Ironis, yang diterima malah jurusan yang tak disukainya di Lambung Mangkurat.

Saat mengikuti orientasi pengenalan kampus di Lambung Mangkurat, seorang dosen dalam ceramahnya berkata, bisnis yang paling berisiko adalah bisnis di bidang perikanan. Ikan itu mudah mati. Kalau di hulunya tercemar, semua

ikan akan mati. Ceramah itu semakin membuatnya tak bergairah. Namun, ia ikuti saja karena hanya di jurusan itulah ia diterima. Sejak saat itu ia resmi menjadi mahasiswa Fakultas Perikanan.

Selama di kampus, pemuda Syaifullah rajin berorganisasi. Ia pandai bergaul dengan sesama aktivis kampus. Membangun kapasitas intelektual dan membincang politik modern sudah menjadi kesehariannya. Bahkan, ia sering ikut berdemonstrasi menyuarakan apa yang menjadi

tuntutan rakyat kala itu. Ketika belum duduk di semester 4, Syaifullah sebenarnya sempat terpilih menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) di fakultasnya.

Lantaran belum genap duduk di semester 4, pemilihan dianulir. Aturan main memang menghendaki begitu. Akhirnya, ia hanya duduk sebagai wakil ketua BPM. Namun, kepemimpinan Syaifullah di fakultasnya hanya tinggal menunggu waktu. Tidak lama, setelah melewati semester 4, ia malah terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagai intelektual muda muslim, ia juga rajin menggelar diskusi keislaman di Masjid Al Baitar, masjid kampusnya. “Bahkan, saya juga yang menggagas dialog generasi muda sipil dan militer saat Pangdamnya (Purn) Mayjen Moetojib. Kita bikin acara di Balikpapan. Isi pertemuannya menyamakan visi misi tentang Indonesia ke depan yang harus dihadapi bersama,” tutur Syaifullah.

Berpolitik

Lulus kuliah tahun 1995, Syaifullah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diketuai Muhaimin Iskandar. Mantan Ketua IPNU Cabang Amuntai Kalsel ini, didaulat menjadi Ketua Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan



Foto: dok.pri/iw

Syaifullah Tamliha saat menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya.

Ekonomi Masyarakat PMII. Cita-cita menjadi politisi sedari belia akhirnya terealisasi saat ia memilih bergabung dengan PPP tahun 1999. Pada Pemilu 2004 ia memulai karir politiknya di DPRD Provinsi Kalsel.

Syaifullah diangkat menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Kalsel. Bahkan, ia menjadi ketua fraksi termuda dalam sejarah DPRD Kalsel saat usianya 33 tahun. Dulu, katanya, PPP disebut juga sebagai Partai Perkumpulan Pensiunan. “Dan yang saya pimpin orang-orang tua,” ujarnya tertawa. Di DPRD Kalsel, dia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur, pertambangan, dan energi.

Sebenarnya pada Pemilu 2004, ia sempat ditawarkan Hamzah Haz, saat itu Ketua Umum PPP untuk langsung menjadi caleg DPR RI. Namun, dengan pertimbangan masih banyak senior yang ingin mencalonkan diri di DPR RI, ia harus mengalah. Hanya satu periode di DPRD Kalsel, Syaifullah mengantongi tiket dari DPP PPP untuk berkiprah di DPR RI pada Pemilu 2009. Sebagai tokoh muda yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kalsel, ia pun dengan mudah melenggang ke Senayan.

Saat resmi menjadi anggota DPR RI, ia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Dia juga sempat duduk di Badan Anggaran (Banggar). Lalu, apa yang membedakannya sebagai anggota DPRD dan DPR RI? Syaifullah melihat, DPRD selama ini tak punya kewenangan mutlak mengatur anggaran. Sebaliknya DPR RI punya kewenangan mutlak untuk menentukan anggaran bersama pemerintah.

Pada Pemilu 2014, Ketua Alumni PB PMII ini, kembali mencalonkan diri dan terpilih untuk periode keduanya. Kini, ia duduk di Komisi I dan menjadi Wakil Ketua BKSAP DPR RI yang berhubungan dengan pertahanan dan politik luar negeri. Soal pertahanan, Indonesia belum memiliki standar alat pertahanan yang paling minum sekali pun. Masih jauh dari standar bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Indonesia, sambung mantan Direktur Utama PT. Bara Borneo Insanida ini, bakal menjadi rebutan negara-negara tetangga, baik kekayaan

darat maupun lautnya. Untuk itu, perlu dibangun pangkalan militer yang memadai di daerah perbatasan, terutama di Nunukan, Kalimantan Utara. Persoalan lain adalah menyangkut keamanan laut. Syaifullah melihat, di luar TNI AL, terlalu banyak lembaga yang beroperasi di laut. Harus ada wadah terpadu yang menyatukan semuanya, sehingga tidak tumpang tindih kebijakan di laut.

Menyimpan Pusaka Raja

Menjadi legislator telah menyita waktunya bersama keluarga. Walau kuantitas pertemuan dengan keluarga

hingga kini. Hobi ini sudah dilakoni sejak belia di kampung. Selain renang, ia juga kerap berjoging.

Yang menarik, Syaifullah menyimpan benda-benda pusaka Raja Dayak. Ada tongkat yang disebutnya kayu puntar dan kepala kijang yang mati bukan karena dibunuh. Semuanya masih tersimpan dengan baik di kediamannya di Kalsel. Pada bagian lain, Syaifullah menjelaskan pula tradisi orang Dayak yang hingga kini masih hidup.

Bila musim panen tiba, biasanya ada tradisi aroganal (pesta besar) yang biasa dihelat oleh penduduk.



Syaifullah Tamliha bersama keluarga

foto: dok pti/iw.

minim, tapi Direktur Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Pemuda/Santri Indonesia itu, selalu mengusahakan kualitas pertemuan. Sesekali ia juga mengajak keluarga tercinta berwisata. Destinasi wisata favoritnya adalah alam yang indah.

Di rumah, Syaifullah tetaplah seorang ayah dan suami. Di rumahnya ada Patmah istri tercinta yang dinikahnya tahun 1997. Bersama Patmah, ia dikaruniai tiga anak, masing-masing Azizah, M. Ibrahim Subhi, dan Ahmad Fudhoil. Bicara soal hobi, mantan Sekretaris GP Ansor Kalsel itu, sangat menyukai renang

Dan berjudi merupakan bagian dari aroganal tersebut. “Tradisi judi masih hidup hingga kini yang tidak bisa dihilangkan dari budaya suku Dayak,” papar Syaifullah. Dahulu, ketika masih tinggal di kampung, Syaifullah juga ikut bermain judi.

“Waktu kecil saya jago main judi. Saya selalu menang bila berjudi. Saya bisa tahu kartu apa yang dipegang lawan,” katanya, seraya tertawa mengenang masa lalunya itu. Kini, tentu ia tak berjudi lagi. Justru yang disenangi sekarang adalah main *gapple* dengan teman-temannya. Begitulah kenangan di kampung halaman. ■

(mh)



foto: nita/iw

Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog Kaligi di Kabupaten Sorong, Papua Barat

Keberadaan Bulog Masih Penting

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyoroti keberadaan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) masih penting untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Wacana pembubaran Perum Bulog merupakan wacana yang tidak memiliki dasar karena Perum Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Herman saat berdialog dengan Direktur Operasional Dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kadivre Papua dan Papua Barat beserta jajaran di Komplek Pergudangan Bulog Kaligi, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (10/5/2016) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat.

“Di periode yang lalu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ingin mencoba fungsi Bulog diambil alih

oleh Pemerintah Provinsi. Kami beri waktu satu bulan, ternyata menyerah. Jadi saya termasuk orang yang tahu bagaimana kerja Bulog kerja aparatur Bulog, sehingga saya katakan kalau masih ada yang berpikiran bahwa Bulog itu dibubarkan saja, prinsip ketahanan pangannya digantikan oleh e-money, dari mana dasar pemikirannya itu,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, tidak mungkin peran Perum Bulog dengan tugas sebagai stabilisator harga dan penugasan atas stok nasional bekerja tidak ada institusinya dan hanya mengganti dengan e-money.

“Justru Perum Bulog harus diperkuat. Bahkan Perum Bulog harus ditugasi bukan hanya untuk urusan beras saja tetapi dikembalikan kepada sembako,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga mengingatkan sistem pengawasan terhadap Perum Bulog agar bekerja dengan

baik. “Utamanya para kepala gudang karena sering kali banyak kasus di Indonesia yang melibatkan kepala gudang, contoh terakhir kepala gudang di Semarang. Ini harus hati-hati, karena ini adalah keuangan negara, diaudit dengan sangat teliti oleh BPK, dan diteliti oleh internal Bulog, diaudit oleh Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), dan kami (DPR) juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi raskin ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama juga Herman mengingatkan agar Bulog tidak sembarangan dalam melakukan serapan atas gabah. “Saya adalah orang yang sangat menentang serapan gabah yang serampangan, asal *nyerap*. Saya sangat menentang itu. Saya harap Bulog hati-hati terkait hal ini,” kata Herman.

Herman meminta, agar Bulog berhati-hati selama belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk memproses gabah menjadi beras

dengan kualitas yang standar. “Jika infrastrukturnya belum cukup, saya kira jangan dilakukan,” tegasnya.

Selain melakukan kunjungan ke gudang Bulog sebelumnya, rombongan Kunker Komisi IV DPR RI berkunjung ke Kampung Saonek, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, disana mereka berdialog dengan kepala desa, dan sejumlah masyarakat di Kampung Saonek, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Herman mengatakan, pengembangan usaha berbasis perikanan Kampung Saonek tetap harus ada pendampingan, misalnya dari sektor teknologi, sistem pemasaran dan modal usaha.

“Tapi yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan listrik, karena di Kampung Saonek ini, listrik hanya ada malam hari saja dari jam 6 sore sampai jam 12 malam,” kata politisi F-PD itu.

Di samping itu, masyarakat setempat juga menyampaikan adanya kebutuhan soal interkoneksi transportasi yang lebih terjadwal agar masyarakat bisa memanfaatkan transportasi itu untuk meningkatkan berbagai potensi di Kampung Saonek itu.

“Kami (DPR) *concern* bahwa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang basisnya terhadap konservasi, tentu berbagai inovasi dan gagasan yang ada di masyarakat ini yang harus didukung. Termasuk DPR mendorong segera

dibentuknya koperasi agar secara institusi tentu ini menjadi kekuatan kolektif yang ini juga adalah sarana untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat disini,” jelas Herman.

Perhatikan Nasib Nelayan Kecil

Tim Kunker Komisi IV DPR RI yang mengunjungi Sulawesi Tenggara menyoroti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang diakui cukup tegas dan bikin takut pelaku pencurian ikan. Namun kebijakan tersebut kurang berpihak kepada nelayan kecil.

Kebijakan dan peraturan Kementerian KKP yang tujuannya mencegah illegal fishing ini, tidak diikuti dengan program lainnya yang bisa menyelamatkan nasib nelayan tradisional. “Saya mengapresiasi upaya Menteri Susi untuk mencegah pencurian ikan, khususnya oleh asing. Tapi nyatanya, kebijakan lainnya justru menambah kesengsaraan para nelayan,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono dari PDIP saat berkunjung ke Badan Karantina Perikanan di Kendari - Sulawesi Tenggara, Selasa (10/05).

Dia juga menyoroti Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 yang melarang penangkapan lobster, rajungan dan kepiting juga melarang penggunaan

Pukat Hela dan Pukat Tarik untuk menangkap ikan.

“Banyak Nelayan di Indonesia mengeluhkan tentang peraturan Menteri KKP tersebut mengenai alat tangkap tradisional yang sudah puluhan tahun mereka gunakan itu dilarang. Akibat adanya pelarangan serta penangkapan banyak nelayan yang menganggur,” paparnya.

Harusnya, penerapan aturan menteri KKP tersebut dibarengi dengan solusi dan proses pendampingan terhadap nelayan yang mengalami dampak peraturan tersebut.

Berdasarkan alasan itu, politikus PDIP ini juga mengusulkan agar Menteri Susi secepatnya mencari solusi dari peraturan yang dibuatnya.

Saat mengunjungi Balai Karantina Perikanan (BKP) Kendari, Komisi IV DPR RI mengapresiasi Balai Karantina Perikanan Kendari telah mengimplementasi peraturan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) no 1 tahun 2015, berhasil menggagalkan penyeludupan Kepiting sebanyak 316 ekor senilai 77,6 juta.

Berdasarkan Permen tersebut, penangkapan lobster (*Panulirus* sp) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas diatas delapan sentimeter, kepiting (*Scylla* spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 sentimeter, dan rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dengan ukuran lebar



Tim Kunker Komisi IV tinjau pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

foto: andri/iw

karapas di atas 10 sentimeter.

Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP telah sepakat bahwa menteri akan merevisi peraturan Menteri KKP No. 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan.

Impor Cabai Kering Kering

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Edhi Prabowo menemukan berkarung-karung cabai kering impor di Balai Karantina Pertanian, Belawan, Medan, Sumatera Utara, Senin, (2/5/2016).

Hal tersebut tentu sangat disesalkan oleh Tim Kunker Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV Rahmad Handoyo misalnya yang meyakini bahwa impor cabai merah kering ini diluar kebijakan Kementerian Pertanian. Pasalnya, selama ini pertanian hanya mengizinkan impor cabai basah, bukan cabai kering.

“Ironis dan sangat disayangkan, impor cabai saja sudah mengecewakan di tengah meningkatnya produksi cabai dalam negeri. Apalagi ini cabai kering. Tentu sangat menyakitkan petani,” ujar Rahmad.

Tidak hanya itu, Rahmad juga meyakini jika impor cabai kering itu terus dilakukan, maka tidak hanya petani cabai yang akan menjerit, namun juga akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri.

“Pada dasarnya perekonomian kita harus berpihak pada wong cilik. Dengan adanya impor cabai kering ini pastinya jauh dari tujuan itu. Oleh karena itu saya mengusulkan untuk membentuk tim gabungan dengan komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan untuk membahas permasalahan impor cabai kering ini,” paparnya.

Usai meninjau Balai Karantina Pertanian, Komisi IV DPR RI meninjau hutan Mangrove, Sicanang Belawan, Sumatera utara, Edhi Prabowo mengapresiasi pembinaan yang dilakukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup terhadap masyarakat di sekitar hutan Mangrove Sicanang, Belawan Sumatera Utara.

“Kami melihat pembinaan lingkungan hutan mangrove di wilayah ini cukup baik. Sebagaimana diketahui mangrove atau hutan bakau ini sangat penting untuk mencegah abrasi laut dan terjadinya erosi pantai. Di wilayah

ini tumbuhan tersebut sangat terjaga dengan baik,” ujar Edhi Prabowo saat meninjau hutan Mangrove, Sicanang Belawan, Sumatera utara, Senin (2/5/2016).

Tidak hanya itu, lanjut politisi dari fraksi Partai Gerinda ini, di hutan mangrove tersebut juga dibuat tumpang sari. Tumpang sari lewat pembudidayaan kepiting lunak atau kepiting soka dan udang di area hutan mangrove.

Cara tumpang sari dengan pembudidayaan kepiting soka dan udang ini sangat menarik bermanfaat dan diyakini akan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Oleh karena itu ia menilai cara ini harus dikembangkan di seluruh wilayah mangrove di Indonesia.

“Tadi sempat dijelaskan Dirjen Kehutanan bahwa wilayah seperti ini di Indonesia ada tiga juta. Kalau bisa dikembangkan ke semua wilayah tentu akan semakin baik. Saya yakin ini akan menambah penghasilan masyarakat sekaligus menjadi solusi atas masalah sulitnya mencari pekerjaan. Mereka tidak harus ke kota, cukup melakukan budidaya kepiting dan udang di hutan mangrove, sekaligus menjaga lingkungan,” pungkasnya. ■

(Nita/Ayu/Andri)



Foto: Hnd

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sumatera Utara dipimpin Ketua Komisi IV, Edhi Prabowo menemukan berkarung-karung cabai kering impor di Balai Karantina Pertanian, Belawan, Medan, Sumatera Utara

Temukan Masalah Klasik, Kurangannya Anggaran dan Minimnya Sarpras



foto: nadia/iw

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lembaga Pemasarakatan Jambi

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan kasus hukum di provinsi NTB, dengan segala keterbatasan yaitu kurangnya anggaran dan sarana prasarana. Bambang berjanji akan membawa seluruh persoalan tersebut ke dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan pemerintah.

“Memang masalah yang dihadapi di daerah yaitu masalah klasik, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga dalam proses penegakan hukum mereka terkadang harus berkorban banyak dan berhutang. Aspirasi ini tentu akan kita sampaikan, masalah kepolisian kepada Kapolri, masalah Kajati kita sampaikan ke Kejagung nanti, terutama masalah-masalah dana penanganan perkara yang sangat minim,” kata Bambang saat memimpin Rapat dengar pendapat dengan Kapolda Provinsi NTB dan seluruh jajaran penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan persoalan hukum yang paling menonjol di daerah Lombok, Mataram dan sekitarnya adalah kejahatan kekerasan pada anak, kekerasan seksual dan tawuran antar warga.

Sementara itu, di Provinsi Jambi ada kasus menarik yang menjadi sorotan Komisi III yaitu kasus penambangan emas tanpa izin atau PETI yang makin berlarut-larut.

“Saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama agar

bisa secepatnya mencari jalan keluar sehingga kegiatan penambangan liar itu dihentikan dengan segera karena merusak sistem keseimbangan alam kita, hingga ada banjir yang begitu besar di Sarolangun dan juga masih ada ratusan excavator yang aktif melakukan kegiatan tanpa izin. Sudah seharusnya polisi dibantu dengan pihak-pihak terkait agar bisa segera melakukan penghentian penambangan liar ini,” jelas Ketua Tim Kunker Mulfachri Harahap yang merupakan Wakil Ketua Komisi III dalam pertemuan di Hotel Aston Jambi.

Tim selanjutnya mengunjungi Lembaga Pemasarakatan Jambi yang secara umum kondisinya seperti Lapas di seluruh Indonesia, yakni warga binaan melebihi kapasitas tamping yang seharusnya dan masih kekurangan personel petugas lapas termasuk tenaga medisnya.

Kekurangan personel juga dialami Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, banyak pejabat kejaksaan yang sudah terlalu lama menduduki posisinya dan belum ada promosi. Hal ini menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Kejati Sulut.

Dalam paparan Kejati, kata Arsul, banyak permasalahan mengenai kurangnya anggaran, terutama dalam mengurus suatu perkara. “Saya merasa heran, Kejaksaan Agung pada APBN tahun 2015 lalu selalu mengeluhkan anggarannya kurang, tapi ternyata yang menjadi masalah adalah karena penyerapannya juga kecil. Kalau meningkatkan anggaran, salah satu yang harus diperhatikan kemampuan menyerapnya, jika kemampuan menyerapnya kecil, untuk apa juga diberikan anggaran yang besar” tekan politisi F-PPP ini. ■

(nd,ry/jk)



foto: nadia/iw

Pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum Jambi



foto: suci/hw

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Sumatera Utara meninjau pembangunan stasiun Bandara Kualanamu

Komisi V DPR Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Sumut dan NTT

Komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, pada reses Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2015-2016, tanggal 2 sampai 4 Mei 2015 menurunkan dua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) ke dua daerah. Satu Tim Kunker Komisi V DPR RI dikirim ke wilayah Indonesia bagian Barat dan satu tim dikirim ke wilayah Indonesia bagian Timur. Tim Kunker ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Jemi Francis dan Tim Kunker ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said.

Tim Komisi V di Sumatera Utara melakukan peninjauan ke berbagai obyek seperti *Double Track* Kereta Api Medan-Kualanamu, pembangunan jalan Tol Medan-Binjai, Pembangunan Penanggulangan Banjir di Medan, PDAM Tirtanadi, Balai

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan dan Kantor SAR Medan.

Mengenai Rute Kereta Api Medan-Kualanamu, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara Muhidin M. Said mengharapkan agar dibuatkan stasiun-stasiun persinggahan bagi kereta api rute Bandara Kualanamu-Medan.

“Saya melihat keberadaan kereta ini masih ada sedikit problem,” kata Muhidin disela-sela peninjauan penggunaan *double track* kereta api Bandara Kualanamu-Medan di Medan Sumatera Utara.

Problemnya itu, sambung politisi Partai Golkar ini, karena tidak ada stasiun-stasiun persinggahan. Jadi yang ada hanya dari Bandara Kualanamu ke Medan. Hal ini menyebabkan, tegas Muhidin, masyarakat yang memanfaatkan transportasi ini relatif

masih kecil. Kurang lebih 30% dari kapasitas yang ada yaitu sebanyak 308 kursi penumpang setiap jalannya. Kereta bandara ini memiliki 20 kali PP perjalanan dari Stasiun Bandara Kualanamu ke Stasiun Medan.

“Kami mengharapkan agar dibuatkan stasiun-stasiun persinggahan. Agar masyarakat sampai di Medan tidak harus mencari kendaraan lagi,” jelasnya.

Terkait pembangunan Tol Medan-Binjai, Muhidin minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara terkait masalah ganti rugi tanah pembangunan Tol Seksi 1 di Kota Medan.

“Pembangunan jalan tol Medan-Binjai menurut saya pekerjaannya sudah sesuai target yang ada terutama di Seksi III,” kata Muhidin saat Tim Komisi V DPR RI meninjau

pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Seksi III Medan.

Menurutnya, yang menjadi kendala adalah pada saat pembangunan di Seksi I yaitu di Kota Medan, ada kendala masalah ganti rugi tanah. “Terkait masalah ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumut dan Walikota Medan. Karena sudah ada kesiapan untuk ikut bersama-sama dengan Kementerian PU khususnya pelaksana pekerjaan yaitu PT. Hutama Karya,” papar anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah.

Ia mengharapkan antara Kementerian PU dan Pemda bersama-sama berkoordinasi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka ganti rugi tanah. Terutama mengenai bagaimana memindahkan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana, karena tanah tersebut milik PTPN II dan PT. KAI.

Sedangkan pembangunan penanggulangan banjir Sungai Deli di Medan, menurut Muhidin M. Said terkendala masalah sampah. Ia menyatakan, harus dilakukan saringan-saringan terutama di hulu sebelum sampai ke hilir nantinya. “Kalau dibiarkan terus menerus seperti ini, ini bisa menghambat kelancaran arus air itu.

Dan kalau terjadi apa-apa inilah yang kita khawatirkan,” jelas Muhidin.

Menurutnya, pembangunan penanggulangan banjir ini sangat penting sekali untuk Kota Medan karena satu-satunya sungai yang membelah Kota Medan adalah Sungai Deli. Masalah lain dalam pembangunan penanggulangan banjir ini, lanjut Wakil Ketua Komisi V DPR ini, yaitu masalah ganti rugi tanah bagi warga yang tinggal di pinggiran sungai.

“Daerah-daerah pinggiran sungai pemukimannya sudah padat, ini yang harus dilakukan pembenahan kembali atau bagaimana memindahkan masyarakat ini ke tempat-tempat lain,” terangnya. Hal ini agar pekerjaan dari Kementerian PU khususnya Balai Air Kementerian PU berjalan dengan baik.

Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor SAR Kota Medan. Pasalnya Kantor SAR Medan telah melakukan aktivitas dan tanggung-jawabnya dengan sangat baik.

“Kami apresiasi Kantor SAR Kota Medan yang sudah bekerja sangat luar biasa. Apalagi *respon time* nya sudah dibawah standar nasional yaitu 15 menit ke bawah dari target nasional 20 menit,” papar Ketua Tim Komisi V DPR RI Muhidin M Said usai pertemuan

dengan Kepala Kantor SAR Kota Medan di Sumatera Utara.

Menurut Muhidin, Kantor SAR Kota Medan bisa mempersingkat waktu, begitu ada masalah atau kejadian dibawah 15 menit SAR Kota Medan sudah berada di lapangan atau tempat kejadian.

Bahkan, lanjutnya, standar internasional yang 20 menit sudah terlampaui. “Waktu kami berkunjung ke SAR Swedia dan Norwegia respon timenya 20 menit,” ungkapnya.

Tapi SAR Medan ini sudah bisa di bawah 15 menit, semua anggotanya sudah berada di lapangan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor SAR Kota Medan yang sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh penggiat-penggiat SAR yang ada di Kota Medan,” tegasnya.

Dukung Bandara Baru NTT

Sementara itu, Tim Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mengunjungi berbagai pembangunan infrastruktur diantaranya ke Bandara El Tari, Peninjauan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Foto: kresno/iw

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI berkunjung ke PDAM Kupang, Nusa Tenggara Timur

Baumata Barat, PDAM Kota Kupang dan peninjauan ke Perumahan dan Pemukiman TNI AU, serta mengunjungi Kantor Redaksi Pos Kupang.

Komisi V DPR RI mendukung rencana pembangunan bandara baru sebagai pengganti Bandara El Tari yang ada di Kota Kupang, NTT. Mengingat meningkatnya jumlah penerbangan dari dan ke Kupang dari tahun ke tahun.

Dibangunnya bandara baru di Kota Kupang tak lain karena NTT saat ini merupakan destinasi (tujuan) wisata

Angkasa Pura I dan masih menggunakan sebagian lahan milik TNI Angkatan Udara. Pembangunan bandara baru di Kota Kupang juga dikarenakan kenyamanan dan pelayanan bandara yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Bandara Tambolaka dan Komodo.

“Kalau Angkasa Pura I tidak bisa dikembangkan, kita sudah minta agar diserahkan ke Kemenhub dan dikelola dengan menggunakan APBN. Tapi AP I sudah siapkan Rp 85 miliar,” tambah Fary Djemi.

ucap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Kupang, NTT.

PDAM memiliki jumlah sambungan 35 ribu Sambungan Rumah (SR) dengan kapasitas produksi air baku 565 lit/det. Ketersediaan air sangat penting bagi warga kota Kupang, karena iklim Kota Kupang yang panas dan kering.

Menurut anggota Tim Kunker Komisi V Rendy M. Affandy Lamadjido, tidak efisien jika PDAM hanya mengutamakan air tanah saja. Dia mempertanyakan, kenapa tidak dibuat embung-embung atau bendungan untuk menampung air bersih. Sebab anggaran pengadaan pipa untuk pendistribusian air ke penduduk itu sudah ada di APBN.

Komisi V DPR RI berharap target prosentase pemenuhan air bersih di kota Kupang semakin hari semakin meningkat. “Target pencapaian 50% akan dianalisa kembali dan akan ada penambahan target pemenuhan air bersih ke depannya. Mengenai ketidaksepahaman pembagian peranan antara Kabupaten Kupang dan Kota Kupang harus diselesaikan” ujar Fary.

Sedangkan terkait dana desa Komisi V DPR RI telah bersepakat untuk menghindari sistem kontrak untuk pendamping dana desa. “Kesepakatan Komisi V dengan Menteri Desa adalah manfaatnya dana desa, siapa yang menerimanya harus jelas, dan diharapkan penggunaannya melalui pemberdayaan masyarakat setempat,” jelas Fary Djemi.

DPR minta untuk memanfaatkan anak-anak atau masyarakat setempat, bagaimana membangun pertemanan untuk penyaluran dana desa. Kalau pendamping desa didatangkan dari luar, mereka tidak akan bisa diharapkan, karena orang luar tidak tahu kondisi desa yang mereka datang, tidak mengetahui tokoh-tokoh setempat, Jadi akan sulit untuk menyalurkan dana desa tersebut

Lebih lanjut, ia menambahkan, bahwa dari pelaksanaan penyaluran dana desa tahun 2015, masih banyak kekurangan dan perlu diperbaiki.

“Komisi V DPR RI telah melakukan evaluasi penyaluran dana desa dan banyak kekurangan dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Tahun ini diharapkan lebih baik,” kata politisi Partai Gerindra itu. ■



Foto: kresno/iw

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis berkunjung ke RRI Kupang, Nusa Tenggara Timur

yang makin tahun makin meningkat, baik jumlah wisatawan manca negara maupun domestik. Per Agustus tahun 2015, jumlah penumpang yang ke NTT sebanyak 121.094 orang, sementara yang berangkat sebanyak 121.229 orang.

Selain itu, dibangunnya bandara baru di Kupang adalah untuk membuka jalur baru Kupang-Dili (Timor Leste) dan Kupang-Darwin Australia. “Menyangkut slot penerbangan antara Kupang-Dili dan Kupang-Darwin sebanyak 21 slot sudah terpakai. Tentu menambah slot penerbangan, perlu ada MoU baru G to G. Dirjen Perhubungan Udara sudah menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti atas permintaan MoU slot yang baru ini,” kata Fary Djemy di Kupang.

Ditambahkannya, saat ini, Bandara El Tari yang masih menggunakan dana

Dalam kunjungan ke PDAM ini, Tim Komisi V membahas beberapa hal menyangkut air bersih di kota Kupang. Antara lain menyangkut kesepakatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Provinsi dimana ada mekanisme dibangun bersama. Komisi V berharap ini bisa diselesaikan, sehingga masyarakat dapat menggunakan air bersih dengan baik.

Kemudian, mengenai pemenuhan kebutuhan sumber air baku. “Sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan Gubernur dan Walikota, dan berharap ada permintaan dukungan untuk pembangunan waduk/bendungan. Tetapi masih ada persoalan sosial dan diharapkan bisa diselesaikan sehingga dapat dikembangkan. Nanti kita akan memberikan dukungan apabila persoalan tersebut sudah selesai”



Foto: mastur/w

Tim Kunker Komisi VIII meninjau kampus IAIN Pontianak, Kalbar

Komisi VIII Pantau Pendidikan Islam, P2TP2A dan Sosialisasi BPIH

Trend fase perubahan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), secara keilmuan merupakan proses mengintegrasikan keilmuan Islam dan keilmuan umum (sains, sosial dan humaniora). Hal tersebut tentu menjadi cita-cita besar bagi institusi, sebuah cita-cita yang masih panjang dan terus berkembang.

UIN yang muncul saat ini merupakan institusi yang menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar atau perkembangan kehidupan sosial ekonomi nasional maupun global. Dengan demikian, UIN yang dahulu menjadi tempat mencetak para *muballigh* cenderung berupaya menjadi institusi yang ingin mengambil

bagian dalam pertempuran industri pendidikan.

Melihat fenomena tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII Saleh P. Daulay mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kampus IAIN Pontianak dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kampus perjuangan umat Islam ini ke depan dan proyeksinya seperti apa. Hal itu ditegaskannya saat pertemuan dengan Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar di aula kampus tersebut, Selasa (3/5) lalu. Hadir pula Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kemenag Anton.

“Jadi tidak usah muluk-muluk mau berubah jadi UIN dan segala macam. Nanti kalau sudah kuat infrastrukturnya, dosen sudah cukup dan mahasiswa memang membutuhkan, itu kita silakan,”

ujar Saleh menandakan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq mengharapkan kalangan perguruan tinggi Islam harus setia dan istiqomah pada IAIN jangan menjadi UIN. Pengalaman selama ini, yang telah berubah menjadi UIN maka fakultas agama selalu menjadi anak tiri.

Kasus Kekerasan Anak Marak

Keprihatinan terhadap anak-anak muda Aceh yang kerap kali identik dengan ganja (pemakaian narkoba), dan bisa memicu maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diungkapkan Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo, Anggota Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja ke Kantor P2TP2A Provinsi Aceh baru-baru ini.



Foto: naefuroji/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati berdialog dengan Kepala BP3A dan Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, Politisi Dapil IV Jateng ini mendorong agar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh perlu bersinergi dengan Dinas Syariah Aceh untuk bahu-membahu menangkal maraknya penyebaran pornografi dan narkoba.

“Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya,” saran Rahayu. Politisi Gerindra ini juga menekankan bahwa pemahaman akan bahaya (efek negatif) teknologi informasi melalui berbagai media sosial (medsos) yang mengandung konten pornografi, cyber sex, faham radikal serta aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi orang tua juga perlu mendapat pembelajaran.

Butuh solusi kreatif misalnya melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas, dengan menjelaskan risiko tertular berbagai penyakit berbahaya seperti HIV AIDS jika melakukan seks pranikah secara tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, di Pakistan yang notabene juga mayoritas muslim

dengan pakaian tertutup (hijab) namun kasus pemerkosaan di sana juga tinggi.

Daftar Tunggu Haji

Tingginya minat masyarakat Aceh untuk menunaikan ibadah haji belum bisa diakomodir akibat masih belum bertambahnya kuota haji yang diperoleh. Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Sodik Mudjahid menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh yang diwakili Asisten II Sekda Aceh H. Azhari Hasan dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Syaehul Badruddin, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Kadis Sosial Aceh, Kepala BPBD Aceh, Kabiro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Ketua Bazda Aceh, Tim pendamping dari mitra Komisi VIII DPR RI serta tokoh masyarakat di Kantor Gubernur Aceh, baru-baru ini.

Menjawab hal tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya menegaskan bahwa akan ada banyak peningkatan pelayanan yang diberikan kepada semua jemaah haji tahun 2016 ini. “Antara lain memberikan jatah makan 24 kali selama di Mekkah dibandingkan tahun 2015 lalu hanya 15

kali. Menambah layanan bis shalawat dengan rasio 91 persen dari jumlah jemaah dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 80 persen,” ungkap politisi Gerindra ini.

Pihak penyelenggara haji juga akan menambah frekuensi manasik haji sesuai dengan aspirasi masyarakat (jemaah) serta peningkatan kualitas pelayanan bis antar kota agar tidak terulang lagi kasus bis mogok.

Yang tak kalah pentingnya, politisi Dapil Jabar I ini mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI baru saja merampungkan pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 1437 H/2016 M dengan hasil penurunan BPIH senilai 132 dollar (dari 2.717 dollar menjadi 2.585 dollar) atau dalam rupiah setara Rp. 34.641.304.

“Untuk tahun ini BPIH 2016 akan diumumkan dalam mata uang rupiah sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dalam pelunasannya. Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI sepakat BPIH hanya dipatok dalam mata uang rupiah dan Saudi Arabia Riyal (SAR),” papar Sodik.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Aceh, HM, Daud Pakeh tetap berharap memperoleh penambahan kuota haji untuk Aceh, mengingat bahwa *waiting*



Foto: naefuroji/fw

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan ASPDB dari Kemensos kepada Provinsi Aceh.

list (daftar tunggu-red) haji Aceh saat ini mencapai sekitar 24 tahun.

“Kuota haji Aceh saat ini hanya sekitar 31 ribu jamaah, sementara normalnya dulu mencapai 38 ribu sehingga potensi penumpukan daftar tunggu jamaah kian membengkak,» ujar Daud.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengakui untuk tahun 2016 ini belum bisa memperoleh tambahan kuota haji, walaupun segala upaya pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi sangat intens dilakukan.

“Komisi VIII DPR RI bahkan mengundang Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk membantu proses lobi penambahan kuota, namun hasilnya belum mengembirakan dan kita masih harus bersabar,» jelas Sodik.

Usai pertemuan dengan Perwakilan Gubernur Aceh dan jajaran SKPD, Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyerahkan bantuan dari Kemenag RI senilai Rp 3,5 miliar, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) Provinsi Aceh dari Kemensos RI senilai Rp 1,3 miliar untuk 387 orang dan Dana Dekonsentrasi Kemen PP dan PA untuk Provinsi Aceh senilai Rp 616 juta.

Kekurangan PNS

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di Provinsi Papua Barat sangat kekurangan tenaga PNS.

Moratorium PNS yang kini masih diberlakukan perlu dibuka khusus untuk Papua Barat.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Kanwil Kemenag Papua Barat, Senin (2/4). Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti yang ditemui usai pertemuan di Manokwari, mengatakan, “Untuk Papua Barat mestinya ada kelonggaran khusus, agar PNS-nya lebih banyak untuk mengurangi beban kerja yang juga berat.”

Kekurangan PNS di Kanwil Kemenag Papua Barat, sambung politisi Partai

Golkar itu, berdampak cukup luas. Kekurangan tenaga penyuluh agama atau rohaniawan sangat jelas terlihat. Banyak rangkap jabatan dilakukan, karena kekurangan PNS. Padahal, keberadaan penyuluh agama sangat penting untuk membendung kasus-kasus KDRT di Papua Barat.

“Mengapa banyak kasus kekerasan seksual di Papua Barat, itu salah satunya adalah kekurangan tenaga penyuluh di Kanwil Kemenag. Untuk itu, Kemenag pusat harus mendorong agar Papua Barat diberi kelonggaran dibanding daerah lain dalam menerima PNS baru. Dengan begitu pemahaman agama masyarakatnya bisa jauh lebih baik dengan penambahan tenaga penyuluh agama,» harap Endang.

Politisi dari dapil Jateng IV ini menyerukan agar pemahaman agama yang holistik harus masif dilakukan kepada masyarakat di Papua Barat. Itulah tugas para penyuluh agama setempat. Apalagi, penggunaan miras di tengah masyarakat masih cukup tinggi. Lagi-lagi ini tugas para penyuluh agama di Papua Barat untuk menegakkan aturan pelarangan miras.

Sebelumnya, kondisi kekurangan tenaga PNS juga sudah disampaikan Kabag TU Kanwil Kemenag setempat. Katanya, banyak jabatan kosong yang terpaksa dirangkap oleh satu pegawai. PNS-terus berkurang, karena pensiun, wafat, dan mutasi antar instansi. Sementara saat yang sama masih ada moratorium PNS. ■

(Mastur, Ocjie, Husen)



Foto: husen/fw

Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI Achmad Mustaqim menyerahkan bantuan ke Kemenag Manokwari, Papua Barat

Komisi X DPR Pantau Perpustakaan, Pariwisata dan Pendidikan di Daerah



Foto: singgih/iw

Komisi X DPR RI meninjau SDN 68/14 Kota Jambi

Dalam Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah, yaitu ke Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Kunjungan ke tiga daerah tersebut salah satunya untuk menyerap aspirasi yang berkaitan dengan Mitra Komisi X yaitu dibidang pendidikan, pariwisata, perpustakaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan daerah serta ekonomi kreatif.

Pembenahan Besar-besaran

Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Jambi menggelar pertemuan dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya serta dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Jambi, Selasa (3/5/16). Gubernur Jambi Zumi Zola dalam paparannya menyampaikan gambaran umum beberapa permasalahan di Provinsi Jambi terutama dalam sektor pendidikan diantaranya, keterbatasan infrastruktur pendidikan dan tenaga guru.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam paparannya menyampaikan bahwa ada sekitar 30 % anak usia 3-6

tahun yang belum terlayani pendidikan PAUD. Sementara ada 0,25 % yang belum memperoleh layanan SD, 3 % belum memperoleh layanan SMP dan 16,80 % belum memperoleh layanan SMA.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X Elviana meminta data yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan dari sektor pendidikan di Jambi terutama kekurangan-kekurangan tenaga guru di setiap sekolah yang ada di Jambi.

Menurut Elviana, angka 30 % atau 76.602 penduduk Jambi yang belum terlayani pendidikan PAUD, ada 31.962 penduduk Jambi yang belum memperoleh layanan SMA ini cukup memprihatinkan sekali. "Saya minta data sebaran yang riil, karena 30 % dan 16,80 % itu angka yang sangat tinggi, saya maunya data perkabupaten," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dari Dapil Jambi tidak menampik bahwa pendidikan di Provinsi Jambi sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan besar-besaran.

"Kedepan Komisi X akan meminta

pemerintah pusat bisa memberikan dana segar yang cukup dari APBN untuk Provinsi Jambi, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan," ungkap Sutan atau akrab disapa SAH.

Lebih lanjut SAH menyampaikan, melalui Komisi X akan memperjuangkan permasalahan yang disampaikan Gubernur Jambi maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Melalui Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi X terutama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal permasalahan pendidikan di Jambi.

Namun, SAH berharap pemkab/kota di Provinsi Jambi juga mampu mengatasi beberapa permasalahan yang disampaikan tadi dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Perpustakaan Kalimantan Tengah

Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib, menilai fasilitas dan jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah (Kaltim) sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Kaltim perhatian terhadap peningkatan minat baca masyarakat.

"Saya lihat fasilitas perpustakaan sudah cukup bagus. Informasi dari pihak perpustakaan bahwa anggota perpustakaan pada Tahun 2014 mencapai 4.500 orang sekarang sudah hampir 6.000 orang berarti sudah ada peningkatan sekitar 25 persen. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, berarti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki perhatian yang luar biasa terhadap peningkatan minat baca masyarakat," kata Lathifah, saat bersama-sama Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kaltim, Jalan Ade Irma S.N Palangka Raya, Selasa (3/5/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, mengutarakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang maju, salah satunya

adalah dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui fasilitas perpustakaan.

“Kami (Komisi X-red) mengapresiasi pengelola perpustakaan ini, meskipun tidak mendapatkan tambahan buku-buku dari Perpustakaan Nasional, tetap berupaya untuk mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Selain itu, Lathifah juga melihat warung internet berteknologi digital yang berada di perpustakaan ini banyak diminati mulai dari siswa sekolah dasar. dan mereka sudah cukup baik dalam menggunakan alat-alat teknologi yang menggunakan jaringan internet tersebut.

“Saya berpesan kepada para pustakawan untuk terus mengupdate pengetahuan yang baru, karena kalau tidak, nanti akan kalah dengan pengunjungnya,” katanya.

Namun dia memprihatinkan atas penilaian bahwa minat baca secara nasional masih sangat rendah. Komisi X mendorong Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan sosialisasi minat baca di seluruh penjuru tanah air,” tegas Lathifah, asal dari Dapil Jawa Timur V.

Menurunnya Kunjungan Wisata ke Bantimurung

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Rifky Harsya, memimpin langsung kunker ke Provinsi Sulawesi Selatan didampingi 17 anggota diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latif, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel di Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar, Rabu (04/5). Sekda mewakili Gubernur Sulsel, karena Gubernur Syahrul Yasin Limpo tengah bertugas ke Luwu Timur.

Seusai pertemuan, rombongan Komisi X DPR RI langsung menuju Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Kabupaten Maros. Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu obyek wisata alam yang potensial karena memiliki kawasan Karst seluas 43.750 hektare, memiliki flora fauna endemik, memiliki koleksi 247 jenis kupu-kupu.

Selain itu, memiliki 709 jenis flora, 730 jenis fauna dan 52 jenis diantaranya



foto: hindra/tw

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Rifky Harsya, memimpin langsung kunker ke Provinsi Sulsel

dilindungi undang-undang, serta memiliki 154 jenis burung. Disamping itu di Taman Nasional Bantimurung ini juga memiliki 216 gua alam dan 41 gua pra sejarah.

Menurut Politisi Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya, dalam konteks kepariwisataan, Taman Nasional Bantimurung saat ini memiliki permasalahan yaitu menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara atau domestic. Khususnya wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan sebesar 80 %. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 tiket masuk bagi wisatawan mancanegara dinaikkan dari Rp.50.000 menjadi Rp.255.000. Pengelola mengharapkan agar tiket masuk bagi wisatawan mancanegara dapat diturunkan kembali setidaknya sebesar Rp.75.000.

“Inilah hasil temuan tim kunker Komisi X DPR. Kami berharap rekomendasi dari Komisi X DPR RI akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam membenahan beberapa tujuan wisata di Provinsi Sulsel. Kami juga minta pemda memperhatikan fasilitas akses menuju lokasi tujuan wisata,” katanya

Anggota Komisi X Laila Istiana dari Fraksi PAN mengomentari, dengan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Bantimurung, ternyata tidak membawa perubahan apapun. Hal itu

bisa dilihat saat Komisi X meninjau langsung kondisi di lapangan bahwa Taman Nasional ini memang tidak layak dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Ia juga menyayangkan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat kurang terutama untuk promosi wisata bagi wisatawan mancanegara dan lokal.

Seusai mengunjungi Taman Nasional, tim Komisi X melanjutkan tinjauannya ke Koperasi Syariah Pakkamase yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang antara lain memproduksi berbagai produk industri kreatif yaitu kerajinan akrilik dan kain perca.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almayshari, koperasi ini dalam perjalanannya masih membutuhkan bantuan modal. Komisi X DPR RI berpandangan bahwa industri kreatif seperti ini patut untuk dikembangkan karena mampu mendorong dan menggerakkan ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang dengan positif dan produktif.

“Bahwa dengan modal atau belanja barang Rp. 5.000.000 dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 dengan kata lain, keuntungan yang didapatkan sebesar 100% lebih dan kami sangat mensupport keberadaan koperasi ini dengan memberikan dana pinjaman melalui koperasi induk,” kata Abdul Kharis. ■

(skr/as/hr)

Pelaku Kekerasan Seksual Perlu Dihukum Mati



Maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat geram dan cemas. Hingga Mei tahun ini, sesuai data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan seksual dan tindak pidana terhadap anak dari segi kualitas dan kuantitas menunjukkan kenaikan dengan persentase kenaikan sekitar 15% dibanding tahun lalu.

Kasus yang sangat menghebohkan terhadap seorang pelajar SMP bernama Yuyun (14), warga Dusun 5 Desa Kasien Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada 2 April 2016. Dia diperkosa oleh 14 anak dan dibunuh.

Kasus ini belum hilang dari ingatan kita, masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus permerkosaan yang sangat sadis kepada korban bernama Eno. Kasus yang terjadi di Tangerang ini kembali menimbulkan kesedihan yang mendalam bukan hanya untuk keluarga korban, namun juga kesedihan bagi seluruh ibu dan perempuan Indonesia.

Salah satu penyebab, berulangnya kasus kekerasan seksual adalah belum adanya saksi tegas terhadap pelaku. Hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual dinilai tidak memberi efek jera. Padahal tingkat kekerasan seksual terhadap anak sudah pada tingkat mengkhawatirkan (darurat) sehingga perlu usaha maksimal untuk bisa memperkecil peluang kasus ini.

Atas kejadian ini, Presiden Joko Widodo berkomentar, maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ikhwal kegentingan. Bahkan pemerintah sudah menganggap bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa. Dan

ia menginginkan supaya penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dilakukan secara khusus.

Sebagai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk hukuman tambahan bagi pelaku kekerasna pada anak. Maksud diterbitkan Perppu, karena kalau merevisi undang-undnag akan lebih lama prosesnya, sementara tuntutan tentang perlindungan bagi anak-anak sudah semakin mendesak.

Salah satu bentuk hukuman yang menjadi kajian pemerintah adalah kebiri kimia, karena selama ini hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinilai tidak menimbulkan efek jera.

Sejumlah negara yang disebut telah menerapkan hukuman kebiri kimia antara lain Korea Selatan, Turki dan Moldava. Diharapkan hukuman kebiri ini dapat memberi efek jera dan bisa membuat orang harus berfikir seribu kali kalau akan melakukan kejahatan seksual pada anak.

Hukuman Mati

Namun, bagi Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partanoan Daulay, sanksi kebiri tidak cukup, pelaku kekerasan seksual

pada anak harus dihukum mati. Apakah ada jaminan, tegasnya, dengan sanksi kebiri ini maka semua kasus itu akan tereliminasi.

Pemerintah perlu memikirkan lagi mengenai hukum kebiri, karena ia coba pelajari tentang kebiri kimiawi, hal ini membuat disfungsi kalau kami membuat sesuatu yang disfungsi berarti kami melanggar kode etik.

Mungkin untuk menghentikan hasrat seksual si pelaku diberi hukuman kebiri kimia bisa, tapi apakah kebiri ini bisa serta merta



Ketua Komisi VIII DPR RI
Saleh Partanoan Daulay

foto: kresno/iw

menghentikan apa yang menjadi akumulasi dari penyebab ia melakukan kejahatan itu, misalnya kemarahan dan dendam si pelaku.

Kemudian persoalannya tentang biaya yang tidak murah, satu kali suntik kebiri kimiawi membutuhkan biaya sekitar 750 ribu sampai satu juta rupiah dan efeknya berlaku hanya tiga bulan. "Secara pribadi saya mendukung untuk diberlakukan hukuman mati, kita bisa memberikan hukuman mati kepada narkoba/bandar narkoba dan teroris kenapa tidak pada kejahatan seksual yang melampaui batas-batas kemanusiaan ini,"ujarnya belum lama.

Tetapi memang tidak bisa disamaratakan bahwa semua yang berjenis kekerasan seksual itu dihukum mati, memang betul-betul dalam kasus yang berat dan terbukti memang itu sangat berat melukai perasaan kita sebagai bangsa,"tambahnya.

Lebih lanjut ia menambahkan untuk diberlakukan denda bagi pelaku, guna untuk memberi pengobatan jalan bagi korban dengan memanggil psikolog. Karena yang paling penting adalah perlindungan bagi korban pemerkosaan.

"Apalagi di indoneisa budaya "keperawanan" sangat disucikan dan dijunjung tinggi. Kita selama ini terlalu terfokuskan memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku, padahal jika pelaku di vonis 15 tahun begitu selesai hukuman di bebas tetapi korban tidak pernah melupakan derita yang dialaminya, Penting pelaku dikenakan denda, karena korban sakit dan membutuhkan uang untuk panggil psikolog, korban perlu bantuan konselling agar dia sehat dalam jasmani dan rohani setelah kejadian pemerkosaan. Kalau ada uang bisa kita pakai untuk panggil dokter demi menata hidupnya kedepan yang lebih baik,"tuturnya.

Politisi fraksi PAN ini menambahkan kedepannya harus ada pemantauan yang dilakuakn oleh pihak kepolisian tentang tempat yang rawan pemerkosaan, "perlu dibuat peta rawan pemerkosaa, sehingga pemerintah bisa melakukan antisipasi, masyarakt juga harus berpartisipasi untuk menjaga supaya tidak terjadi kekerasan seksual seperti ini mulai dari rumah, sekolah, tempat bermain dan pergaulannya anaknya seperti apa," katanya.



foto: kresno/iw

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Ledia Hanifa

Hilangkan Pemicunya

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah bahwa kekerasan seksual pada anak di bawah umur itu bukan yang baru terjadi, tapi sudah lama berulang dan hampir bisa dikatakan tidak terselesaikan dengan baik. Jadi ini peristiwa yang sangat menyedihkan dimana negara kurang perhatian terhadap persoalan-persoalan seperti ini.

"Kita harus perhatikan faktor penyebabnya. Pertama, pemerintah harus sosialisai mengenai Undng-undang Perlindungan Anak supaya semua pihak/stakeholder yang di sebutkan di dalam UU itu paham tentang kewajiban dan hak mereka. Kedua, yang kaitannya dengan implementasi dari Undang-undang ini harus sangat mendetail dan jelas. Ketiga, pemicu (trigger) harus dihilangkan , narkoba, minol dan pornografi semua harus dihilangkan, harus paralel sebab kalau satu-satu tidak akan selesai, dia akan muncul lagi secara berulang," ujarnya saat diwawancara Parle.

Lebih lanjut politisi fraksi PKS ini mengatakan, karena kalau *trigger* ini dibersihkan artinya sudah tidak muncul lagi bisa meminimalisir kekerasan seksual. Tinggal bagaimana memperbaiki sudut pandang orang. Kita harus impress saja yang belum pernah di jalani, tetapi yang paling penting pemerintah serius

mengeksekusi semua undang-undang yang sudah dibuat.

Selanjutnya, politisi Dapil Jawa Barat ini meminta agar anak yang terkena hukuman itu harus segera/ dibarengi dengan rehabilitasi (diperbaiki perilakunya) dengan harapan begitu keluar dia sudah ter rehabilitasi. "Persoannya anak-anak ini ditahan dimana? Kalau ditahan bersama dengan orang dewasa susah untuk rehabilitasinya,"tegasnya.

Sedangkan menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh, penerbitan Perppu soal pemberatan hukuman bagi penjahat seksual adalah salah satu langkah nyata memerangi kejatan seksual terhadap anak.

"Tentu ini bukan satu-satunya solusi, perlu ada langkah-langkah lain guna mengurai permasalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari hulunya. Di antaranya faktor peredaran **narkoba, minuman beralkohol, materi-materi pornografi,**" ujarnya

Perppu tersebut, kata dia, berisi tentang pemberatan hukuman yang diklasifikasi, mulai dari pidana penjara 20 tahun hingga hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Di samping itu, juga diatur hukuman tambahan berupa kebiri serta pemasangan chip yang mendeteksi keberadaan pelaku pasca di penjara.

Selain itu, lanjut dia, identitas pelaku juga akan terus dipublikasikan meskipun yang bersangkutan sudah menjalani hukuman pokok. "Hukuman tambahan kebiri bisa dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang residivis dan pelaku paedofilia. Teknisnya bisa dilakukan waktu dia di dalam maupun sebelum keluar,"katanya.

Kemudian, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengingatkan pemberatan hukuman harus rasional. Menurutnya, ketimbang dikebiri lebih baik pelaku dihukum seumur hidup.

"Menaikkan ancaman atau sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sah saja. Tapi yang harus diingat pemberatan hukuman tetap harus rasional. Sebab pelaku tetap memiliki hak untuk hidup dan hak tidak disiksa. Sedangkan dasar dari kebiri adalah menyiksa,"katanya. ■

(ria,mp)



Foto: dok BKSAP

Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini berbicara pada Women in Parliament Global Forum 2016 di Yordania

Dari Pertemuan WIP di Yordania

Memberdayakan Perempuan Secara Politis

Panggung politik tak melulu menjadi hegemoni laki-laki. Politik modern menuntut kesetaraan gender. Perspektif perempuan harus disertakan dalam berbagai produk kebijakan publik. Pemberdayaan perempuan secara politis pun jadi keniscayaan.

Menyertakan partisipasi perempuan dalam politik berarti mengajaknya berperan di jantung kebijakan publik. Perspektif perempuan bisa mewarnai kebijakan negara baik di eksekutif maupun legislatif. Produk legislasi di parlemen pun kini mendapat sentuhan perspektif perempuan yang konstruktif.

Perempuan dan politik sudah kian dekat dan hampir sulit dipisahkan lagi. Lewat aktivitas politiklah para perempuan di dunia bisa ikut mengambil keputusan penting menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, para perempuan dari seluruh parlemen di dunia mendesak pemberdayaan secara politis.

Semua ini terungkap dalam pertemuan *Women in Parliaments*

Global Forum (WIP) 2016 di Yordania. Pertemuan yang dihelat pada awal Mei lalu itu dihadiri 260 anggota parlemen perempuan dunia dari 89 negara peserta. Acara dibuka oleh perwakilan Raja Yordania/Ketua Majelis Tinggi (Senat), Faisal Fayez, di ruang sidang Parlemen Yordania. Inilah pertemuan para legislator perempuan pertama yang diadakan di kawasan Timur Tengah.

DPR RI telah mengirim delegasinya ke pertemuan tersebut, yaitu Sarwobudi Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan) dan Amelia Anggraini (F-Nasdem). Amelia saat ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti pertemuan tersebut mengatakan, banyak isu perempuan global yang dibahas. Dari isu konflik Timur Tengah hingga bencana alam, semuanya

menuntut partisipasi perempuan.

Para politisi perempuan dari berbagai parlemen dunia merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitasnya. “Saya menghadiri dua working group. Satu di forum *World Economic Empowering and Health*. Sesi kedua, saya memberi pandangan tentang *political violence against to women*. Perempuan masih rentan terhadap kekerasan politik dan ketidakadilan,” jelas Amelia.

Kekerasan politik yang dimaksud adalah menutup akses perempuan terjun ke panggung politik. Stigma yang merendahkan kemampuan perempuan dalam berpolitik, sambung Amelia, juga bagian dari kekerasan politik yang dimaksud. Ia menuntut agar para calon anggota legislatif (caleg) perempuan jangan melulu ditempatkan di nomor sepatu dalam daftar caleg. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Menurut Amelia, untuk member-

dayakan perempuan secara politis, harus dimulai dari hulunya, yaitu rekrutmen politisi perempuan oleh parpol. Perempuan harus terlibat dalam struktur organisasi parpol dengan menjadi pengurus. Saat ini dengan kuota perempuan 30 persen dalam daftar caleg saja, keterwakilan perempuan di DPR RI cuma 17,3 persen pada pemilu 2014, turun satu persen dari pemilu 2009 yang mencapai 18,3 persen. Masih jauh dari harapan.

Perlu ada *punishment* bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg sesuai amanat UU parpol. *Punishment* ini penting sebagai bagian dari kampanye kesetaraan gender. Di Rwanda dan Algeria, misalnya, keterwakilan perempuan di parlemen sudah mencapai 50 persen. Namun, capaian persentase keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda didahului dengan revolusi.

Perlu perubahan paradigma, memang, untuk menyadarkan

pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Selama ini banyak faktor yang menghambat perempuan masuk parlemen. Diantaranya, kata Amelia, biaya politik yang luar biasa besar, kurangnya pendidikan politik, dan kurangnya kaderisasi calon politisi perempuan.

Faisal Fayeز sendiri saat membuka acara di Yordania, mengutarakan, selain di parlemen, perempuan juga penting berada di semua lini kebijakan suatu negara. Bahkan, perempuan memiliki peran utama dalam perundingan perdamaian dan pembangunan kembali di daerah konflik. Tanpa melibatkan perempuan, tujuan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai.

Lalu, apa pentingnya ada sentuhan perempuan dalam kebijakan publik?

Amelia yang anggota Komisi IX DPR RI ini menjawab lugas, “Penting sekali kehadiran perempuan sebagai pembuat kebijakan publik. Dia bisa mengawal, memformulasikan, dan mengawasi semua kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Contoh, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, itu kalau tidak perempuan yang menyuarakan, siapa yang akan menyuarakan. Kita desak RUU itu masuk dalam RUU prioritas.”

Singkatnya, keberadaan perempuan di parlemen akan mengawal kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. “Di semua lini kebijakan perempuan harus ada,” tandasnya lagi. Indonesia termasuk beruntung pernah memiliki presiden perempuan Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004. Kepala daerah juga banyak diisi perempuan. Bahkan, kini delapan kursi menteri diisi perempuan. Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas intelektual para politisi perempuan yang sedang berkiprah.

Perempuan harus terlibat dalam struktur organisasi parpol dengan menjadi pengurus. Saat ini dengan kuota perempuan 30 persen dalam daftar caleg saja, keterwakilan perempuan di DPR RI cuma 17,3 persen pada pemilu 2014, turun satu persen dari pemilu 2009 yang mencapai 18,3 persen. Masih jauh dari harapan.

foto: naefuroji/iw

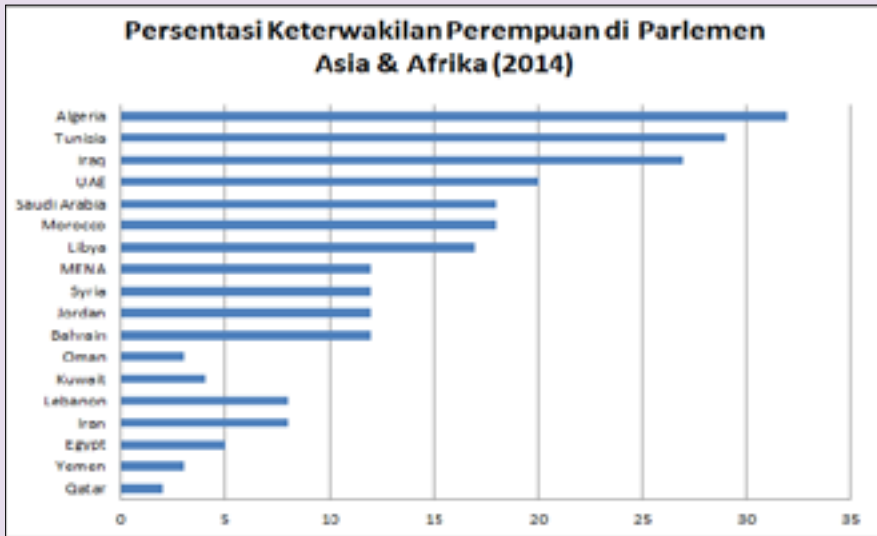


Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini

Fakta ini disampaikan delegasi Indonesia di hadapan forum parlemen perempuan dunia di Yordania. Acara yang juga dihadiri para pemimpin dan mantan pemimpin pemerintahan dunia itu, mendorong agar perempuan diberdayakan kembali untuk mendapatkan hak-hak politiknya. Ditambahkan Amelia, saat ini secara kuantitatif perempuan di parlemen memang rendah. Tapi, secara kualitatif perempuan harus membuktikan diri mampu menunjukkan kapasitasnya.

Politisi dari dapil Jateng VII ini, menyerukan agar wakil rakyat perempuan di DPR RI jangan hanya mengisi komisi-komisi *maenstream*, seperti Komisi VIII, IX, dan X yang di situ politisi perempuannya cukup banyak. Komisi lainnya juga membutuhkan partisipasi perempuan yang cukup. “Perempuan juga penting ada di Komisi XI yang mengawal anggaran agar berpihak kepada perempuan.”

Amelia mengaku sudah membagi semua pengalaman Indonesia pada pertemuan di Yordania itu. Pertemuan para politisi perempuan itu sekaligus sebagai momentum untuk menyegarkan kembali pentingnya dunia mengakui hak-hak kaum perempuan. “Ruang politik adalah ruang yang menjanjikan



sumber: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

bagi perempuan. Perlu diingat, perempuan punya banyak kelebihan. Perspektifnya lebih objektif, tulus, dan telaten. Semua aspek ini mungkin saja tidak dimiliki laki-laki.”

Dibandingkan dengan negara-negara Asia, Indonesia masih lebih baik soal keterwakilan perempuan di parlemen. Ketika negara lain masih membicarakan kuota, Indonesia sudah menetapkan kuotanya bagi perempuan. Negara-negara seperti Maldiv, Pakistan, Vietnam, Burma, dan Kamboja, partisipasi politik perempuan

masih sangat rendah. Dukungan pemerintahnya sangat kurang.

Sementara membincang keterwakilan perempuan di negara-negara Timur Tengah, selalu yang menjadi tembok penghambat adalah budaya dan ajaran agama. “Saya bisa tegaskan di sini, budaya itu bukan suatu pakem. Dia bisa berubah. Kini, sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan akses teknologi kian mudah. Ini membuat perempuan semakin berubah dan ingin maju, setara dengan laki-laki,” ungkap Amelia. ■

(mh)



Foto: dok BKSAP

Amelia Anggraini bersama Wiryanti Sukamdani saat mengikuti Women in Parliament Global Forum 2016 di Yordania

KTT Anti Korupsi

Berkolaborasi untuk Berantas Korupsi

Bersama tindak pidana terorisme dan narkoba, korupsi sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan korupsi sangat membahayakan kehidupan bernegara, bahkan hubungan antar negara. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan internasional untuk memberantas rasywah.

Ruang pertemuan disesaki para peserta dari sejumlah negara. DPR RI pun menghadiri pertemuan penting yang membincang kejahatan korupsi tersebut. Inilah Konferensi Tingkat Tinggi Anti-Korupsi yang digelar di London, Inggris. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga Presiden *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) mendapat kehormatan diundang ke *United Kindom Anti-Corruption Summit* pertengahan Mei lalu.

Dunia telah seirama ingin memberangus korupsi yang menjerat sebagian besar negara-negara peserta konferensi. Korupsi telah menghambat pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan dunia internasional. Kerja sama sudah dibangun, tidak saja di bidang hukum, lebih dari itu kerja sama strategi pemberantasan korupsi juga telah terbangun. Berbagai pengalaman antar negara peserta sudah dilakukan.

Fadli Zon mengutarakan, kolaborasi dan kerja sama internasional mutlak diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. "Ada banyak pihak yang dapat mendorong pemberantasan dan pencegahan korupsi. Masyarakat sipil, misalnya, dapat memperkuat sistem whistleblower sekaligus mekanisme melindungi sang whistleblower. Kolaborasi data terbuka, juga dapat mendorong pengawasan oleh publik," jelas Fadli.

Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPR RI dan Presiden GOPAC, Fadli juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk memenuhi undangan *Tackling Corruption Together*, sebuah konferensi bagi masyarakat sipil,



Foto: dok

Peserta Sidang KTT Anti Korupsi

pemerintah, dan juga kalangan bisnis yang digelar oleh *Commonwealth Secretariat*, di Marlborough House, London.

Dalam konferensi tersebut, beragam komunitas masyarakat sipil internasional, bisnis, pemerintah, serta akademisi hadir untuk bertukar pandangan mengenai upaya kolaborasi pemberantasan korupsi ke depan. Sejumlah pembicara dari organisasi internasional seperti OECD, *UN Office on Drugs and Crime* (UNODC), Kantor Presiden Meksiko, Presiden Nigeria, hingga LSM internasional seperti *Transparency Internasional*, *Global Witness*, *Oxfam*, maupun kalangan bisnis seperti *Vodafone*, *Barclays Bank*, terlibat dalam konferensi tersebut.

Salah satu sorotan dalam konferensi tersebut adalah mengenai pentingnya perusahaan mengekspos penerima manfaat utama (*beneficial ownership*) dari beragam aktivitas bisnis yang ada. Ini untuk menghindari keberadaan perusahaan-perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana penghindaran pajak maupun pencucian uang. Kasus *Panama Papers* menegaskan pentingnya *rezim public registry* atas hal tersebut.

"Dalam kesempatan tersebut, GOPAC berdiskusi dengan sejumlah kalangan masyarakat sipil internasional seperti TI hingga *Not In My Country*, sebuah LSM internasional yang menangani korupsi melalui aplikasi

berbasis teknologi. Kami berbicara mengenai kemungkinan kolaborasi ke depan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar Fadli.

Secara spesifik, Direktur Eksekutif *Not In My Country*, Roey B Rosenblith, tertarik berkolaborasi dengan dunia maya dalam mengungkap kasus korupsi dan membangun skema *whistleblowing* di Indonesia. Indonesia, menurutnya, memiliki pengguna dunia maya yang sangat besar dan bisa menjadi kekuatan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan *Not In My Country* merintis aplikasi *crowd source anti-corruption* di sejumlah negara.

Fadli menyambut baik ketertarikan *Not In My Country* untuk berdiskusi lebih jauh mengenai prospek kerja sama yang dapat didorong. "Kami tertarik untuk mengembangkan *platform* serupa bagi kalangan legislator. GOPAC Indonesia dapat memperkenalkan terlebih dahulu terhadap *platform* tersebut," tuturnya.

Ada empat usulan yang berkembang dalam KTT tersebut. Satu diantaranya adalah pembentukan *International Anti-Corruption Coordination Center for Law Enforcement* (IACCC), sebuah organisasi pusat yang akan memperkuat koordinasi penanganan hukum lintas yurisdiksi. Beragam usulan tersebut menjadi pembahasan lebih lanjut dalam KTT di tengah ramainya isu publik mengenai *Panama Papers*. ■

Ernest Harapkan UU Perfilman Akomodir Aspirasi Pelaku Seni

Komika Ernest Prakasa berharap UU Perfilman yang tengah digarap DPR dan pemerintah mampu mengakomodir aspirasi dari semua para pelaku seni di industri perfilman tanah air.

Kiprah Ernest di dunia perfilman memang bisa dikatakan masih seumur jagung. Namun ia tidak hanya mampu berlakon di depan kamera saja. Ia pun pernah menjajal profesi lainnya di industri perfilman. Sebut saja di film terakhirnya yang bertitle *Ngenest* beberapa saat lalu. Ia tidak hanya berakting, namun pria kelahiran 29 Januari 1982 ini pun menulis sendiri skenarionya, dan kemudian ikut menyutradarainya.

Bahkan dalam Indonesian Box Office Movie Award (festival film Indonesia terlaris) itu film *Ngenest* masuk nominasi dalam tiga kategori sekaligus. Meski akhirnya hanya berhasil membawa pulang piala untuk kategori Penulis Skenario terbaik, namun baginya hal tersebut merupakan sebuah prestasi besar dalam karirnya.

Berdasarkan pengalamannya masuk dalam industri perfilman tanah air itu, ia berharap regulasi atau peraturan

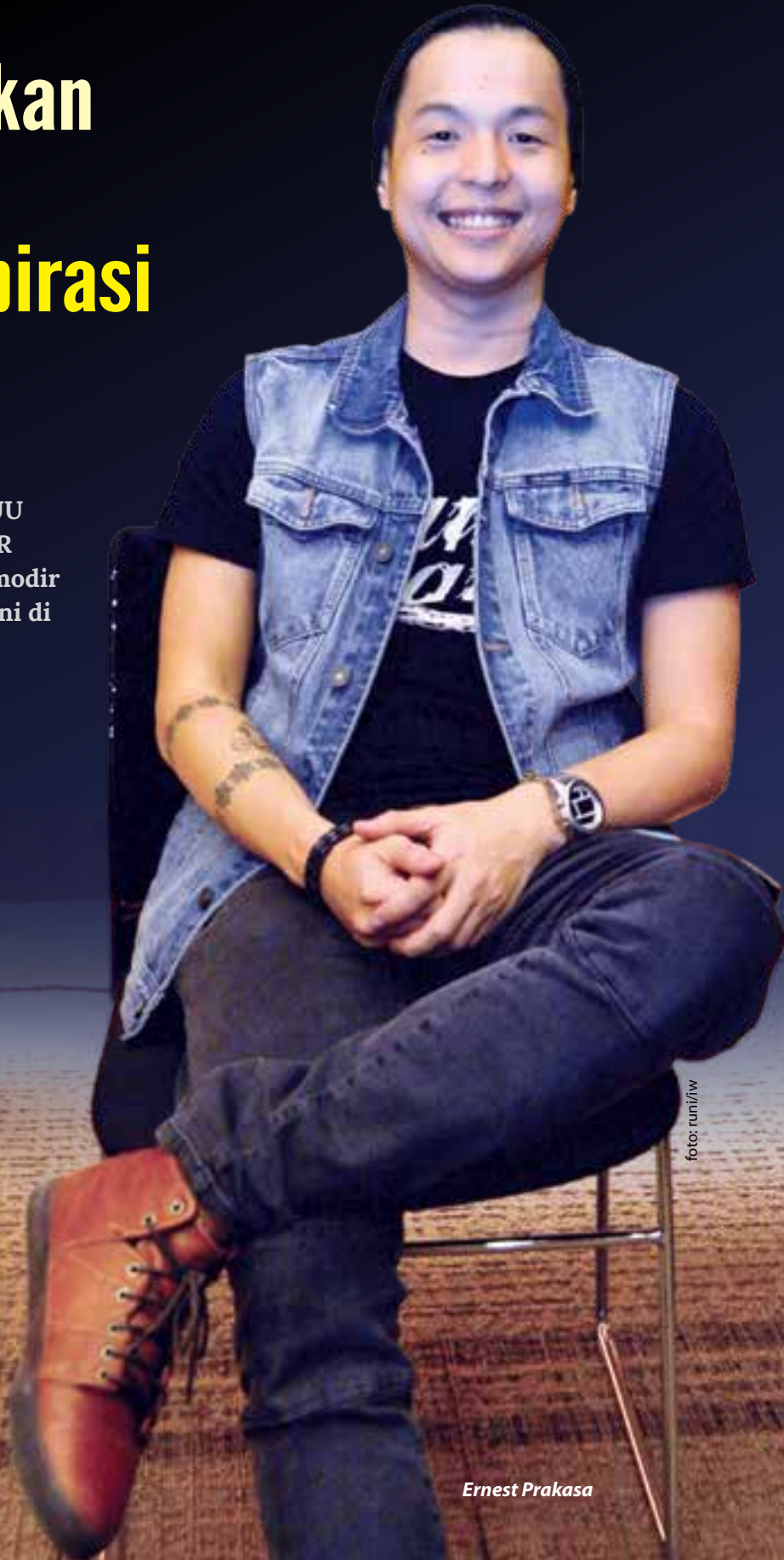


foto: rumi/iw

Ernest Prakasa



foto: runi/iw

Ernest Prakasa melakukan sesi wawancara dengan wartawan

yang tengah disusun DPR RI bersama dengan pemerintah mampu mengakomodir aspirasi dari semua pelaku seni di Industri perfilman tanah air. Hal itu semata, agar industri film tanah air dapat lebih berkembang dan karya anak bangsa pun tetap akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Misalnya dengan menurunkan pajak hiburan serta memberikan kemudahan untuk syuting di lokasi-lokasi tertentu.

“Saya berharap Undang-undang itu mampu menampung aspirasi dari pelaku industry perfilman tanah air dan pekerja seni secara keseluruhan. Itu semua tentu demi kemajuan industri film dan seni tanah air,”ungkapnya saat dijumpai Parlemen di studio SCTV, Jakarta.

Terkait dengan keberhasilannya yang hanya mampu membawa pulang satu piala saja, hal itu pun sangat disyukurinya. Awalnya juara ketiga dalam ajang Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) 2011 ini tidak menyangka film perdana garapannya itu mampu meraih simpati pecinta film Indonesia, dan menjadi salah satu box office movie.

“Sebenarnya sudah bisa masuk dalam nominasi saja sudah senang banget, jadi walaupun hanya mampu membawa pulang satu piala, itu sudah surprise sekali. Ada dalam jejeran sepuluh besar di IBOMA 2016 itu sudah sebuah prestasi banget dan ini sebuah bonus dari apa yang sudah kita lakukan

selama ini,”ungkap Ernest.

Ia mengaku awalnya target yang ditetapkan bersama produser untuk film tersebut hanya sekitar 300 sampai 400 ribu penonton, dan ternyata mampu menembus angka 800 ribu penonton. Dari jumlah penonton yang melebihi target itu saja Ernest mengaku sudah merupakan prestasi tersendiri. Apalagi ditambah dengan dimasukkannya namanya dalam nominasi beberapa kategori seperti pemeran utama terbaik, nominasi sutradara terbaik dan terakhir penulis scenario terbaik.

Ya, keberhasilannya menyabet gelar penulis skenario terbaik itu bukan tidak mungkin karena sejatinya film tersebut diangkat dari novel berjudul yang sama dengan karangnya sendiri. Hal ini seolah ingin mencontoh seniornya yang sudah lebih dulu sukses, yakni Raditya Dika, penulis yang sukses menjadi komika dan pemain film serta berbagai profesi lainnya di Industri hiburan tanah air.

Saat dijumpai Parlemen di studio SCTV, Senayan Jakarta beberapa waktu yang lalu, suami dari Meira Anastasia ini enggan memilih kedua profesi yang tengah dilakoninya. Baginya selagi keduanya bisa dijalankan dengan baik, tentu ia akan menjalankan keduanya, Namun jika dirinya dihadapkan pada keharusan untuk memilih kedua profesi tersebut, Ernest mengaku akan lebih memilih profesi yang menghasilkan honor lebih besar.

“Kalau bisa dijalankan bersama-sama kenapa enggak?, tetapi kalau pun harus memilih pastinya saya akan memilih yang honorinya lebih gede. Dan sepertinya menjadi sutradara honorinya jauh lebih gede ya,”ungkapnya diiringi tawa.

Tur Komedi Tunggal

Nama Ernest dikenal sejak menjadi juara ketiga Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) 2011 yang diselenggarakan oleh Kompas TV hampir di setiap tahunnya. Sejak saat itu tawaran untuk menjadi comedian di berbagai acara pun menghampirinya. Dari sana, ia melepaskan karirnya di industri musik tanah air yang telah ia jalani sebelumnya.

Bersama beberapa senior dan rekannya sesama komika, komika yang kerap mengaku turunan Cina ini mendirikan sebuah komunitas bagi pelawak tunggal (komika) yang diberi Stand Up Indo. Ia pun pernah beberapa kali melakukan sebuah tur komedi tunggalnya di 11 Kota yang dinamai dengan tur Merem Melek. Satu tahun berikutnya, 2013 ia kembali melakukan tur keduanya yang diberi judul Illucinati dengan 17 Kota. Tidak hanya itu ia pun pernah melakukan komedi tunggal khusus bersama para comedian dari etnis Tionghoa-Indonesia berjudul Ernest Prakasa & The Oriental Bandits yang digelar dalam rangka menyambut imlek. Hingga kini setidaknya lebih dari tujuh film layar lebar dan beberapa acara televisi ia lakoni.

Terlepas dari itu semua, ayah dua anak ini mengaku bahwa ia tidak hanya hobi berlakon, namun ia bersama dengan isteri dan kedua anaknya pun kerap menghabiskan waktu untuk menonton film di bioskop. Bahkan ia berharap pengalamannya bersama keluarga menonton film di bioskop itu nantinya dapat merangsang jiwa imajinasi kedua buah hatinya.

“Saya tidak membatasi anak untuk menonton film atau tayangan televise, asal yang sesuai dengan usianya. Karena saya lihat tidak sedikit pelajaran yang bisa diambil dari film dan tayangan tersebut. Asal itu tadi, sesuai dengan usia si anak sendiri. Yang pasti quality time saya bersama keluarga ya di bioskop,” pungkasnya. ■

(Ayu)

Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Parlemen

Adalah ironi ketika lembaga parlemen seperti DPR RI mengalami fluktuasi kepercayaan publik. Padahal, parlemen merupakan salah satu pilar demokrasi. Berbenah diri jadi keniscayaan untuk meraih kembali kepercayaan publik itu.

Ada banyak perubahan yang sudah dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Tidak saja secara fisik gedung DPR RI terlihat lebih rapi dan nyaman, tapi juga layanan publik seperti pengaduan masyarakat sudah terlayani dengan baik. Bahkan, informasi seputar DPR RI kini sudah jauh lebih mudah terakses. Inilah DPR RI yang telah mengalami banyak perubahan mendasar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany memaparkan secara holistik harapan sekaligus perubahan yang sudah dilakukan di parlemen beberapa waktu lalu. Berawal dari sebuah pertanyaan mendasar, mengapa kita perlu kepercayaan publik terhadap parlemen? Tanpa kepercayaan publik, institusi negara tidak mampu berfungsi dengan baik. Ada semacam kepincangan dalam penyelenggaraan negara, bila *public trust* tak diraih.

“Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (parlemen) bisa membahayakan negara

itu sendiri,” jelas Win, sapaan akrab Sekjen DPR. Menurut Win, selalu ada keterkaitan antara kepercayaan publik dengan institusi negara seperti DPR RI dan institusi lain di pemerintahan. Bila publik tak percaya lagi, kekhawatiran yang muncul adalah aksi anarkis dan perlawanan terhadap hukum yang berlaku oleh rakyat.

Untuk parlemen, sambung Win, kepercayaan publik bisa dibangun dari produk-produk legislasi yang dihasilkannya. Betapa pun kuantitas legislasi masih kecil, tapi kualitas harus menjadi yang utama. Parlemen juga tempat rakyat mengadukan nasibnya. Hampir setiap hari berbagai komunitas masyarakat beraudiensi dengan Pimpinan DPR RI dan komisi-komisi yang ada untuk mengadu dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini harus terlayani dengan baik.

Kenyataan yang kini dihadapi DPR RI adalah bagaimana penguatan kelembagaan terus dilakukan untuk menghasilkan kinerja dan prestasi yang

sesuai dengan harapan masyarakat yang tinggi. Prestasi versus ekspektasi. DPR RI juga harus membenahi sistem pengendalian internal dalam memajukan kinerjanya untuk menghindari adanya anggota DPR RI yang terkait masalah pelanggaran hukum. Dikarenakan hal ini selalu menurunkan kredibilitas para anggota dewan. Di sisi lain, masyarakat masih melihat ada konflik kepentingan di lembaga politik. Bila kepercayaan masyarakat terus merosot,



foto: ayadi, arief/iw

Sekretaris Jenderal DPR RI

Winantuningtyas Titi Swasanany



foto: Azka/Iw

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany berdialog dengan Sekjen AIPA saat berkunjung ke Gedung DPR RI

partisipasi masyarakat dalam politik dikhawatirkan juga akan menurun. Pada gilirannya menjadi ancaman bagi demokrasi.

Strategi Pemulihan

Kepercayaan publik sekali lagi begitu urgen bagi lembaga politik. Kepercayaan tersebut, kata Win, bisa mendukung proses legislasi di DPR. Bahkan, kepercayaan itu juga meningkatkan marwah atau martabat DPR RI. Ada lima strategi untuk membangun kepercayaan publik terhadap parlemen.

Pertama, kemauan politik yang kuat untuk berubah (reformasi). Kedua, memberdayakan Komite Etik atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Anggaran (Banggar), Komisi dan Badan Legislasi. Ketiga, Komitmen untuk menjalankan program prioritas (5 tahunan) dalam Program Legislasi Nasional. Keempat, Membangun hubungan baik dengan *stakeholder* (media, *civil society organization*, think tank, akademisi, dan organisasi parlemen). Kelima, keselarasan dengan reformasi Sekretariat Jenderal.

Kemauan yang kuat untuk berubah dipandang penting sebagai motor utama untuk menggerakkan perubahan. Tanpa niat yang kuat, perubahan yang coba dicanangkan bisa berjalan di tempat atau berjalan sangat lambat. Selanjutnya,

pemberdayaan Komite Etik juga bagian dari membangun kepercayaan publik. Komite ini bekerja untuk menegakkan aturan etika yang berlaku bagi para anggota dewan. Dan DPR RI sudah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penjaga benteng etika.

Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Legislasi (Baleg) juga bagian penting yang tak boleh dilewatkan dari program pemulihan kepercayaan publik. Politik anggaran harus betul-betul diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Begitu juga produk legislasi yang dihasilkan dari dapur komisi dan baleg harus mencerminkan kebutuhan bangsa dan negara dengan melahirkan UU yang berkualitas.

Terkait dengan legislasi, Baleg memang harus memiliki peta prioritas atas produk legislasi yang perlu segera diselesaikan. Dengan begitu, kebutuhan publik terhadap UU bisa diakomodir dengan baik. Pada bagian lainnya yang tak kalah penting dalam membangun kepercayaan publik. Membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak penting dilakukan parlemen untuk membuka komunikasi.

Relasi yang baik perlu dibangun dengan sejumlah media massa nasional, LSM, para akademisi, dan organisasi parlemen lainnya. Komunikasi dengan lingkungan di luar parlemen penting dilakukan untuk

bertukar pikiran, promosi terhadap capaian DPR, maupun sosialisasi atas apa yang telah dihasilkan DPR. Dengan begitu, ada daya terima yang baik dari publik kepada DPR. Mata publik perlu dibuka untuk melihat sisi positif DPR.

Sementara itu, bagian terakhir dari strategi membangun kepercayaan publik adalah dengan mendukung reformasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan terhadap internal lembaga ini lewat reformasi birokrasi. Dan Setjen DPR RI telah melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan dukungan Setjen sebagai sebuah *supporting system*.

Aksi strategis lainnya yang telah dilakukan Setjen DPR RI untuk meraih kepercayaan adalah dengan menguatkan sistem dan standar prosedur operasi. Ada pula aksi menguatkan manajemen SDM, perluasan *networking* dengan instansi yang relevan, memperbaiki sistem pelayanan publik, dan memajukan *information communication technology* termasuk inisiasi e-lektronik parlemen.

Semua langkah reformasi birokrasi ini ditujukan untuk membangun profil dan perilaku pegawai Setjen DPR RI yang religius, bertanggung-jawab, profesional, berintegritas tinggi, produktivitas tinggi, serta berkemampuan memberikan dukungan paripurna kepada DPR. ■ (ann)

Langkah Inovatif Ittama: PPM dan E-LIT

Oleh : **Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi** (Inspektur I)

Arah kebijakan pembangunan bidang aparatur negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya dalam penjabaran Buku I RPJMN disebutkan bahwa langkah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam rangka pembangunan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui strategi penguatan kebijakan pengawasan intern pemerintah.

Lahirnya Inspektorat Utama (Ittama) sebagai unit eselon I merupakan wujud komitmen Sekjen DPR RI melakukan penguatan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai unit eselon I, Ittama memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lahirnya Ittama juga sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Keberadaan Ittama harus didukung dengan SDM yang memadai. Namun, berdasarkan penilaian *Internal Audit Capability Model* (IACM), kapabilitas APIP di Ittama masih berada pada level 1 (initial) yang berarti belum mampu untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*). Untuk itu diperlukan suatu langkah inovatif untuk meningkatkan kapabilitas APIP dalam hal ini auditornya yaitu melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan *E-Learning* Ittama (E-LIT).



Dewi Barliana Soetisna

foto: iwan armanias

Apakah PPM dan E-LIT?

PPM adalah kegiatan pelatihan sebagai sarana *transfer of knowledge* yang dilaksanakan secara mandiri di kantor sendiri dengan cara tatap muka.

E-LIT adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara sistematis dan terstruktur dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin.

Pola *transfer of knowledge* dan *knowledge management* seperti PPM dan E-LIT merupakan sebuah inovasi yang baru pertama ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan secara khusus diinisiasi oleh Inspektorat Utama. Saat ini PPM dan E-LIT masih menjadi salah satu cara untuk peningkatan kapabilitas auditor sebagai pemenuhan kewajibannya dalam rangka pengembangan kompetensi yang dipersyaratkan untuk kenaikan angka kredit. Dengan pola ini auditor dapat melatih dan meningkatkan

kemampuan penggunaan teknologi informasi (E-LIT) dan dapat menuangkan berbagai macam ide, gagasan, pikiran serta sekaligus memberikan *guidance* agar dapat lebih mengembangkan kemampuan mobilitas Ittama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Karena dengan cara digital ini dapat mengubah cara orang berpikir dan berperilaku, dan manfaat terbesar penggunaan digital adalah kenyamanan, bagi organisasi dan anggota organisasi itu sendiri. Dengan E-LIT berbagai informasi dapat diperoleh secara murah, cepat dan tepat sasaran. Di satu sisi banjir informasi menjadi berkah namun bisa menjadi tantangan untuk mencari informasi yang terpercaya. Dengan E-LIT setiap waktu ada peluang untuk belajar.

PPM dan E-LIT telah di-*launching* secara resmi pada tanggal 4 Mei 2016. Dengan demikian, aplikasi E-LIT dapat diakses langsung melalui portal dan merupakan bagian dari *website* Ittama yang akan segera di-*launching* secara resmi pada Juni 2016. PPM dan E-LIT ini telah dilengkapi dengan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor: 620/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan PPM dan *E-Learning* Ittama Setjen DPR RI.

Manfaat dari inovasi PPM dan *E-Learning* tersebut bersinergi dengan visi Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel. Dan tentunya manfaat tersebut mendukung misi Sekretaris Jenderal yaitu mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif. Besarnya manfaat yang dirasakan baik pihak internal maupun eksternal bermuara pada semakin kuatnya peran APIP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Peran strategis APIP tersebut antara lain (1) mengawal program dan

kebijakan pemerintah; (2) mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi; (3) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta (4) mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan. Peran strategis APiP tersebut mendukung upaya mewujudkan salah satu program Nawacita, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokrasi, dan terpercaya.

Harapan kedepannya, untuk keberlanjutan peningkatan kapabilitas auditor di Ittama Setjen DPR RI, kriteria keberhasilannya harus adanya integritas dan komitmen Pimpinan Setjen DPR RI dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern (APiP) di lingkungan Setjen DPR RI. Karena PPM dan E-LIT ini pun merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang

– Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 21, yang disebutkan diantaranya bahwa ASN berhak atas pengembangan kompetensi, maka PPM dan E-LIT ini adalah salah satu sarana untuk memenuhi hak auditor untuk mengembangkan kompetensinya. Semoga PPM dan E-LIT ini benar-benar bisa membawa perubahan bagi penguatan kelembagaan Ittama dan menjadi budaya kerja Ittama. ■

Panduan Singkat Aplikasi e-learning Inspektorat Utama (e-lit) <http://elit.dpr.go.id> (Sumber : BDTI)

1. PORTAL PEGAWAI



Kunci utama dalam mengakses Aplikasi Portal adalah dengan menggunakan akun email Anda, jadi pastikan bahwa akun **email@dpr.go.id** milik Anda selalu dalam keadaan aktif dan tidak terblokir. Masukkan username dan password email Anda untuk Login portal. Jika Anda lupa **username** dan **password** akun email Anda, maka segeralah menghubungi BDTI sebagai unit pengelola TI di lingkungan DPR RI. Setelah berhasil login kedalam aplikasi Portal, Anda akan mendapat tampilan halaman utama Portal Pegawai dan pilih aplikasi **ELIT** untuk membuka pada aplikasi e-Learning.

2. Aplikasi E-Learning Ittama : e-Learning adalah sebuah sistem yang menyediakan media pembelajaran *online* dan mandiri di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.



Klik pada nama Anda di bagian atas aplikasi untuk memunculkan pilihan menu yang dapat Anda gunakan.

Dashboard berisi tentang

1. Informasi Umum :

Berisi tentang daftar kursus yang sedang Anda ikuti saat ini.

2. Kalender PPM

Berisi tentang jadwal kursus yang tersedia dalam rentang satu tahun.

3. Jadwal Pengajar

Berisi tentang jadwal pengajar yang tersedia dalam rentang satu tahun.



Pada setiap PPM yang diajarkan terdapat Modul-Modul yang telah disediakan sesuai topik dan subjek PPM.

Dalam setiap Modul tersedia Materi atau bahan ajar yang dapat Anda lihat atau unduh berupa file PDF dan video/audio.

Anda dapat menyimpan file Materi pada komputer Anda dengan mengunduhnya terlebih dahulu.



Pilih Tab Diskusi untuk melakukan konsultasi atau forum tanya jawab bersama pengajar.



Panduan penggunaan aplikasi E-Learning Ittama selengkapnya dapat diunduh melalui <http://elit.dpr.go.id>



Foto: privacyinternational.org

Suasana rapat di Parlemen Swiss

Parlemen Swiss, Popular Initiative dan Referendum

Oleh: Peneliti CEPP FISIP UI

Sasmithaningtyas Prihasti Laraswari S.IP., Larissa Amanda Indianti S.IP., dan Jamalianuri Thahir S.IP

Swiss merupakan sebuah negara kecil berbentuk federal dengan jumlah penduduk 7,8 juta orang. Masyarakat Swiss memiliki keberagaman dari segi penggunaan bahasa dan sejarah keagamaan yang mengakar telah sejak tahun 1291. Berbatasan dengan negara Jerman, Austria, Liechtenstein, Italia, dan Perancis, Swiss memiliki 26 *Canton* dengan jumlah penduduk per-*Canton*

berkisar 15.000–1.240.000 penduduk dan memiliki sekitar 2600 kotamadya.

Dengan sistem federasi, setiap *Canton* memiliki otonominya masing-masing, bahkan dalam segi konstitusi, bendera, dan lagu kebangsaan. Sistem federal Swiss merupakan sistem yang tidak tersentralisasi pada satu bentuk kekuasaan karena kekuasaan terbagi menjadi tiga tingkat pemerintahan yaitu di tingkat federal, *canton*, dan

kotamadya. *Canton* memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah kebijakan di tingkat federal.

Secara garis besar, ideologi politik yang berkembang di Swiss terbagi menjadi liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Dari segi kepartaian, Swiss menerapkan sistem multi-partai dan sistem pemilu proporsional dengan empat partai utama yang mendominasi politik nasional dan

menempati kursi di parlemen yaitu: *Radicals*, *Christian Democrats*, dan *The Swiss People's Party*. Pada pemilu tahun 2015 kemarin, *The Swiss People's Party* yang merupakan sebuah partai konservatif sayap kanan merebut 29% kursi di parlemen. Selain keempat partai tersebut, terdapat 13 partai kecil lain yang terepresentasi di parlemen. Selain itu, terdapat partai-partai lain yang berada di tingkat lokal/*Canton*. Sistem politik Swiss menerapkan demokrasi langsung melalui pemilihan umum dalam menentukan pemimpin dan pelaksanaan referendum terkait isu yang membutuhkan persetujuan dari warga negara Swiss.

Parlemen Swiss

Parlemen Swiss (*The Federal Assembly*) sebagai pemegang kekuasaan legislatif merupakan parlemen bikameral dengan kekuasaan yang sejajar. Terdiri dari 200 kursi di *National Council* yang merepresentasi penduduk Swiss secara proporsional

dan 46 kursi *Council of States*/senat yang merepresentasi *cantons*. Namun di tingkat *Canton*, sistem parlemen lokal yang ada merupakan unikameral dan 80% dari kotamadya tidak memiliki parlemen lokal, *citizens' assembly* merupakan otoritas tertinggi (Swiss Political System: hlm.24). *The Federal Assembly* memiliki fungsi legislatif dalam membuat perundang-undangan

di tingkat federal dan memiliki kewenangan untuk menentukan anggota dari *Federal Council* dan *Federal Court*, pemimpin tertinggi militer (terutama jika dalam keadaan status perang), dan institusi federal utama lainnya. *The Federal Assembly* memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah federal dan memiliki fungsi penganggaran dengan menyetujui APBN yang disiapkan oleh *Federal Council*.

Salah satu keunikan para anggota parlemen di Swiss adalah mereka berstatus sebagai *part-time* sehingga *The Federal Assembly* memiliki karakter sebagai parlemen yang semi profesional. Tidak seperti status anggota parlemen di negara lainnya yang merupakan pekerja penuh, anggota parlemen di Swiss sebagian besar memiliki profesi lain selain menjadi anggota parlemen. Rata-rata, para anggota parlemen menyisihkan 60% dari waktu kerja mereka untuk pekerjaan legislasi.

“
Salah satu keunikan para anggota parlemen di Swiss adalah mereka berstatus sebagai *part-time* sehingga *The Federal Assembly* memiliki karakter sebagai parlemen yang semi profesional.”



Foto: worldcompetes.com

Gedung Parlemen Swiss

Sejarah Referendum Swiss

Bentuk pemerintahan yang terdapat di Swiss merupakan republik federal sejak tahun 1848. Republik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Republik federal adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum dan negaranya terdiri dari negara-negara bagian atau dikenal dengan sebutan *canton*. Sejak 1848, konstitusi federal Swiss sudah mengadaptasi bentuk politik demokrasi langsung. Penggunaan demokrasi pada sistem federal, dikenal sebagai *civic rights* (*Volksrechte, droits civiques*), memungkinkan warganya untuk menentukan keputusan-keputusan parlemen. Dengan sistem tersebut, penduduk dapat aktif berpartisipasi dalam pembuatan hukum yang ada karena hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan keputusan dari mayoritas penduduk.

Tahun 1865, salah satu revisi konstitusi *canton* di Zurich memperkenalkan "*popular initiative*" yaitu dimana 10.000 pemilih dapat menuntut perubahan konstitusi. Pada tahun 1869, mulai diperkenalkan referendum wajib untuk semua perubahan konstitusi, hukum, Pemilu, hingga perihal pajak.

Sistem demokrasi langsung di Swiss, pemerintahannya terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Majelis Federal. Ketujuh orang tersebut secara bergantian menjadi presiden dan masing-masing memiliki masa jabatan selama satu tahun. Swiss juga mengadopsi sistem republik direksional yang merupakan sebuah sistem di mana suatu Negara dipimpin oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang secara bersama-sama menjalankan kekuasaan sebagai kepala Negara.

Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan presidensial) yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Di Swiss,

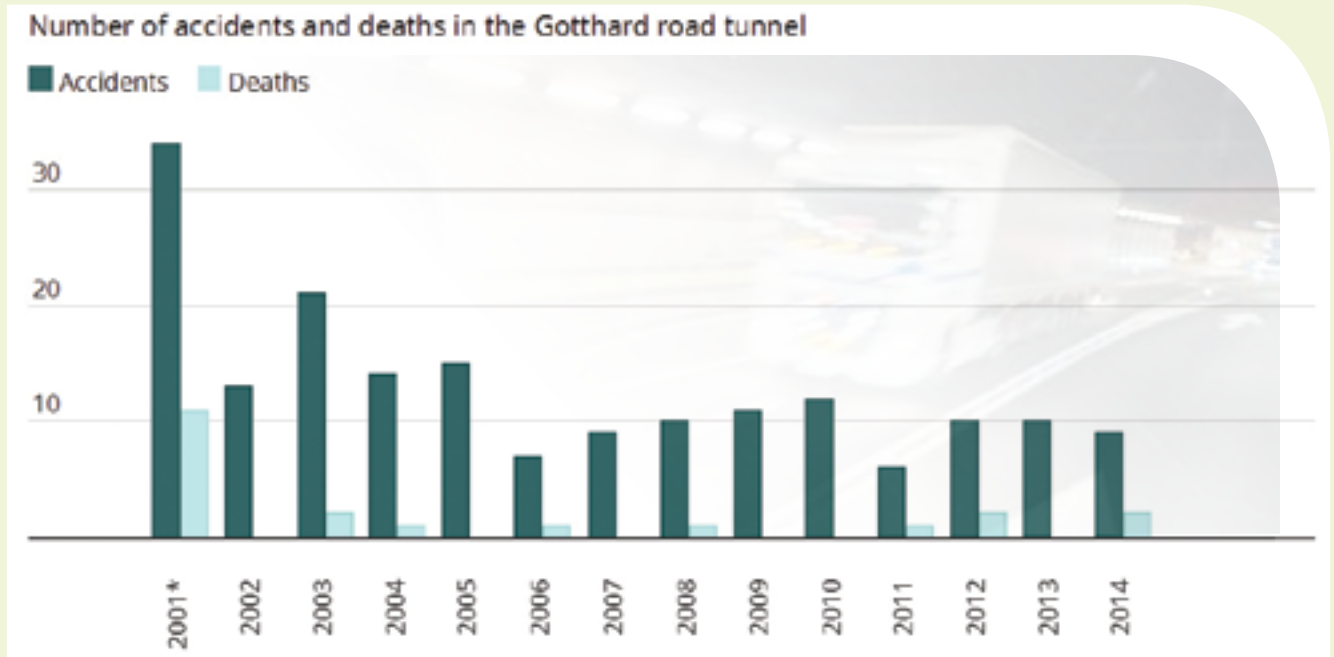
parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara, dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Terdapat dua jenis referendum yang diterapkan di Negara Swiss, yaitu *facultative referendum* dan *obligatory referendum*. *Facultative referendum* adalah ketika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Kemudian akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang sering digunakan. *Obligatory referendum* adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan.

Pemilihan biasanya diadakan



Terowongan Gotthard, Swiss.

Foto: Swissinfo.ch



Grafik kecelakaan yang terjadi di Terowongan Gotthard

sumber: Swissinfo.ch

pada hari Sabtu dan berakhir pada hari Minggu siang. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat untuk menjawab antara iya dan tidak. Hasil pemilihan dihitung secara manual oleh sekelompok orang yang dipilih untuk tanggung jawab ini. Biasanya, penghitungan selesai dalam waktu 5-6 jam. Hasil pemilihan yang akan dipertimbangkan adalah keputusan mayoritas dari keseluruhan penduduk dan keputusan mayoritas dari *canton-canton* yang ada (*double majority*).



Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan.



Hingga tahun 1971, perempuan tidak diberi hak untuk memilih atau memegang jabatan untuk tingkat federal, sedangkan untuk tingkat *canton* hingga tahun 1959. Setelah perempuan diberikan hak pilih di tingkat federal, perempuan pertama yang menjadi anggota dewan tinggi adalah Elisabeth Kopp (1984-1989) dan Presiden perempuan pertama adalah Ruth Dreifuss, dipilih pada tahun 1998 untuk menjadi presiden pada tahun 1999.

Referendum Swiss

Pada Februari 2016, Swiss telah mengadakan referendum sebanyak empat kali. Dari keempat referendum tersebut hanya satu yang disetujui, yaitu terkait pembangunan kembali Terowongan Gotthard. Terowongan Gotthard yang sudah dipergunakan sejak tahun 1980 ini hanya memiliki satu jalur dari Goschenen menuju Airolo dan satu jalur untuk arah sebaliknya. Melalui referendum ini, terowongan ini akan ditambah menjadi empat jalur. Akan tetapi, dari empat jalur ini, tetap hanya 2 jalur yang diaktifkan, sementara 2 jalur lainnya digunakan sebagai jalur darurat bila terjadi kecelakaan di dalam terowongan.

Keputusan ini diambil karena

tingginya resiko yang harus ditanggung oleh para pengendara bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan dan tidak ada ruang bagi mereka untuk keluar dari terowongan. Hampir sekitar 10 kecelakaan terjadi setiap tahunnya sepanjang tahun 2001 hingga 2014.

Sampai dengan referendum pada 28 Februari 2016 kemarin, proses pemungutan suara terkait hal ini selalu batal diimplementasikan karena banyak penolakan dari warga Swiss. Penolakan ini muncul karena permasalahan yang mungkin ditimbulkan seperti peningkatan kemacetan dan kerusakan lingkungan, menghamburkan dana negara karena pembuatan terowongan baru membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akhirnya, pada bulan Februari yang lalu, dari total suara yang masuk baik dari dalam negeri maupun warga negara Swiss di luar negeri sebanyak 5.459.331 hanya 3.304.249 yang ditetapkan sebagai suara sah. Sebesar 57% dari total suara sah menyatakan "Setuju" dan 43% sisanya menyatakan "Tidak". Berdasar pada hasil referendum ini, pembangunan kembali dari Terowongan Gotthard diperkirakan akan selesai pada tahun 2030. ■



foto: andri/iw

Sejumlah pramugari dan pilot Lion Air turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Direksi Lion Air

Benci-Rindu Lion Air

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi V DPR RI dengan jajaran Direksi, pilot dan pramugari Lion Air di Ruang Rapat Gedung Nusantara Selasa (24/5) lalu berbeda dengan rapat-rapat lainnya. Maklum topik yang dibahas cukup menarik, terasa menyebalkan karena maskapai yang satu ini dikenal sering delay, juga kasus salah menurunkan penumpang dari luar negeri di terminal domestik. Atas kasus ini Kemenhub menjatuhkan sanksi, tetapi pihak Lion Air malah mengadakan ke Bareskrim, Polri.

Namun di sisi lain maskapai yang dimiliki anggota Wantimpres Rusdy Kirana ini sangat membantu masyarakat dengan tarif murah. Sejumlah anggota mengapresiasi dan berharap maskapai ini tetap beroperasi sebab masyarakat sangat terbantu termasuk warga masyarakat di pelosok-pelosok tanah air

Lantaran yang hadir adalah pilot yang dikenal ganteng dan pramugari yang dikenal cantik maka anggota

Dewan dan pers serta pengunjung banyak yang hadir dan ruangan Rapat terasa penuh. Begitupun pertanyaan, saran dan harapan yang disampaikan para legislator terkesan “sersan”-serius tapi santai bahkan diwarnai canda tawa.

Sebagaimana disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kadi, permasalahan yang mewarnai pelayanan Lion Air selama ini bersumber dari internal perusahaan, karena itu perbaikan total harus segera dilakukan. “Kalau kita bicara delay, ada satu proses. Bukan masalah maskapai. Internal harus diperbaiki,” tekan dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Miryam S Hariyani menilai rakyat membutuhkan Lion Air karena pemerintah belum menjawab kebutuhan soal penerbangan. Kendati demikian, kesejahteraan karyawan, khususnya pramugari dan pilot sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu perlu diperhatikan.

“Mbok ya pilot sama pramugarinya

diperhatikan. Lion Group menjadi besar karena mereka. Itu harus jadi prioritas manajemen Lion, perbaiki semua sisi,” harap politisi Hanura ini dengan mengimbau agar Lion Group tidak usah panik dengan teguran yang disampaikan pemerintah. Semua demi perbaikan.

Anggota Fraksi Gerindra Novita Wijayanto berharap agar Lion Air bisa memperbaiki apa yang jadi kesalahannya hingga akhirnya mendapat sanksi tegas dari Kemenhub. “Masyarakat sangat membutuhkan Lion Air. Harapan saya ke depan Lion Air jadi harapan masyarakat, dengan tiket murah jangan sampai servicenya rendah. Jangan rohnya saja yang rendah,” candanya.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pesan dari Komisi V DPR RI bahwa kita mencintai Lion Air dalam rangka memberikan pembelaan, tidak dalam rangka untuk membinasakan. Terlebih berkaitan dengan maskapai penerbangan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap bangsa dan negara. ■

(nt, mp)

Ada Kudeta di Press Room?

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengawali sambutan dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Batam pada Jumat 27 Mei lalu dengan gaya santai dan sedikit bercanda. Pimpinan DPR RI yang akrab dipanggil Akom ini merasa ada hal yang tidak seperti biasanya, lantaran yang duduk di jajaran nara sumber mewakili wartawan bukan Ketua Koordinatoriat Hilman Matauch. Yang tampil memberikan sambutan ternyata salah satu Pengurus Koordinatoriat Irendy Kamara.

“Saya tadi agak kaget dan bertanya kepada Sekjen, ini Pimpinan Press Room DPR sudah berubah. Ini kayanya ada kudeta tak berdarah,” ungkapnya disambut tawa hadirin termasuk sekitar 100 wartawan pada acara Press Gathering ini.

Tapi lanjut Ketua DPR, “kalau diijinkan senior wartawan seperti Khairul Habiba dan Pak Jaka (mantan Ketua Koordinatoriat), kayanya jadi juga” lagi-lagi disambut tawa dan tepuk tangan para wartawan.

Akom mengaku sudah dua kali hadir dalam acara Press

Gathering bersama Wartawan Koordinatoriat DPR. Pertama saat digelar di Bogor dan kedua di Batam ini.

Pada acara ini Ketua DPR RI menyampaikan protes kepada wartawan, sebab biasanya wartawan yang protes kepada Pimpinan DPR. “Kali ini gantian, saya yang protes,” tukasnya.

Yaitu soal minimnya produk UU pada Masa Sidang yang lalu. Padahal sidangnya hanya sebulan, dikritik habis-habisan dalam masa sidang ini tidak menghasilkan satu UU pun. “Tega amat para wartawan. Untuk yang satu ini saya protes,” katanya lagi.

Selanjutnya Akom menegaskan, pihaknya sudah berkomitmen dengan teman-teman Anggota Dewan, bahwa DPR sekarang harus produktif. Sebelumnya setahun hanya 3 (tiga) UU dan setelah itu dalam 3 bulan menghasilkan 6 (enam) UU, Alhamdulillah berarti ada peningkatan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Dan pertanggungjawaban itu akan sampai kepada rakyat lewat teman-teman wartawan. ■

(mp)



foto: jayadi/iw

Pengurus Koordinatoriat Wartawan DPR RI Irendy Kamara menyampaikan sambutan dalam acara Press Gathering di Batam

Bung PARLE

GEMAH RIPAH LOH JINAWI. TOTO TITI TENTREM KERTO RAHARJO KEKAYAAN ALAM YANG BERLIMPAH, DAN PENDUDUK NEGERI YANG TENTERAM.

IYA SEBENARNYA ITU GAMBARAN BUAT BUMI INDONESIA. NEGERI SUBUR TANAH DAN HASIL LAUTNYA YANG BERLIMPAH

PADAHAL HAK UNTUK MEMPEROLEH PANGAN MERUPAKAN SALAH SATU HAK ASASI MANUSIA, SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PASAL 27 UUD 1945 MAUPUN DALAM DEKLARASI ROMA (1996). PERTIMBANGAN TERSEBUT MENDASARI TERBITNYA UU NO. 7/1996 TENTANG PANGAN, SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR

KEKAYAAN ALAM INDONESIA SEHARUSNYA BISA MENCUKUPI SEGALA MACAM KEBUTUHAN POKOK PENDUDUK NEGERI YA...

IYA... TAPI KENAPA NEGARA KITA MASIH MEGAP-MEGAP MENUTUPI PANGAN RAKYATNYA YA ?

GAK ADA YANG TIDAK BISA KITA TANAM DI INDONESIA KECUALI TERIGU... NGGAK SULIT UNTUK MENCUKUPI PERSEDIAAN PANGAN NASIONAL KOK... INI TINGGAL KEMAUAN KITA AJA, ADA NIAT APA NGGAK ?

BETUL... KEDAULATAN PANGAN HARUS MENJADI MINDSET. KEDAULATAN PANGAN HARUS MENJADI CARA BERPIKIR, SEMOGA NEGARA KITA MAMPU MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN YA !